



eSCRIPT

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Editor:

DR. Sunarno Sastro Atmodjo

Ignatius Ario Sumbogo

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Editor:

DR. Sunarno Sastro Atmodjo

Ignatius Ario Sumbogo



**PT Kreasi Skrip Dijital
2023**

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Hak cipta © 2023 pada penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh

PT Kreasi Skrip Digital

Jl. Pulomas Selatan, Kav. 22

Jakarta Timur 13210

Email: ksd.publisher@gmail.com

Telepon: 081286320067

Fax: (021) 4788-3651

Website: <http://www.escript.my.id/>

<i>Penulis</i>	DR. D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Si. Slamet Suprihanto, S.E., M.Ak., M.M., C.A.P., C.A.A.T., C.T.T., C.P.F.R.A. Muhammad Rafi'i Sanjani, S.E.I., M.E. Dr. Asriati, SE., Msi. Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M. Dr. Muhammad Rusydi, M.Si. Dr. Muhammad Fahreza W, S.Pd, M.Pd, Naidah, M.Si. Rini Ardista, S.Pd.I., MM Warda, S.E., M.E. Sriwanti Belani, S.E., M.M. DR. Muhammad Ikram Idrus, SE, MS. Dr. Arniati, SE.,MPd. Nancy Nopeline SE.,M.Si
<i>Editor</i>	DR. Sunarno Sastro Atmodjo
<i>Ilustrasi</i>	Ignatius Ario Sumbogo
<i>Cover</i>	Ignatius Ario Sumbogo
ISBN	978-623-97062-7-2 (PDF)

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan dan penguatanNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan naskah Pengantar Ekonomi Makro ini. Tanpa tuntunan, bimbingan, penyertaan, serta anugerah dan berkatNya, buku ini sulit untuk dapat dituntaskan.

Terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan/Pengurus Perguruan Tinggi di Jabodetabek, yang pernah memberikan kesempatan untuk mengajar Mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Dengan adanya kesempatan tersebut, maka dapat terbuka peluang serta keinginan untuk menulis buku Pengantar Ekonomi Makro ini.

Tentu saja banyak dukungan dari teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi, serta teman-teman seperjuangan dalam kepenulisan. Begitu juga banyak mendapatkan dorongan dan fasilitas dari segenap keluarga serta semua sahabat karib. Untuk kesemua pihak tersebut, saya ucapkan banyak terimakasih.

Saya sadar bahwa buku ini jauh dari sempurna. Saya sangat mengharap koreksi serta masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, serta para pembaca secara khusus.

Sekian dan terima kasih.

Bekasi, 17 Juli 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENGERTIAN ILMU DAN SISTEM EKONOMI	2
B. CABANG-CABANG DAN PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI	4
C. PERANAN DAN ANALISIS ILMU EKONOMI MAKRO	5
D. SUMBERDAYA ALAM, SUMBERDAYA MANUSIA DAN SUMBER DANA	6
E. PASAR DALAM ILMU EKONOMI MAKRO	10
F. DAFTAR PUSTAKA	12
BAB II PELAKU DAN PASAR EKONOMI MAKRO	16
A. PENGERTIAN EKONOMI MAKRO	17
B. BENTUK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	23
C. RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO	24
D. TUJUAN EKONOMI MAKRO	25
E. PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO	27
F. PERAN EKONOMI MAKRO	28
G. INTERAKSI PELAKU DAN PASAR DALAM EKONOMI MAKRO	31
H. DAFTAR PUSTAKA	32
BAB III UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN	34
A. DEFINISI DAN PENGERTIAN UANG	35
B. FUNGSI UANG	36
C. LEMBAGA KEUANGAN	38
D. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN	39
E. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN PERBANKAN	54
F. DAFTAR PUSTAKA	62
BAB IV SIKLUS EKONOMI	65
A. PEMBAHASAN SIKLUS EKONOMI	66
B. SIKLUS EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL	67
C. SIKLUS EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	69

D. HUBUNGAN SIKLUS EKONOMI DAN <i>EMPLOYEMENT RATE</i> DI INDONESIA	70
E. MODEL DAN SIKLUS EKONOMI	72
F. SIKLUS EKONOMI DIMASA PANDEMIC COVID-19.....	74
H. DAFTAR PUSTAKA	75
BAB V PERTUMBUHAN EKONOMI	78
A. PENDAHULUAN	79
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI	82
C. DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI	88
D. KESIMPULAN	93
E. DAFTAR PUSTAKA	94
BAB VI KESEIMBANGAN UMUM PASAR UANG DAN PASAR BARANG	97
A. KONSEP KESEIMBANGAN UMUM	98
B. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	103
C. KRITIK TERHADAP TEORI KESEIMBANGAN UMUM	106
D. DAFTAR PUSTAKA	108
BAB VII KESEIMBANGAN PASAR UANG DAN BARANG	110
A. PENDAHULUAN	111
B. KESEIMBANGAN DI PASAR UANG (ANALISIS KURVA LM)	111
C. PERMINTAAN UANG	111
D. PENAWARAN UANG	112
E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPANGARUHI KURVA LM	119
F. KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG (ANALISIS KURVA IS)	123
G. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPANGARUHI KURVA IS	129
H. KESEIMBANGAN EKONOMI MAKRO	134
I. DAFTAR PUSTAKA	137
BAB VIII PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT	139
A. KONSEP DASAR PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT	140

B. PENAWARAN TENAGA KERJA UNTUK SUATU PERUSAHAAN	144
C. PENAWARAN AGREGAT MENURUT KAUM KLASIK DAN KEYNESS	145
D. PERBEDAAN TEORI KLASIK DAN TEORI KEYNES	149
E. PANDANGAN KLASIK	149
F. PERKEMBANGAN ANALISIS AD-AS. (<i>AGGREGATE SUPPLY/AS</i>) DAN (<i>AGGREGATE DEMAND/AD</i>)	152
G. PERANAN PENGELUARAN AGREGAT	153
H. TINGKAT HARGA DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	153
I. TINGKAT HARGA, SUKU BUNGA DAN INVESTASI	154
J. TINGKAT HARGA, EKSPOR DAN IMPOR	154
K. DAFTAR PUSTAKA	160
BAB IX MASHAB PENENTU KEGIATAN EKONOMI NEGARA	162
A. PENGERTIAN MAZHAB EKONOMI	163
1.1 ALIRAN PRAKLASIK	164
1.2 ALIRAN KLASIK	165
1.3 ALIRAN HISTORIS	169
1.4 ALIRAN SOSIALIS	172
1.5 ALIRAN SOSIALISME ILMIAH	172
1.6 ALIRAN NEO-KLASIK.....	174
1.7 ALIRAN KEYNES	175
1.8 ALIRAN PASCA-KEYNES	176
B. DAFTAR PUSTAKA	179
BAB X PENDAPATAN NASIONAL	181
A. PENDAHULUAN	182
B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL	183
C. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL	185
D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NASIONAL	186
E. JENIS-JENIS PENDAPATAN NASIONAL	188
F. MANFAAT PENDAPATAN NASIONAL	191
G. METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL	193
H. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	196

I. PENDAPATAN PER KAPITA	196
J. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL	197
K. DAFTAR PUSTAKA	198
BAB XI KEBIJAKAN STABILISASI	200
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN STABILISASI	201
B. MEMAHAMI KEBIJAKAN STABILITAS	202
C. AKAR KEBIJAKAN STABILISASI	204
D. PENYEBAB KETIDAKSTABILAN.....	204
E. EFEK KETIDAKSTABILAN	205
F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STABILITAS EKONOMI	205
G. INDIKATOR STABILITAS EKONOMI	206
H. KUNCI KEBIJAKAN STABILISASI	209
I. MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN STABILITASI	210
J. MASA DEPAN KEBIJAKAN STABILISASI	214
K. DAFTAR PUSTAKA	214
BAB XII KEBIJAKAN FISKAL	217
A. DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL	218
B. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL	221
C. JENIS-JENIS KEBIJAKAN FISKAL	223
D. BENTUK KEBIJAKAN FISKAL	224
E. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL	225
F. KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL	228
G. DAFTAR PUSTAKA	229
BAB XIII PERDAGANGAN LUAR NEGERI	232
A. DEFINISI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	233
B. PERTUMBUHAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	234
C. TEORI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	235
D. KEBIJAKAN PERDAGANGAN	243
E. DAFTAR PUSTAKA	245



BAB I

PENDAHULUAN

**DR. D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo,
S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom.,
M.M., M.Si.**

A. PENGERTIAN ILMU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI

1. Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli

Pengertian ilmu ekonomi mengalami transformasi dan pengayaan dalam setiap tahap perubahan jaman. Dalam proses penyempurnaan pemahaman baru tersebut terdapat beberapa definisi kunci yang diacu oleh penulis, yakni pandangan dari beberapa tokoh ekonomi berikut.

a. Albert L Meyers

Albert L Meyers menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan serta pemuas akan kebutuhan manusia.

b. P.A. Samuelson

P.A. Samuelson menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi yaitu suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa mendatang, pada berbagai orang dan golongan masyarakat.

c. Sadono Sukirno

Sadono Sukirno menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi merupakan studi tentang analisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2. Pengertian Ilmu Ekonomi Hasil Kompilasi

Dasar pijakan definisi-definisi tersebut umumnya sama, yakni bersumber pada masalah keterbatasan sumber daya, masalah kemakmuran, masalah kapuasan manusia yang tak terbatas, serta masalah kegiatan pertukaran. Paul Samuelson, ekonomi Amerika Serikat yang pernah memenangkan hadiah Nobel, mendefinisikan Ilmu Ekonomi sebagai cara individu atau masyarakat untuk memilih dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya produktif yang

jumlahnya terbatas, untuk memproduksi berbagai jenis barang, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi pada berbagai golongan penduduk.

Suatu ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin tertentu setelah Adam Smith mencetuskan sistematikanya dalam bukunya *An Enquiry Into The Nature an Causes of the Wealth of Nations* yang terbit 1776. Tahun penerbitan buku inilah yang kemudian dijadikan tonggak lahirnya ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu baru. Tetapi sesungguhnya ekonomi itu sendiri sudah ada jauh sebelum Adam Smith mempublisir bukunya. Sejarah telah mencatat, bahwa ekonomi sudah berkembang sejak zaman filsuf Yunani termasuk Aristoteles, yang hidup pada tahun 350 Sebelum Masehi (*Before Chist, BC*). Ilmu Ekonomi Mikro yang kita kenal sekarang dirintis pengembangannya oleh Alfred Marshall di tahun 1870 melalui bukunya yang berjudul *Principles of Economy* (Sudarsono, 1996).

3. Pengertian Sistem Ekonomi

Pengertian system ekonomi diturunkan dari pemahaman yang terbentuk atas definisi dasar ilmu ekonomi.

a. George N. Halm

George N. Halm menyatakan bahwa "*Economic systems differ, socialist or capitalist, planned or unplanned, ccording to' their institutions*". Pendapat ini menekankan kaitan yang erat antara sistem ekonomi dengan lembaga-lembaga yang ada padanya.

b. John F. Due

Pendapat lain yang sejalan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh John F. Due bahwa sebuah sistem ekonomi adalah "*... as the group of economic institutions or, regarded as a unit the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, relative to the need for them are utilized to satisfy the wants of man*".

4. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi

Berbagai unsur pendukung yang dapat memberi warna pada sistem ekonomi sebagaimana dikemukakan juga oleh Van der Valk, seperti dikutip oleh Winardi, bahwa beberapa hal yang dihadapi manusia dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Kebutuhan manusia.
- b. Jumlah, sifat, serta susunan penduduk.
- c. Konstelasi alamiah negara yang bersangkutan.
- d. Jumlah barang-barang modal yang tersedia.
- e. Pengetahuan Teknik
- f. Organisasi yuridis dan sosial masyarakat.

B. CABANG-CABANG DAN PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI

1. Perkembangan Ilmu Ekonomi

Teori ekonomi secara umum dikembangkan ke arah dua jurusan, yakni menuju ke analisa makro dan analisa mikro. Analisa makro membahas perilaku negara, masyarakat atau kelompok masyarakat. Variabel yang dibahas antara lain adalah pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, anggaran pemerintah dan sebagainya. Sedangkan analisa mikro ekonomi membahas tentang perilaku agen ekonomi yang kecil, yaitu konsumen secara individual atau sebuah perusahaan (Sudarsono, 1996).

2. Cabang-cabang Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi memiliki dua cabang utama, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berurusan dengan keputusan yang dibuat oleh unit-unit ekonomi yang kecil (individu), seperti konsumen, pekerja, penanam modal, pemilik sumber daya, ataupun perusahaan dan entitas bisnis lainnya. Selain itu, mikroekonomi juga berurusan dengan interaksi konsumen dan perusahaan untuk membentuk pasar dan industri.

C. PERANAN DAN ANALISIS ILMU EKONOMI MAKRO

1. Peranan Ilmu Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro mengkaji perilaku ekonomi sebagai satu kesatuan yang besar. Satuan-satuan yang digunakan adalah satuan-satuan besar yang bersifat *agregatif* seperti pendapatan nasional, *inflasi*, pengangguran, neraca pembayaran, uang dan sebagainya. Masalah-masalah ekonomi tersebut luas dan hangat. Inti masalah yang serupa hal-hal yang esensial itu merupakan interaksi antara pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan pasar bursa. Jadi dalam teori ekonomi *makro* yang menjadi perhatian adalah pasar komoditi sebagai satu keseluruhan. Hal yang sama dilakukan juga terhadap pasar tenaga kerja (Soelistyo & Insukindro, 1995).

Ilmu ekonomi mikro adalah usaha untuk menganalisis bagaimana harga-harga *output* dan *input* individual ditentukan dan didistribusikan. Ilmu ekonomi makro, lebih menekankan pada aras harga umum dan input *agregat*. Dalam menganalisis aras harga digunakan asumsi-asumsi mengenai harga relatif, yaitu harga relatif konstan, demikian pula dengan distribusi *output* dan pendapatan. Studi ilmu ekonomi *makro* pada umumnya dikaitkan pada *aplikasi* teori *makro* pada kebijakan ekonomi yang relevan, karena itu pengembangan teori ekonomi *makro* sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi yang biasa kita hadapi sehari-hari (Soelistyo & Insukindro, 1995).

2. Analisis Ilmu Ekonomi Makro

Proses analisis masalah yang dihadapi teori ekonomi makro dapat digunakan analisis statik atau analisis dinamik. Analisis statik mengutamakan perhatiannya pada penentuan nilai-nilai keseimbangan variabel-variabel endogin yang digunakan dalam model. Variabel eksogin di dalam model secara simulatif diubah nilainya untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel endogin akan berubah sebagai akibat adanya *stimulus* baru. Nilai-nilai baru yang terjadi setelah perubahan selesai dilakukan merupakan pula nilai-nilai

keseimbangan. Analisis yang mempelajari berubahnya nilai-nilai *variabel endogen* disebut analisis statika-komparatif.

D. SUMBERDAYA ALAM, SUMBERDAYA MANUSIA DAN SUMBER DANA

1. Sumberdaya Alam

a. Peranan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber alam tidak cukup untuk mengadakan perubahan ekonomi, dan juga tidak adanya atau langkanya sumber alam itu sendiri bukan pula merupakan sebab dan halangan untuk mencapai kemajuan-kemajuan ekonomi. Banyak sumberdaya alam yang harus diolah sehingga akan mengurangi sumberdaya alam yang tersedia, khususnya sumberdaya alam yang bersifat sebagai persediaan (*stock resources*). Demikian pula sumberdaya alam yang bersifat aliran atau dapat diperbaharui (*flow* atau *renewable resources*). Walaupun tidak segera habis kalau dipakai terus, tetapi kalau penggunaannya tidak hati-hati maka sumberdaya jenis inipun akan menjadi langka pula. Bila sumberdaya alam menjadi langka, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Generasi pewaris akan menderita dan menyalahkan kepada generasi sebelumnya, karena dunia yang ditempati mereka kehabisan potensi sumber daya alam. (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Sifat-Sifat dan Jenis Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam tidak saja meliputi jumlah bahan-bahan yang ada yang menunggu untuk diolah dan digunakan, tetapi sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Mengenai banyak atau tidaknya nilai sumber daya alam, adalah tergantung pada waktu dan tempat, tingkat teknik dan penemuan-penemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber daya tersebut, perubahan-perubahan dalam selera baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya alam yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*). Ini mencakup udara, energi matahari dan air hujan
- 2) Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, sungai dan sebagainya. Kualitas tanah, hutan, margasatwa.
- 3) Sumber daya alam yang tidak dapat diganti (*irreplaceable atau stock natural resources*). Ini mencakup sumber mineral seperti logam, minyak bumi dan batubara

2. Sumberdaya Manusia

a. Sumberdaya Manusia Sebagai Modal

Suatu produktivitas pekerja sangat tergantung pada kemampuan mereka, jumlah kerja yang mereka bawa ke tempat pemasaran, dan pengembalian ke cadangan modal manusia mereka. Investasi tersebut termasuk pendidikan sekolah formal, letihan di tempat kerja, serta perawatan kesehatan dan gizi. Intensitas usaha juga mempengaruhi ukuran dan sebaliknya dipengaruhi oleh penawaran tenaga kerja.

Pengaturan proses pembentukan modal manusia adalah tantangan bagi para pengambil keputusan. Kebutuhan pendidikan secara tidak langsung dapat dihitung jumlahnya, bergantung pada output dimasa datang dan kemungkinan komposisinya. Negara-negara miskin sering kehilangan sebagian tenaga kerja ahli mereka melalui emigrasi.

Serikat buruh mempengaruhi proses pembangunan, baik melalui peranan ekonomi maupun non-ekonomi yang mereka mainkan. Kemampuan monopoli mereka bahkan tampak lebih terbatas di negara miskin daripada di negara kaya. Penggunaan alat-alat politik untuk mencapai tujuan mereka, lebih nyata. Harapan semula bahwa serikat buruh bisa bertindak atas nama masyarakat secara keseluruhan terbukti tidak terwujud (Sanusi B, 2004; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Pemanfaatan Sumberdaya Manusia (*Human Resources*)

1) Konsep ketenagakerjaan

Proses pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang kita maksud dengan *human resources* disini ialah penduduk sebagai suatu keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (Irawan & M Suparmoko, 1990; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2) Pemanfaatan Tenaga yang Menganggur

Para tenaga kerja yang menganggur merupakan persediaan faktor produksi yang dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain untuk meningkatkan output di negara-negara sedang berkembang. Persediaan tenaga kerja ini jelas lebih banyak terdapat di daerah-daerah yang padat penduduknya. Masalah pemanfaatan tenaga menganggur ini menyangkut baik segi penawaran maupun segi permintaan. Untuk memperluas permintaan akan tenaga kerja seperti halnya dengan kapital.

Pembangunan masyarakat desa mungkin merupakan jalan yang baik, karena hanya diperlukan kapital yang relatif tidak besar. Suatu keuntungan penggunaan tenaga-tenaga yang menganggur secara musiman yakni tidak mengurangi tenaga-tenaga yang diperlukan untuk mengadakan panen maupun penanaman. Industri-industri kecil juga mungkin sekali akan menyerap tenaga-tenaga yang menganggur karena musim atau memang secara kronis (Irawan & M Suparmoko, 1990; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Kualitas tenaga kerja

Sejauh ini kita memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kuantitas atau jumlah saja. Sementara ini kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan yang demikian ini, tidak dapat seluruhnya dianggap benar, karena walaupun jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja itu menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan meningkat pula (Irawan & M Suparmoko, 1990; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3. Sumber Dana

Berikut sumber dana/modal ditinjau dari berbagai aspek.

a. Sumber Modal Fisik/Swadaya Masyarakat

Secara fisik dapat ditempuh dengan realokasi faktor produksi dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang lebih efisien.

b. Sumber Modal Finansial

Secara finansial, sumber dana untuk pembangunan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Tabungan masyarakat (*Voluntary saving*)
- 2) Pajak atau disebut tabungan paksa (*forced saving*)
- 3) Tabungan pemerintah
- 4) Pinjaman pemerintah yang mana dapat dibedakan menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
- 5) Inflasi (*Invisible tax*)
- 6) Investasi asing

E. PASAR DALAM ILMU EKONOMI MAKRO

Keseimbangan pasar yang terjadi sebagai akibat bertemunya permintaan dan penawaran di pasar tersebut adalah keseimbangan parsial. Keseimbangan parsial adalah keseimbangan yang menyangkut hanya satu macam barang saja sedang segala sesuatu yang terjadi di luar pasar itu dianggap konstan.

Pada polus ekstrim yang lain terdapat satu bentuk analisis keseimbangan yang disebut sebagai analisis keseimbangan umum (*general equilibrium analysis*). Dalam analisis ini tidak ada asumsi yang menyangkut tentang variabel konstan. Perubahan nilai satu variabel akan mengakibatkan berubahnya nilai variabel-variabel yang lain. Segala sesuatu tergantung pada segala sesuatu yang lain.

Oleh karena itu pasar yang digunakan dalam ilmu ekonomi makro pun juga terbatas atau dibatasi hanya menjadi empat buah pasar saja. Pasar-pasar itu adalah pasar komoditi (barang), pasar tenaga kerja, pasar uang dan pasar bursa/modal.

1. Pasar Komoditi

Dalam pasar komoditi dianggap hanya ada satu macam komoditi. Semua komoditi yang diperjualbelikan di pasar komoditi dianggap identik dan *homogen*. Komoditi ini berfungsi sebagai barang konsumsi maupun barang modal, sehingga bersama-sama dengan tenaga kerja dapat pula menghasilkan komoditi yang sama pula. Anggapan ini sangat diperlukan agar analisis dilakukan dengan menggunakan banyak macam komoditi, analisis akan berkembang ke arah analisis keseimbangan umum yang rumit dan sukar dilacak.

2. Pasar Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja juga dibuat anggapan mengenai jenis tenaga kerja yang digunakan untuk analisis. Semua tenaga kerja adalah tenaga kerja pembuat komoditi yang dijual di pasar komoditi. Semua itu juga merupakan tenaga kerja yang *homogen*, jadi baik kemauan, kemampuan, keterampilan

maupun sikap semuanya dianggap sama. Tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan untuk *investasi* merupakan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan faktor produksi yang lain dianggap tidak ada. Selain itu tenaga kerja juga dianggap merupakan faktor produksi variabel, sedang periode yang digunakan dalam analisis adalah periode jangka pendek.

3. Pasar Uang

Pengertian uang dalam pasar uang tentu saja bukan uang dalam arti yang kita kenal sehari-hari, Karena pasar yang memperjual-belikan uang seperti tersebut di atas tidak terdapat di manapun juga. Pada pasar barang kita jumpai pembeli barang-barang yang ingin memperoleh barang dengan jalan membayar dengan uang, sehingga penjual barang memperoleh uang. Pasar uang yang lebih menampakan diri sebagai pasar yang “*abstrak*” dalam arti pertemuan antara mereka yang memerlukan uang dan mereka yang mempunyai uang berlebih. Jumlah uang beredar, seperti yang sudah dipelajari pada Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, pada suatu saat pasti dipegang oleh banyak orang. Pada lain pihak kita jumpai adanya permintaan uang yang menurut Keynes timbul karena adanya berbagai-bagai motif. Keseluruhan permintaan uang oleh banyak orang dengan berbagai motif merupakan permintaan uang *agregat*. Penawaran uang dan permintaan uang bertemu dipasar. Pasar itulah yang disebut pasar uang.

4. Pasar Bursa

Pasar bursa yaitu pasar yang merupakan tempat pertemuan antara pembeli surat-surat berharga dengan berbagai-bagai motivasinya dan para penjual surat-surat berharga yang sebagian besar dalam perusahaan-perusahaan yang memerlukan tambahan dana untuk kepentingan perusahaannya. Surat-surat berharga selalu mempunyai dua macam harga, yaitu harga nominal dan harga pasar bebas. Harga nominal sebuah surat berharga adalah nilai surat berharga itu seperti tertulis pada surat berharga itu sendiri, sedang harga pasar adalah nilai

surat berharga sesuai kesepakatan penjual dan pembeli di pasar pada waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ediyono SH dkk., (2003); Prinsip-prinsip Lingkungan Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. CV Idayus, LPKLP Usakti, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Hamid ES, (2006); Perekonomian Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Isalamy I, (1994); Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kasnawi MT, S Hasan, S Nur, (2000); Perubahan Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Larasati E, Herniwati & Subardi (1986); Keuangan Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsey RG *et all* ., (1990); *Economics*, George Weidenfeld and Nicolson Ltd. Diterjemahkan oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko, dengan judul: Pengantar Mikroekonomi, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mansoer FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samuelson PA, (1985); Economics, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sanusi B (2004); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- SastroAtmodjo, S (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo, S (2021); Teori Ekonomi Mikro. Media Sain Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, S., dkk. (2022); Perekonomian Indonesia. Eureka Aksara Mandiri, Purbalingga
- SastroAtmodjo, S (Ed) (2022); Pengantar Ilmu Ekonomi. Eureka Aksara Mandiri, Purbalingga.

Profil Penulis**Sunarno Sastro Atmodjo**

Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambi Sambirejo Sragen, SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta, Sarjana Muda (Bacalreat II) Geologi UP Yogyakarta, Diploma BPA UGM Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacalreat) Biologi UGM, Sarjana Biologi UGM Yogyakarta, Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta, Magister Biologi FMIPA UI Depok, Program Doktor PKLH UNJ

Jakarta, Sarjana Adminstrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta, Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta, Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta, *Magister of Science in Geografi_UIPM Malaysia*. Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta, *Doctor of Philosohy in Ecology_UIPM Malaysia*, *Magister of Management_UIPM Malaysia*, Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta, Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta, *Honorary Doctorate in Tourism Resources_UIPM*, *Doctor of Science by Outcome Basic Education in Remediation and Preservation of Cultural Heritage Objects_UIPM Malaysia*. *Professor in Conservation of Cultural Heritage Objects _UIPM Malaysia*, Sarjana Hukum FHSIP UT Jakarta.

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Litbang Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah menjadi narasumber dalam +40 seminar/lokakarya/workshop/diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam + 40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada tiga tahun terakhir, telah menulis 40-an buku di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara, Sosiologi, Hukum, Teknik Kimia Industri, Biologi, Geografi, PPKn, Mata Kuliah Dasar Umum, Pariwisata, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, Teknik Kimia Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, Sains dan Teknologi, serta beberapa lainnya.

Mengajar +40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, MICE, Geografi, Sejarah, PPKN, di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketua Umum IPJERI, serta Ketua Umum IDGRI.

Pada tahun-tahun terakhir, menjadi editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar, Eurika Media Aksara Purbalingga, Letrasi Nusantara Malang, Penerbit Mitra Ilmu Makassar, Widya Sari Salatiga, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Solok, YPISM Banten, PT. Masagena Mandiri Medika Makassar, Get Press dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi, Komunikasi, Hukum,

Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil diterbitkan pada tiga tahun terakhir berjumlah lebih dari 60 buah.

Alamat:

1. Kompleks Pejuang Pratama, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi.
2. Kompleks Puri Harapan, Setia Asih, Tarumajaya, Kab Bekasi.
3. Bumijo Tengah, Jetis, Kota Yogyakarta.
4. Sambi 173, Sambi, Sambirejo, Sragen.



BAB II
PELAKU DAN PASAR
EKONOMI MAKRO

**Slamet Suprihanto, S.E., M.Ak., M.M., C.A.P.,
C.A.A.T., C.T.T., C.P.F.R.A.**

Bab ini secara khusus memberikan pemahaman terkait interaksi dalam ekonomi makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi dalam skala besar, melibatkan seluruh negara, wilayah, atau bahkan dunia. Dalam kerangka ekonomi makro, terdapat berbagai pelaku dan pasar yang saling berinteraksi dan berperan penting dalam menentukan arah dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi peran pelaku dan pasar dalam ekonomi makro serta pentingnya pemahaman tentang interaksi mereka.

A. PENGERTIAN EKONOMI MAKRO

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau harta, seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan apa itu makro merujuk pada jumlah atau ukuran yang besar. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa makro ekonomi adalah bahasan ilmu ekonomi berskala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga masih berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisien agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

Menurut bapak ekonomi dunia, Adam Smith, makro ekonomi adalah sebuah upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa, biasanya guna mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Sementara itu, menurut Budiono penulis buku Ekonomi Makro, apa itu ekonomi makro merujuk pada cabang ilmu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ekonomi makro adalah studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga ini sering dipakai sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, hingga keseimbangan neraca negara.

1. Pelaku Ekonomi Makro

Pelaku ekonomi makro adalah kelompok atau entitas yang berperan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala makro. Berikut adalah beberapa pelaku ekonomi makro yang signifikan:

a. Rumah Tangga:

Rumah tangga atau konsumen juga merupakan pelaku penting dalam ekonomi makro. Tingkat konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh langsung terhadap permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar. Pola belanja, tabungan, dan perilaku konsumsi rumah tangga secara kolektif membentuk gaya hidup konsumen dan pengaruhnya terhadap perekonomian.

b. Pemerintah:

Pemerintah memiliki peran kunci dalam ekonomi makro. Mereka mengatur kebijakan fiskal dan moneter, mengawasi regulasi ekonomi, dan bertanggung jawab atas pengeluaran publik, pajak, subsidi, dan program kebijakan lainnya. Pemerintah juga berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

c. Bank Sentral:

Bank sentral merupakan institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Tugas utama bank sentral adalah mengendalikan pasokan uang, menetapkan suku bunga, mengelola cadangan devisa, dan menjaga stabilitas mata uang. Bank sentral juga berperan dalam memonitor dan mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

d. Perusahaan dan Industri:

Sektor korporat atau perusahaan juga merupakan pelaku ekonomi makro. Aktivitas perusahaan, termasuk produksi, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan keputusan strategis lainnya, memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perusahaan juga berkontribusi

terhadap pendapatan nasional, ekspor-impor, dan pembangunan sektor industri.

e. Lembaga Keuangan:

Lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam mengalokasikan dana, memberikan pinjaman, memfasilitasi investasi, dan menyediakan layanan keuangan. Lembaga keuangan membantu memobilisasi tabungan dan memperlancar arus modal di dalam ekonomi.

f. Pasar Keuangan:

Pasar keuangan termasuk bursa saham, pasar obligasi, dan pasar mata uang asing merupakan tempat di mana instrumen keuangan diperdagangkan. Pelaku di pasar keuangan termasuk investor individu, institusi keuangan, dan pedagang yang mempengaruhi harga aset, likuiditas, dan aliran modal dalam perekonomian.

g. Mitra Perdagangan Internasional:

Dalam ekonomi global, pelaku perdagangan internasional memiliki dampak penting pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara melakukan ekspor dan impor barang dan jasa, membentuk aliran perdagangan yang mempengaruhi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Pasar Ekonomi Makro

Pasar ekonomi makro mengacu pada hubungan antara penawaran dan permintaan agregat di tingkat ekonomi nasional atau global. Ini melibatkan semua barang, jasa, faktor produksi, dan keuangan yang diperdagangkan dalam skala makro. Beberapa contoh pasar ekonomi makro yang penting meliputi:

a. Pasar Barang dan Jasa:

Pasar barang dan jasa melibatkan perdagangan produk-produk fisik dan layanan di tingkat nasional atau global. Ini mencakup semua sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur hingga sektor jasa seperti

transportasi, perbankan, dan pariwisata. Pasar ini mencerminkan permintaan dan penawaran agregat dari konsumen, perusahaan, dan pemerintah.

b. Pasar Tenaga Kerja:

Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana tenaga kerja diperdagangkan antara pengusaha dan pekerja. Ini mencakup segala bentuk pekerjaan dan aktivitas yang melibatkan tenaga kerja manusia. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan yang mempekerjakan pekerja, sementara penawaran tenaga kerja berasal dari individu yang mencari pekerjaan.

c. Pasar Keuangan:

Pasar keuangan melibatkan perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, dan derivatif. Ini mencakup bursa saham, pasar obligasi, pasar valuta asing (forex), dan pasar derivatif seperti pasar berjangka dan opsi. Aktivitas di pasar keuangan mempengaruhi harga aset, suku bunga, dan arus modal dalam perekonomian.

d. Pasar Valuta Asing:

Pasar valuta asing adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Perdagangan valuta asing melibatkan pertukaran mata uang untuk tujuan perdagangan internasional, investasi, spekulasi, atau kegiatan bisnis lainnya. Pasar ini mempengaruhi nilai tukar mata uang dan aliran modal antara negara.

e. Pasar Komoditas:

Pasar komoditas melibatkan perdagangan berbagai jenis komoditas seperti minyak, gas alam, logam, pertanian, dan produk energi lainnya. Pasar ini mencerminkan penawaran dan permintaan agregat untuk komoditas di tingkat global. Harga komoditas yang ditentukan di pasar ini dapat mempengaruhi inflasi, biaya produksi, dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

f. Pasar Modal:

Pasar modal melibatkan perdagangan sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi. Ini adalah tempat di mana perusahaan atau pemerintah mengumpulkan dana melalui penawaran saham atau obligasi kepada investor. Pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan perusahaan.

Pasar ekonomi makro merupakan jaringan yang kompleks dari berbagai pasar yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Pergerakan harga, permintaan, dan penawaran di pasar-pasar ini berdampak pada kondisi ekonom

3. Pelaku dan Pasar Ekonomi Makro

Pelaku ekonomi makro adalah entitas atau kelompok yang berperan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala makro. Mereka terlibat dalam berbagai pasar ekonomi makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa pelaku ekonomi makro dan pasar yang terkait:

1. Pemerintah:
 - Pasar fiskal: Pemerintah sebagai pelaku mempengaruhi ekonomi melalui pengeluaran publik, penerimaan pajak, subsidi, dan transfer sosial.
 - Pasar moneter: Pemerintah, melalui kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral, mempengaruhi suku bunga, pasokan uang, dan stabilitas mata uang.
2. Bank Sentral:
 - Pasar uang: Bank sentral mempengaruhi pasokan uang melalui kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka.
 - Pasar valuta asing: Bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara melalui intervensi di pasar valuta asing.
3. Perusahaan dan Industri:

- Pasar barang dan jasa: Perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa kepada konsumen.
 - Pasar tenaga kerja: Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa.
4. Rumah Tangga:
- Pasar konsumen: Rumah tangga sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan.
 - Pasar tenaga kerja: Rumah tangga menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan.
5. Lembaga Keuangan:
- Pasar keuangan: Lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengalokasikan dana, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan.
6. Investor:
- Pasar modal: Investor membeli dan menjual saham dan obligasi di pasar modal untuk tujuan investasi atau spekulasi.
7. Pelaku perdagangan internasional:
- Pasar ekspor-impor: Pelaku perdagangan internasional membeli dan menjual barang dan jasa melintasi batas negara.
8. Konsumen asing:
- Pasar turis: Konsumen asing berpartisipasi dalam pasar turis dengan menghabiskan uang di negara yang dikunjungi.
9. Pemasok dan distributor:
- Pasar bahan baku: Pemasok menyediakan bahan baku kepada perusahaan untuk produksi barang dan jasa.
 - Pasar distributor: Distributor memainkan peran penting dalam distribusi barang dari produsen ke konsumen.

Penting untuk diingat bahwa pelaku ekonomi makro dan pasar yang terkait dapat saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam sistem ekonomi yang kompleks.

B. BENTUK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Seperti yang disebutkan tadi, praktik ekonomi makro dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Beberapa kebijakan dalam ekonomi makro adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan pertama dari ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara.

Kebijakan moneter mencakup tentang langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, mulai dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat hingga mengubah tingkat bunga pada periode tersebut. Singkatnya, kebijakan moneter ditujukan untuk mengukur banyaknya dana yang dikeluarkan bank sentral di suatu negara. Sebab, perputaran uang dalam bank sentral berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat inflasi. Oleh sebab itu, peran kebijakan moneter dalam ekonomi makro adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara.

2. Kebijakan Fiskal

Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalannya perekonomian suatu negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi makro adalah guna mempengaruhi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan terakhir dalam ekonomi makro adalah kebijakan segi penawaran yang lebih menekankan pada keseimbangan neraca keuangan negara atau perusahaan. Kebijakan segi penawaran juga digunakan dalam peningkatan efisiensi kegiatan produksi suatu usaha dan gairah untuk bekerja dengan cara

mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Umumnya, pemerintah melaksanakan kebijakan ini melalui pemberian insentif pada perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi, menggunakan teknologi terbaru, dan melakukan pengembangan kualitas produknya.

C. RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO

Dalam penerapannya, ada tiga ruang lingkup utama ekonomi makro, di antaranya:

1. Kebijakan Pemerintah

Dari ketiga kebijakan pemerintah yang telah disebutkan tadi merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan inflasi, pengangguran, atau persoalan ekonomi makro lainnya.

2. Menentukan Perekonomian Negara

Ruang lingkup kedua yang dijelaskan dalam ekonomi makro adalah kemampuan produksi produk ataupun jasa dari suatu negara. Rincian pembahasannya yaitu mulai dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta ekspor dan impor.

3. Pengeluaran Agregat atau Menyeluruh

Ruang lingkup terakhir yang dibahas dalam ekonomi makro adalah tingkat pengeluaran agregat atau secara menyeluruh. Jika tingkat pengeluaran agregat tidak ideal, maka akan muncul masalah perekonomian lainnya.

D. TUJUAN EKONOMI MAKRO

Selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dari kebijakan makro ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pertama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis. Sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang.

2. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dalam kegiatan produksi suatu negara. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita negara tersebut.

3. Menstabilkan Keadaan Perekonomian

Selanjutnya, tujuan ekonomi makro adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Dapat dikatakan stabil adalah ketika ekonomi suatu negara bisa mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang. Kestabilan ekonomi ini penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi negara di mata pelaku ekonomi dari negara lainnya.

4. Meratakan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang merata bisa dikatakan sebagai impian semua negara, sebab ketika distribusi pendapatan ini merata, maka kemakmuran masyarakat juga akan tercapai.

5. Mengembangkan Kapasitas Produksi Nasional

Dengan mengembangkan kapasitas produksi, negara juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonominya.

6. Membuat Neraca Pembayaran Seimbang

Tujuan selanjutnya dari analisis ekonomi makro adalah membuat neraca pembayaran luar negeri seimbang agar tidak terjadi defisit, serta meningkatkan devisa negara lewat peningkatan kegiatan ekspor.

7. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Peningkatan produktivitas nasional tidak hanya berpengaruh pada kapasitas produksi, namun juga membuka peluang kesempatan kerja yang lebih tinggi.

8. Mengendalikan Inflasi

Tujuan terakhir dari analisis ekonomi makro adalah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan menekan harga yang berlaku seminimal mungkin lewat beberapa kebijakan, seperti *cash ratio* politik pasar terbuka, hingga politik diskonto.

E. PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

Dilakukannya ekonomi makro ternyata juga membawa dampak pada iklim bisnis suatu negara dan sering dikaitkan erat dengan persoalan keuangan negara tersebut. Ada juga beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Pertama adalah permasalahan perbankan dan kredit terkendala atau macet. Permasalahan kedua yaitu terjadinya krisis nilai tukar uang di dalam dan luar negeri. Terakhir, permasalahan pada konteks bisnis terkait pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam bidang ekonomi makro. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan utama:

1. **Inflasi:**

Inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat menjadi permasalahan serius dalam ekonomi makro. Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, merugikan tabungan, dan mengurangi nilai tukar mata uang.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

2. Pengangguran:

Tingkat pengangguran yang tinggi adalah permasalahan serius dalam ekonomi makro. Pengangguran berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran jangka panjang juga dapat menyebabkan penurunan keterampilan tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi.

3. Ketimpangan Pendapatan:

Ketimpangan pendapatan yang tinggi antara kelompok masyarakat dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang berlebihan dapat menghambat mobilitas sosial, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperburuk kesenjangan ekonomi.

4. Defisit Anggaran dan Utang Publik:

Ketika pemerintah menghadapi defisit anggaran yang berkelanjutan dan utang publik yang tinggi, hal ini dapat menimbulkan masalah ekonomi makro. Defisit anggaran dapat menyebabkan inflasi, peningkatan suku bunga, dan ketidakstabilan ekonomi. Utang publik yang tinggi juga dapat membebani generasi mendatang dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah.

5. Krisis Keuangan dan Ketidakstabilan Pasar:

Krisis keuangan, seperti krisis perbankan atau kegagalan pasar modal, dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan memicu resesi. Ketidakstabilan pasar finansial juga dapat menyebar ke sektor riil, mempengaruhi investasi, konsumsi, dan produksi secara keseluruhan.

6. **Perubahan Harga Komoditas:**

Fluktuasi harga komoditas, seperti minyak atau bahan pangan, dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi makro. Kenaikan harga komoditas dapat meningkatkan biaya produksi, mendorong inflasi, dan mempengaruhi daya beli konsumen. Hal ini juga dapat mempengaruhi perekonomian negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu.

7. **Ketidakstabilan Mata Uang:**

Ketidakstabilan mata uang, terutama depresiasi yang tiba-tiba, dapat mempengaruhi perdagangan internasional, inflasi, dan investasi. Perubahan nilai tukar yang tajam dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor.

Mengatasi permasalahan ekonomi makro ini memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, reformasi struktural, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta promosi inklusi ekonomi. Koordinasi antara pemerintah, bank sentral, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro secara efektif.

F. PERAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengelola perekonomian suatu negara atau wilayah dalam skala besar. Berikut adalah beberapa peranan utama ekonomi makro:

1. **Mengukur Pertumbuhan Ekonomi:**

Salah satu peran utama ekonomi makro adalah mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan pengukuran produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional sebagai indikator utama untuk melacak perubahan dalam output ekonomi dari waktu ke waktu. Data ini

membantu dalam menilai kinerja ekonomi dan mengidentifikasi tren jangka panjang.

2. Menganalisis dan Meramalkan Siklus Bisnis:

Ekonomi makro juga berperan dalam menganalisis dan meramalkan siklus bisnis. Siklus bisnis merujuk pada fluktuasi reguler dalam kegiatan ekonomi antara periode ekspansi dan kontraksi. Dengan memahami siklus bisnis, ekonom dapat memberikan pandangan tentang kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.

3. Mengelola Inflasi:

Salah satu peran penting ekonomi makro adalah mengelola inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Bank sentral berperan dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga dan mengatur pasokan uang. Stabilitas harga sangat penting karena inflasi yang tinggi dapat mengganggu daya beli, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

4. Mengelola Tingkat Pengangguran:

Ekonomi makro juga berperan dalam mengelola tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan tindakan ekonomi lainnya sering kali diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja.

5. Mengelola Neraca Pembayaran:

Ekonomi makro juga terlibat dalam mengelola neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara lain, termasuk perdagangan barang, jasa, investasi, dan

transfer uang. Mengelola neraca pembayaran yang seimbang dan berkelanjutan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga hubungan ekonomi internasional yang sehat.

6. Merancang Kebijakan Ekonomi:

Ekonomi makro memberikan dasar untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Pemerintah menggunakan kerangka kerja ekonomi makro untuk mengembangkan kebijakan fiskal (terkait pengeluaran dan pendapatan pemerintah) dan kebijakan moneter (terkait suku bunga, uang, dan kredit). Tujuan kebijakan ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan pemerataan ekonomi.

7. Memahami Faktor-faktor Ekonomi Global:

Ekonomi makro membantu memahami faktor-faktor ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Perkembangan di pasar global, perubahan harga komoditas, kebijakan perdagangan internasional, dan kerjasama ekonomi antarnegara merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis dan merencanakan kebijakan ekonomi. Dalam rangka menjaga keseimbangan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, pemahaman yang baik tentang ekonomi makro dan peranannya sangat penting. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan ekonomi, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun individu, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam mengelola perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

G. INTERAKSI PELAKU DAN PASAR DALAM EKONOMI MAKRO

Interaksi antara pelaku ekonomi dan pasar menjadi dasar dari pertumbuhan ekonomi dalam skala makro. Permintaan agregat, yang merupakan jumlah total barang dan jasa yang diminta oleh konsumen,

perusahaan, dan pemerintah, ditentukan oleh interaksi antara rumah tangga, perusahaan, dan pasar barang. Di sisi penawaran, perusahaan dan pasar tenaga kerja berinteraksi untuk menentukan output ekonomi dan tingkat pengangguran.

Pemerintah juga berperan dalam mengatur interaksi antara pelaku dan pasar melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, seperti perubahan dalam pajak dan pengeluaran publik, dapat mempengaruhi permintaan agregat. Sementara itu, kebijakan moneter, seperti tingkat suku bunga dan pengendalian pasokan uang, dapat mempengaruhi suku bunga, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, lembaga keuangan dan lembaga internasional juga berperan dalam menyediakan sumber daya keuangan dan stabilitas ekonomi global. Lembaga keuangan memfasilitasi aliran dana dan memberikan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga internasional, di sisi lain, membantu negara-negara dalam mengatasi tantangan ekonomi dan mempromosikan kerjasama internasional.

Pemahaman yang baik tentang interaksi antara pelaku dan pasar dalam ekonomi makro penting bagi para pengambil keputusan ekonomi, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun individu. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mereka dapat mengadopsi strategi yang tepat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics*. Pearson.
- Mankiw, N. G. (2018). *Macroeconomics*. Cengage Learning.
- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (2018). *Economics*. Pearson.
- Krugman, P., & Wells, R. (2019). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Romer, D. (2018). *Advanced Macroeconomics*. McGraw-Hill Education.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd ed.). MIT Press.

Blanchard, O., & Fischer, S. (1989). Lectures on Macroeconomics. MIT Press.

Bernanke, B. S., Olekalns, N., & Frank, R. H. (2017). Principles of Macroeconomics. McGraw-Hill Education.

Taylor, J. B., & Weerapana, A. (2018). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning.

Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/27/apa-itu-ekonomi-makro>

<https://www.gramedia.com/literasi/pelaku-ekonomi/>

Profil Penulis

Slamet Suprihanto




Lahir di Ngawi, 21 April 1967

Pendidikan Formal SDN Kawi I Lulus tahun 1980, SMPK St. Thomas Ngawi Lulus tahun 1983, SMEA Kosgoro Ngawi Lulus tahun 1986, Universitas Gajayana Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Lulus tahun 1992, STIE IGI Jakarta, Konsentrasi Magister Manajemen Pendidikan, Lulus tahun 2008, STIE Swadaya Magister Akuntansi Lulus tahun 2017, UNIVERSITAS TRISAKTI, Program

Doktor Ilmu Ekonomi, Masuk Tahun 2023, Konsentrasi Akuntansi.

Pengalaman Bekerja Tahun 1993 – 1994 Akuntansi Keuangan dan Pajak di CV. Jaya Raya Mojokerto; Tahun 1994 di Bhineka Consultan Group Surabaya; Tahun 1994 – 2006 Akuntansi Keuangan dan Pajak di PT. Pembina Hyose Industry Jakarta; Tahun 2002 – 2015 Guru Akuntansi di SMK Al Hadiid 2 Cileungsi; Tahun 2006 – 2010 Dosen di STAI Nida El Adabi Parung Panjang Tahun 2007 – sampai sekarang Guru Akuntansi di SMK Global Surya Mandiri Kota Bekasi; Tahun 2008 – 2018 Dosen di STIE Nasional Indonesia Jakarta; Tahun 2017 – sampai dengan sekarang Dosen Tetap di STIE Tribuana Kota Bekasi; Tahun 2017 – sampai dengan sekarang Assesor di LSP Teknisi Akuntansi Jakarta.

A close-up photograph of a pile of US dollar bills. The bills are scattered and overlapping, with a \$20 bill being the most prominent in the foreground. The text 'BAB III UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN' is overlaid in yellow on the image.

BAB III UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN

Muhammad Rafi'i Sanjani, SEL.,M.E

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN UANG

Dari sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok asset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya, kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi. Namun, tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Kita pernah mendengar pada zaman dahulu ada uang logam yang terbuat dari emas. Uang dinar (emas) di Timur Tengah pada masa lampau merupakan uang yang tinggi nilainya. Di zaman modern ini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain.

1. Uang Flat (*Fiat Money atau Token Money*)

Uang fiat (*fiat money atau token money*) adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominal uang itu jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri (nilai intrinsik atau *intrinsic value*-nya). Contoh paling mudah adalah uang kertas Rp100.000,00 yang anda terima. Nilai nominal uang kertas tersebut adalah jauh lebih tinggi dari nilai kertasnya. Namun, mengapa masyarakat menerima bahwa selembar kertas yang nilainya tidak seberapa tersebut dapat digunakan untuk berbelanja senilai Rp100.000,00? Karena, pemerintah telah menetapkannya berdasarkan keputusan resmi, sehingga masyarakat menjadi percaya.

2. Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditas (*commodity money*) adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya, pada masa lalu nilai sekeping uang perunggu adalah lebih kecil dari nilai satu keeping uang perak, tetapi satu

keeping uang perak nilainya lebih kecil dari nilai satu keeping uang emas, sebab nilai perunggu lebih murah dari perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari emas.

3. Uang Hampir *Likuid Sempurna* (*Near Money*)

Salah satu syarat suatu asset untuk dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat dan uang komoditas adalah uang yang likuid sempurna, sehingga untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu.

Selain kedua jenis uang tersebut ada juga asset finansial yang berfungsi sebagai uang, tetapi untuk menggunakannya harus ditukarkan/dicairkan terlebih dahulu. Misalnya, uang dalam bentuk cek (*demand deposit*) dapat diterima sebagai alat pembayaran. Namun, tidak semua pelaku kegiatan ekonomi mau menerimanya. Bukan karena tidak percaya, tetapi bila ingin digunakan harus ditukarkan ke dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Karena itu, walaupun dapat digunakan sebagai uang, cek bukanlah substitusi sempurna bagi uang kertas atau logam.

B. FUNGSI UANG

Uang memiliki empat fungsi penting yaitu sebagai satuan hitung (*unit of account*), alat transaksi/pembayaran (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran dimasa mendatang (*standard of deferred payment*).

1. Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Sebagai satuan hitung (*unit of account*), uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi. Misalnya jika harga sepotong celana *jeans* adalah Rp200.000,00 dan sepasang sepatu kulit yang bergaya *trendy* adalah Rp250.000,00 maka bila

ahmad ingin membeli keduanya, dia harus menyiapkan uang sebesar Rp450.000,00. Seandainya, ahmad memiliki lima ekor ayam yang harga seekornya adalah Rp100.000,00 dia tidak perlu membawa dua ekor ayam ke toko celana dan dua setengah ekor ke toko sepatu. Ahmad dapat menjual kelima ayamnya sehingga memperoleh Rp500.000,00 kemudian Rp200.000,00 dipakai untuk membeli celana *jeans*, Rp250.000,00 untuk membeli sepatu dan sisanya Rp50.000,00 digunakan untuk membeli barang yang lain.

2. Alat Transaksi (*Medium of Exchange*)

Uang juga berfungsi sebagai alat transaksi (*medium of exchange*). Telah dikatakan, untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

3. Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Misalnya, malik adalah peternak ayam. Bulan lalu, malik menjual 1.000 ekor ayamnya dengan nilai Rp40 juta. Karena uang memiliki fungsi penyimpan nilai, malik dapat menyimpan uang hasil penjualan ayamnya untuk digunakan dimasa yang akan datang.

4. Standar Pembayaran di Masa Mendatang (*Standard of Deferred Payment*)

Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Para karyawan umumnya mendapatkan gaji setelah bekerja sebulan

peny. Contoh lain adalah transaksi utang-piutang yang mungkin baru dapat diselesaikan tuntas dalam beberapa tahun mendatang. Pembayaran untuk masa mendatang tersebut dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*). Dengan fungsi tersebut berapa jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*) dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

C. LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah Lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan asset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana).

Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka Lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sektor-sektor kegiatan yang membutuhkan. Tanpa adanya lembaga keuangan, tidak mungkin mengharapkan alokasi sumber daya keuangan yang efisien, karena pasar uang modal tidak dapat bekerja efisien. Dari penjelasan di atas, lembaga keuangan mempunyai fungsi dan peranan penting untuk meningkatkan efisiensi pasar uang modal. Lewat upaya lembaga-lembaga keuangan, kekuatan penawaran dan permintaan uang dipertemukan.

Pertukaran atau pengalihan di pasar uang modal adalah hak penggunaan uang. Penawaran uang modal berasal dari individu dan atau institusi yang bersedia menunda penggunaan uangnya. Misalnya, anda menerima gaji sebesar Rp4 juta per bulan. Dari sejumlah itu yang digunakan untuk kebutuhan hidup sampai mendapat gaji bulan berikutnya adalah Rp2,5 juta. Sisanya sebesar Rp1,5 juta sebenarnya dapat anda habiskan sekehendak hati. Pada saat berbelanja, anda menggunakan hak penggunaan uang. Jika tidak digunakan

untuk konsumsi, anda dapat mengalihkannya ke pihak lain untuk sementara waktu, misalnya dalam bentuk tabungan berjangka atau saham. Untuk kesediaan mengalihkan hak penggunaan uang tersebut, anda memperoleh kompensasi berupa pendapatan bunga untuk tabungan atau deviden untuk saham. Jika pengalihan hak penggunaan uang tersebut kurang dari satu tahun, masuk dalam kategori pasar uang, tetapi jika lebih dari setahun, masuk kategori pasar modal.

Uang yang anda simpan akan disalurkan oleh lembaga keuangan ke pihak-pihak yang membutuhkan (sisi permintaan), seperti perusahaan, pemerintah dan individu. Mereka menggunakannya untuk kegiatan investasi, produksi atau konsumsi. Bila mereka membutuhkan uang tersebut dalam tempo kurang dari setahun, mereka mencarinya di pasar uang. Bila lebih dari setahun, mereka mencarinya di pasar modal.

Maka yang menjembatani antara sisi penawaran dan permintaan inilah yang disebut sebagai **lembaga keuangan**. Motivasi usaha mereka adalah untuk memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari pemilik dengan pendapatan yang diperoleh dari para pengguna dana. Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*). Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan, sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan nondepositori (*nondepository financial institution*) yang disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

D. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN (*BANKING FINANCIAL INSTITUTION*)

Berdasarkan undang-undang nomor 7/1992 (sebagaimana diubah dengan UU nomor 10/1998) tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sebagai Lembaga intermediasi dalam hal pendanaan, hingga saat ini, bank pun memiliki peran yang penting sebagai jangkar (*anchor*) dari system keuangan Indonesia.

1. Peran Penting Bank

Di samping peran penting bank dalam system keuangan, peran bank juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank. Terdapat tiga peran penting bank terkait dengan hal tersebut :

- a. Lembaga kepercayaan (*agent of trust*): sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tentunya bank harus dapat memegang dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
- b. Agen pembangunan negara (*agent of development*): selain bertugas sebagai Lembaga intermediasi dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, beberapa bank, khususnya bank milik pemerintah juga mengemban misi khusus dalam mendukung kelancaran program pembangunan strategis. Hal ini dapat mencakup pemberian kredit kepada petani untuk menjaga ketahanan pangan, pemberian kredit ke sektor industry strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan usaha kecil.
- c. Pemberi layanan (*agent of services*): bank bertugas memberikan jasa/layanan sesuai dengan fungsi bank pada umumnya.

2. Klasifikasi Bank

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 10/1998, bank diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- 5) Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah :

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang;
- 2) Melakukan usaha perasuransian; dan
- 3) Melakukan usaha lain seperti yang diatur undang-undang.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil; dan
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR diantaranya adalah:

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro;
- 2) Melakukan penyertaan modal;
- 3) Melakukan usaha perasuransian; dan
- 4) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha tersebut diatas.

Seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia pun telah berkembang berbagai produk dan Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah. Beberapa diantaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah dan p.asar modal syariah. Dalam hal perbankan, perubahan ini kemudian di atur dalam UU No.21/2008 (UU mengenai bank syariah). Secara garis besar, bank dapat digolongkan menjadi dua kelompok berdasarkan sistem operasionalnya yaitu bank konvensional (bank umum dan BPR) dan bank Syariah.

c. Bank Syariah

Dalam UU No.21/2008, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, seperti (1) keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), (2) kemaslahatan (*maslahah*), (3) universalisme (*alamiyah*) dan tidak mengandung riba, *gharar*, *masyir*, *zalim* dan objek lain yang haram. Bank syariah juga memiliki tugas untuk menjalankan fungsi sosial yaitu untuk menerima dana sedekah, berperan sebagai lembaga *Baitul maal* dan menyalurkan dana sosial tersebut kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Seperti bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Akan tetapi, dalam proses peluncuran produk baru, bank syariah harus memperoleh fatwa kesesuaian produk dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN, bagian dari Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, berdasarkan strukturnya, bank syariah dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Bank Umum Syariah : bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Unit Usaha Syariah : bank yang bertugas menjalankan usaha dengan prinsip syariah dan merupakan unit usaha dari bank konvensional, ataupun unit usaha dari bank induk (dengan sistem konvensional) yang memiliki kedudukan diluar negeri.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (seperti BPR).

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
❖ Penentuan bunga dibuat saat transaksi, dengan asumsi usaha akan selalu mencapai keuntungan.	❖ Penentuan besarnya rasio bagi hasil ditentukan saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
❖ Besarnya persentase bunga didasarkan pada modal atau dana yang dipinjamkan.	❖ Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
❖ Bunga dapat bersifat fleksibel, berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga acuan ataupun kondisi ekonomi.	❖ Rasio bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali terdapat kesepakatan bersama untuk mengubahnya.
❖ Pembayaran bunga tetap seperti yang telah dijanjikan, tanpa mempertimbangkan untung rugi dari usaha peminjam.	❖ Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha rugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.
❖ Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun keuntungan usaha berlipat ganda.	❖ Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
❖ Eksistensi bunga diragukan (kalua tidak dikecam) oleh semua agama.	❖ Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Satu hal penting yang sangat membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah dalam hal penggunaan sistem bunga dan bagi hasil. Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa

perbedaan mendasar mengenai bunga dan bagi hasil dapat dirangkum dalam tabel diatas.

Produk-produk bank syariah dapat dikategorikan berdasarkan akad atau ikatan/kesepakatan atau transaksi yang menerapkan dengan nilai-nilai syariah. Secara umum, terdapat enam pola akad dan produk bank syariah, yaitu sebagai berikut :

1) Pola Titipan

Pola akad ini menganut prinsip bahwa asset titipan nasabah harus dijaga dan pada akhirnya dikembalikan kepada nasabah. Terdapat 2 produk dengan pola akad ini, yaitu :

- a) *Wadi'ah yad amanah* : bank bertugas untuk menjaga aset yang dititipkan nasabah, namun bank tidak berhak memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin nasabah. Bank boleh menerima biaya penitipan aset tersebut. Bentuk layanan ini mirip dengan *safe deposit box*.
- b) *Wadi'ah yad dhamanah* : bank bertugas untuk menerima titipan aset nasabah dan dapat memanfaatkan aset tersebut dengan seizin nasabah, serta harus dapat mengembalikan aset tersebut secara utuh. Atas izin penggunaan aset ini, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah tanpa harus membuat akad terlebih dahulu.

2) Pola Pinjaman

Pola akad ini mengatur tentang produk pinjaman, dimana bank dapat meminjamkan hartanya kepada nasabah yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya, ataupun mengambil manfaat tanpa harus mengembalikannya. Terdapat dua produk bank syariah dengan prinsip ini:

- a) *Qardh*: pinjaman lunak tanpa imbalan atau kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman.
- b) *Qardhul Hasan*: pinjaman yang ditujukan untuk membantu unit usaha kecil/mikro atau aktivitas sosial tanpa keharusan untuk mengembalikannya.

3) Pola Bagi hasil

Pola bagi hasil ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Mudharabah*: satu pihak akan berperan sebagai pemberi modal (*shahibul maal/rabbul maal*), sedangkan pihak kedua akan menjadi pengelola usaha (*mudharib*), kemudian keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati. Akad ini dapat digolongkan menjadi dua, berdasarkan kewenangan pemilik dana untuk menentukan penggunaan dana: *Mutlaqah* – dimana pengelola dapat menentukan sendiri penggunaan dananya, dan *Muqayyadah* – dimana pemilik dana yang berhak menentukan penggunaan dana.
- b) *Musyarakah*: bank dan nasabah bekerja sama sebagai mitra usaha dan melakukan pembagian keuntungan usaha sesuai dengan rasio yang telah ditentukan.
- c) *Mutanaqisah*: bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli sebuah barang, kemudian salah satu pihak akan membeli bagian pihak lain secara bertahap melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.

4) Pola Jual Beli

Terdapat tiga akad bank Syariah dengan pola ini:

- a) *Murabahah*: nasabah dapat meminta bank untuk membelikan barang tertentu bagi nasabah, kemudian nasabah akan memberikan margin tertentu kepada bank atas jasanya.
- b) *Salam*: merupakan akad pembelian barang dengan ciri-ciri khusus/spesifik yang biasanya dilakukan dengan cara pesanan dan pembayaran diterima dimuka secara tunai. Biasanya akad ini digunakan untuk pembelian produk pertanian.
- c) *Istishna*: akad ini mirip dengan *salam*, kecuali bahwa pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah maupun akhir. Akad ini umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek seperti pembangunan gedung.

5) Pola Sewa

Terdapat dua akad bank syariah yang memiliki prinsip sewa:

- a) *Ijarah*: akad dimana bank dapat menyewakan suatu barang kepada nasabah dan memperoleh imbalan sebagai biaya sewa

b) *Ijarah muntahiya bittamlik*: transaksi sewa beli, dimana pada akhir masa sewa akan terjadi pemindahan kepemilikan barang yang disewakan, dimana barang ini akan dijual maupun dihibahkan.

6) Pola lainnya

Selain kelima pola tersebut, masih terdapat akad-akad lain dalam bank syariah, yang meliputi 6 produk berikut ini :

a) *Wakalah*: merupakan akad yang memberikan wewenang bagi bank untuk mewakili nasabah dalam transaksi yang dapat diwakilkan, seperti dalam kliring, transfer, L/C dan inkaso. Atas jasa perwakilan ini, bank akan menerima imbalan dari nasabah.

b) *Kafalah*: Pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan bagi pihak yang mendapat pengalihan tanggung jawab, misalnya dalam Bank Garansi.

c) *Hiwalah*: merupakan akad untuk pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang menanggung atau menerimanya.

d) *Rahn (mortgage)*: merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh nasabah kepada bank dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Bank yang mendapat kekuasaan kemudian dapat memperoleh imbalan jasa dari nasabah pemberi amanah. Umumnya akad ini digunakan dalam produk gadai.

e) *Sharf*: merupakan akad yang melibatkan jual beli suatu valuta asing atau penukaran mata uang domestic dengan valas.

f) *Ujrah*: merupakan akad yang mengatur mengenai imbalan yang akan diterima bank atas jasa yang telah diberikan, seperti jasa penyediaan ATM, pelayanan dan penyediaan *safe deposit box*.

d. Bank Sentral

Fungsi utama bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian (*to manage nations money supply*). Namun dalam praktiknya, bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penanganan penyelesaian giro (*clearing and collecting check*) sampai kepada pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perbankan.

Bertambah besarnya fungsi-fungsi bank sentral memang sulit dihindari, karena dunia nyata tidaklah seideal yang dibayangkan. Aspek politis dan historis sangat mewarnai dan memengaruhi perkembangan perbankan di setiap negara. Bahkan di negara-negara kapitalis yang mengandalkan mekanisme pasar, perluasan fungsi bank sentral tak terhindari. Secara umum ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata :

1) Agen Fiskal Pemerintah (*fiscal Agent of Government*)

Dimana bank sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah/transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset finansial milik pemerintah.

2) Banknya Bank (*Banker of Bank*)

Bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Fungsi ini juga dikenal sebagai *lender of last resort*.

3) Menentukan Kebijakan Moneter (*Monetary Policy Maker*)

Dalam hal ini terutama adalah pengendalian jumlah uang beredar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan kondisi makroekonomi ke arah yang lebih baik dan atau diinginkan.

Selain tiga fungsi utama tersebut, umumnya bank sentral juga melaksanakan beberapa fungsi dibawah ini.

1) Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Perbankan (*Supervision, Examination and Regulation of Members Bank*). Salah satu alasan yang mendasari pentingnya fungsi ini adalah karena ketidaksempurnaan pasar (industry perbankan). Hal ini akan menimbulkan eksternalitas yang merugikan (*diseconomies externalities*) dan penyebab kegagalan pasar, yang sangat mengganggu stabilitas perekonomian. Walaupun harus diakui bahwa industri perbankan menghasilkan eksternalitas yang menguntungkan (*economies externalities*). Melalui fungsi ini bank sentral akan meminimumkan eksternalitas merugikan dan memaksimumkan eksternalitas menguntungkan dari industry perbankan.

- 2) Penanganan Transaksi Giro (*The Clearing and Collection of Checks*). Dengan fungsi ini bank sentral mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang besar, antarbank, antarwilayah dan antarnegara. Tanpa bantuan bank sentral, bank-bank secara individu tidak dapat menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut.
- 3) Riset-Riset Ekonomi (*Economic Research*). Riset-riset ekonomi yang dilakukan bank sentral terutama adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sector moneter. Riset-riset ini dibutuhkan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter.

e. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral negara Republik Indonesia. Didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status De Javasche Bank N.V. (yang dinasionalisasi di tahun 1951) menjadi bank sentral Indonesia. Dasar hukum pendirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11/1953.

Sama halnya dengan bank sentral di negara-negara lainnya, BI mengalami perubahan kedudukan dan fungsi pokoknya, yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sejarah, politik dan ekonomi di Indonesia. Dilihat dari perubahan undang-undangnya, sejak 1953 BI telah mengalami dua kali perubahan kedudukan dan fungsi pokok. Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968, sedangkan perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/1999.

Hingga kini, UU No. 23/1999 masih menjadi undang-undang pokok yang mengatur tentang Bank Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, undang-undang ini telah mengalami dua kali perubahan, yang dirangkum dan kemudian disahkan dalam UU No. 3/2004 dan UU No. 6/2009 (merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2008). Perubahan pertama dalam UU No. 3/2004 mengatur tentang beberapa perubahan mendasar terkait ranah tugas Bank Indonesia, pendefinisian hubungan BI dengan

pemerintah, pengaturan modal dan cadangan BI, serta kepemimpinan BI. Sementara itu, perubahan kedua yang terangkum dalam UU No. 6/2009 hanya mencakup penyesuaian fungsi BI sebagai *Lender of the last Resort* (LOLR) dalam rangka mengatasi krisis keuangan global, terutama terkait dengan aspek agunan.

Pemerintah Indonesia tetap memandang fungsi utama bank sentral adalah sama seperti bank sentral di negara lainnya, terutama fungsi pengaturan peredaran uang. Hal yang berbeda dari undang-undang tersebut adalah aspek kepemimpinan dan hubungan dengan pemerintah, khususnya yang dicantumkan dalam UU No. 23/1999 dan perubahannya, dalam UU No. 3/2004. Pada dasarnya, perubahan UU BI tersebut tetap mengedepankan aspek independensi bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah, dengan menambahkan beberapa detail terkait dengan hubungan BI dengan pemerintah dalam aspek keuangan. Wujud independensi itu terlihat dalam dua hal, yaitu : 1) aspek kepemimpinan dan kewenangan, 2) hubungan keuangan dengan pemerintah.

1) Kepemimpinan dan Kewenangan Bank Indonesia

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 23/1999 (Pasal 41), dalam UU No. 3/2004, disebutkan bahwa Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan ini Presiden tidak lagi mempunyai kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI. Sementara itu, untuk pemilihan Deputy Gubernur, Gubernur BI terpilih dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden, sebelum pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pada masa sebelumnya struktur kepemimpinan bank sentral lebih kompleks dengan wewenang yang relative luas. Misalnya berdasarkan UU No.11/1953 yang memutuskan kebijakan moneter adalah Dewan Moneter, sedangkan pelaksanaannya adalah Dewan Direksi. Berdasarkan UU No. 13/1968 yang memutuskan kebijakan moneter adalah pemerintah, pelaksanaannya adalah

Dewan Direksi. Sementara itu, berdasarkan UU No. 23/1999, Bank Indonesia memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter (Pasal 8 dan 10). Dalam UU No. 3/2004, ketentuan ini diperjelas dengan keterangan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.

2) Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

Berdasarkan UU No.23/1999, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya (Pasal 56). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya di mana BI boleh memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pasal 62 UU No. 23/1999 menyatakan bahwa BI wajib membagi hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah berdasarkan pembagian yang ditetapkan.

Hal ini juga tidak mengalami perubahan dalam UU No. 3/1999 maupun UU No. 6/2009. Hanya saja, seperti yang telah tertera dalam Tabel 19.9. BI memiliki beberapa perubahan peran terkait dengan hubungannya dengan pemerintah dalam hal keuangan. Beberapa perubahan di antaranya terkait dengan peran BI dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN), pengaturan pembelian SUN untuk operasi pengendalian moneter dan kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada DPR dan pemerintah.

d. Otoritas Jasa Keuangan

Seperti yang telah disinggung dalam UU No. 3/2004 (Pasal 34), tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh Lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan undang-undang. Hal inilah yang mendasari pembentukan lembaga yang kita kenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK resmi terbentuk pada tanggal 22 November 2011. Ketentuan-ketentuan mengenai fungsi, tugas dan tujuan OJK telah diresmikan dalam UU yang mengatur tentang OJK, yaitu UU No. 21/2011.

OJK memiliki tujuan pembentukan untuk menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, bersih, adil, transparan, akuntabel dan

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan inilah yang mendasari OJK untuk melakukan pengawasan kehati-hatian (*prudential*) dan *market conduct* (keterkaitan praktik bisnis dengan konsumen ritel). Tugas pengawasan ini meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor :

- 1) Sektor Perbankan
- 2) Sektor Pasar Modal
- 3) Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Seperti yang telah disinggung di atas, tugas OJK tidak hanya mencakup pengawasan Lembaga keuangan, namun juga menjamin perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai tujuannya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih baik dan lebih aman, OJK pun melakukan tugasnya secara dua arah.

1) Pengawasan Lembaga Keuangan

Pengawasan lembaga keuangan yang dilakukan oleh OJK dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu pengawasan *microprudential* dan *market conduct*.

a) Pengawasan Mikroprudensial

Pengawasan mikroprudensial merupakan salah satu bagian dari tiga upaya pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Dua upaya pengawasan lainnya adalah pengaturan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh kementerian keuangan dan pengawasan sistem keuangan (*macroprudential*) yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Adapun perbedaan mendasar dari pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial ini adalah dalam hal cakupannya. Pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh BI merupakan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK hanya mencakup pengawasan stabilitas institusi keuangan secara individu. Meskipun demikian, pengawasan

mikroprudensial ini sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan institusi keuangan dan melindungi konsumen.

Dalam hal pengawasan mikroprudensial ini, pengawasan suatu institusi dapat ditinjau dari berbagai sisi : 1) kelembagaan, 2) proses bisnis, 3) *governance*, 4) permodalan, 5) *likuiditas* dan 6) sistem pelaporan. Bagi OJK sendiri, pengawasan ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa aspek (UU No. 21/2011, Pasal 7) yaitu kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian dan pemeriksaan bank.

Hal yang menarik dari pengawasan yang dilakukan OJK ini adalah adanya pengawasan yang bersifat terintegrasi. Pengawasan mikroprudensial ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menilai kinerja satu institusi keuangan, namun juga kinerja setiap anak perusahaan institusi keuangan tersebut.

b) Pengawasan *Market Conduct*

Pada dasarnya, pengawasan *market conduct* merupakan bagian dari upaya OJK dalam melindungi konsumen, namun pengawasannya diterapkan kepada lembaga keuangan yang terkait. Pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK ini sendiri memiliki dua tujuan yaitu (1) meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas usaha disektor jasa keuangan dan (2) memberikan peluang bagi lembaga keuangan untuk berkembang secara adil, efisien dan transparan.

Pengawasan *market conduct* ini mencakup pengawasan mulai dari desain produk keuangan, *product launching*, pemasaran produk keuangan, layanan purnajual produk keuangan dan penyelesaian sengketa produk keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, OJK dapat melakukan usaha pengumpulan data secara tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan atau pemeriksaan langsung pada institusi terkait (*on site supervision*).

Sebagai penunjang dalam tugas pengawasan lembaga keuangan ini, OJK juga memiliki kewenangan untuk :

- (1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB);
- (2) Memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan, maupun penetapan pembubaran;
- (3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan menunjuk pengelola *statuter*;
- (4) Menerapkan sanksi administratif.

c) Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Selain melakukan pengawasan dari sisi lembaga keuangan, OJK juga harus memberikan edukasi dan perlindungan terhadap konsumen industri jasa keuangan, sesuai dengan 5 prinsip perlindungan konsumen. Edukasi ini diperlukan agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai produk keuangan. Dalam ranah edukasi dan perlindungan konsumen, kewenangan OJK mencakup :

- (1) Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
- (2) Pelayanan pengaduan konsumen;
- (3) Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas edukasi dan perlindungan konsumen sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat preventif dan represif.

- (1) Preventif (usaha pencegahan)
 - (a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
 - (b) Menyediakan pelayanan pengaduan
 - (c) Melakukan studi *market intelligence*
 - (d) Melakukan pengaturan dan pengawasan *market conduct*.
- (2) Represif (usaha penanggulangan)
 - (a) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan
 - (b) Melakukan tindakan penghentian kegiatan keuangan atau tindakan lain

(c) Memberikan *alternative dispute resolution* atau pembelaan hukum.

Saat ini, OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner OJK yang beranggotakan 9 orang. Sesuai dengan peran dan sejarah pembentukannya yaitu untuk menjadi lembaga pengawasan seluruh lembaga keuangan (bank yang awalnya merupakan kewenangan BI, serta non bank yang awalnya adalah kewenangan BAPEPAM-LK) yang bersifat independen, maka dalam susunan Dewan Komisiner OJK pun diharuskan adanya anggota yang merupakan *ex-officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

E. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN PERBANKAN (NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTION)

Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan dan pegadaian.

1) Perusahaan Asuransi

Produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah perlindungan finansial berupa pengalihan risiko untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras, bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan sumber dana jangka Panjang yang amat potensial bagi sektor swasta. Sebab uang yang dipegang perusahaan asuransi sangat besar sedangkan kewajibannya baru jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Jika seseorang ingin membeli produk asuransi, maka wajib untuk melakukan pembayaran **premi**, yaitu uang yang dibayarkan dari tertanggung kepada pihak penanggung atas jasa pengalihan risiko. Sebagai gantinya, orang

tersebut akan menerima surat kontrak dari penanggung sebagai bukti pengalihan risiko. Surat ini dikenal dengan sebutan **polis**.

Produk asuransi sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum, yang meliputi: asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri dan asuransi liabilitas.

Perlu diingat bahwa bila pada akhirnya kita tidak melakukan klaim terhadap asuransi yang telah kita beli, kita masih mendapatkan manfaat yaitu berupa pengalihan risiko dan rasa aman yang telah kita terima. Selain itu, beberapa manfaat dari asuransi meliputi :

- a) Memberikan rasa aman dan perlindungan
- b) Sarana menabung
- c) Mengurangi risiko kerugian
- d) Menjadikan hidup lebih tenang
- e) Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung.

2) Lembaga Dana Pensiun

Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pension. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pensiun dapat memberikan ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pensiun juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. Sebab, sama seperti perusahaan asuransi, kewajiban dana pensiun baru jatuh tempo dalam waktu yang sangat panjang, sehingga dapat menjadi sumber dana jangka panjang.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya. Secara psikologis,

jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 1992. Undang-undang tersebut didukung PP No. 76 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan PP No. 77 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perangkat-perangkat peraturan tersebut diundangkan dengan maksud untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan dana pensiun yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya.

3) Investasi Pasar Modal

Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah **diversifikasi** (*diversification*). Diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe asset finansial. Saat ini, sering kali fungsi perusahaan investasi juga disediakan oleh bank umum yang menyediakan produk sekuritas bagi nasabahnya. Adapun pasar modal (*capital market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka Panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka Panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu system yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti *right* (*right issue*) dan waran (*warrant*).

Pasar modal berbeda dengan pasar uang (*money market*). Pasar uang berkaitan dengan instrument keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya

terdiri atas berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

4) Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan berdasarkan hukum gadai. Lembaga ini awalnya berkembang di Italia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Praktik pegadaian di Indonesia dirintis oleh orang Belanda melalui VOC.

Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjam, yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikutan bunganya. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan sekitar 80-89% dari nilai perkiraan (nilai taksir) aset yang digadaikan. Peminjam dapat melunasi utangnya setiap saat, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Karena prosedur peminjamannya sangat sederhana, mudah dan cepat, pegadaian di Indonesia termasuk sumber dana yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan target utama pegadaian itu sendiri, yaitu masyarakat yang belum memiliki akses perbankan dan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang masih memiliki aset bergerak yang dapat digadaikan.

Selain bertujuan untuk memberikan solusi pendanaan yang cepat, pegadaian juga memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis lain, yang meliputi : (1) pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia dan batu permata serta (2) jasa-jasa transfer uang, transaksi pembayaran dan administrasi pinjaman.

5) Perusahaan Pembiayaan

Lembaga keuangan bukan bank umumnya mengumpulkan dana dari individu/organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkan dalam

bentuk pinjaman berskala besar. Namun, lembaga pembiayaan melakukan hal yang sebaliknya, karena meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kecil kepada individu atau unit usaha kecil.

Di Indonesia, berdasarkan Keppres No. 61/1988, kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah :

- a) **Usaha *leasing*** (sewa guna usaha) sudah ada sejak 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang di temukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi *leasing* meliputi *leasing* peralatan, penggunaan tanah dan binatang piaraan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak sistem hukum mencantumkan *leasing* sebagai salah satu metode **pembiayaan**. Perkembangan usaha di bidang industri pertanian, manufacturing dan transportasi membawa banyak jenis peralatan yang memungkinkan untuk dibiayai dengan cara *leasing*.
- b) **Modal Ventura** (*capital venture*) dapat didefinisikan dalam berbagai versi, namun pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura, yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut *Perusahaan Pasangan Usaha atau Investee Company* dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut *Perusahaan Modal Ventura*. Meskipun prinsip pembiayaan dari modal ventura adalah ‘penyertaan’, hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa berupa obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
- c) *Factoring* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi **anjak piutang**. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20

Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009, anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa nonpembiayaan atas piutang. Pada kenyataannya, kedua jenis jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam suatu perjanjian anjak piutang, perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa tersebut. Pada dasarnya, pilihan atas jenis jasa yang akan diberikan bergantung pada kesepakatan antara pihak *factor* dan pihak klien.

- d) **Pembiayaan konsumen** (*consumer finance*) adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan konsumen bisa dilakukan oleh suatu bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan pembiayaan konsumen yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank ataupun oleh suatu bank. Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- e) **Kartu Plastik** merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu Lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam berbagai

bentuknya menunjukkan bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga untuk tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Berdasarkan pada pertimbangan dapat dibawa bepergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu-waktu dan kemudahan penggunaan yang lain kartu plastik ini semakin luas digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.

6) Lembaga Financial Technology (FinTech)

Lembaga FinTech merupakan Lembaga yang lahir sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Kemajuan teknologi di era sekarang ini pada akhirnya mendorong perubahan model bisnis berbagai usaha di sektor industri jasa keuangan. Hingga pertengahan tahun 2019, telah banyak perusahaan FinTech yang berkembang di Indonesia. Produk layanannya pun beragam, mulai dari platform untuk melakukan investasi reksa dana, *peer to peer lending*, *crowdfunding* dan *e-money*. Sesuai dengan namanya, semua produk-produk FinTech ini berbasis *online*, sehingga tentunya dapat menekan biaya operasional dan biaya modal, bila dibandingkan dengan perusahaan serupa yang masih bersifat konvensional.

Adanya FinTech memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya adalah layanan yang lebih efisien, efektif dan ekonomis banyaknya pilihan jasa keuangan dan layanan yang lebih baik. Menurut Bank Indonesia, FinTech sendiri memiliki peran dalam mendorong tercapainya strategi nasional keuangan inklusif (SKNI) dan memiliki beberapa peran penting dalam sistem pembayaran saat ini, seperti:

- a) Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
- b) Menjadi alat bantu untuk proses pembayaran, penyelesaian/*settlement*, dan kliring
- c) Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
- d) Mitigasi risiko dari system pembayaran konvensional

- e) Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan menanam modal
- f) Meningkatkan kecepatan perputaran uang dalam perekonomian

Di sisi lain, karena usaha yang dilakukan oleh berbagai Lembaga FinTech sangat erat kaitannya dengan sistem pembayaran, maka diperlukan peran BI untuk melakukan pengaturan dan pengkajian terkait produk-produk FinTech, keamanan system transaksi dan perlindungan konsumen. Hingga tahun 2019, selain menyediakan *regulatory sand-box*, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai FinTech, yaitu:

- a) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, dan
- c) Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

7) Lembaga Keuangan Informal

Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana.

Bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain riba dan ijon. Usaha riba adalah usaha memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi, sehingga sering disebut sebagai lintah darat atau rentenir.

Praktik ijon terjadi dikalangan petani, dimana pemodal memberikan dana kepada petani, dengan syarat hasilnya nantinya harus dijual kepada pemodal. Hal yang menjadi persoalan dalam praktik ijon adalah sering kali harga jual hasil petani sangat rendah dibanding harga pasar yang berlaku.

Di satu sisi, keberadaan lembaga keuangan informal ini amat menolong, karena menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Di sisi lain, biaya modal yang dibebankan kepada peminjam sangat tinggi. Misalnya, jika melalui perbankan masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan bunga sekitar 1,5% per bulan melalui riba beban bunga yang dipinjamkan lebih besar dari 3% per bulan.

Sebenarnya ada juga lembaga keuangan informal yang tidak menjerat, namun umumnya kurang ekonomis untuk digunakan sebagai sumber dana usaha yaitu lembaga arisan. Biasanya tujuan pelaksanaan arisan bukan semata-mata finansial, namun juga tujuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono (Eds.). 1981. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI-Press
- Mankiw, G.N. 2012. *Principles of Macroeconomics*. Edisi ke-6. Mason, O.H: South-Western Cengage Learning
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Seri 8*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Seri 1*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Seri 2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Parkin, M. 2008. *Economics*. Edisi ke-8. Boston: Pearson Education
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan (edisi kelima)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Sukirno, S. 1993. *Mikroekonomi*. Edisi ke-3. Kuala Lumpur: Aneka Publishing

- Sukirno, S. 2000. Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Swasono, Sri-Edi. 1985. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI-Press
- Tjokroprajitno, S. 1994. Matematika Ekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Profil Penulis

Muhammad Rafi'i Sanjani



Lahir dari orang tua H. Muhammad Taufiq, HM., S.H dan Hj. Irawani sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, di Tanah Grogot, 07 Juli 1989, merupakan Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa Nusa Tenggara Barat dan mengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro, Bank dan Lembaga Keuangan.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 018 Tanah Grogot Kalimantan Timur (lulus tahun 2001), melanjutkan SLTP Negeri 01 Sambaliung Kab. Berau Kalimantan

Timur (lulus tahun 2004), kemudian melanjutkan MA Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan (lulus tahun 2007), kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan (lulus tahun 2012). Kemudian Bekerja sebagai Karyawan di BRI Syariah Banjarmasin pada tahun 2013. Kemudian Melanjutkan Studi Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan lulus pada tahun 2017.

Penulis sebagai Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan mendapat amanah sebagai Sekretaris Program Studi 2019 – 2022. Pada saat ini aktif di Lembaga Sosial Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Sumbawa 2019 – 2023 yaitu dalam memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dan Aktif memberikan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk pelaku UMKM secara nasional. Muhammad Rafi'i Sanjani kepakaran di bidang ekonomi syariah, serta aktif dalam menulis jurnal dan book chapter tentang ekonomi syariah. Beliau dilahirkan di tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Muhammad Rafi'i memiliki motto “jangan pernah merasa lelah dalam berjuang karena itu adalah sebuah kemalasan tanpa kita sadari”, karena *where there is a will there is a way!*

BAB IV

SIKLUS EKONOMI

Dr. Asriati, SE., MSi,
Dr. Agus Salim HR, SE., MM|

La ENVIPE 2013 permite conocer los motivos que llevan a la población víctima a denunciar, están los atribuidos a la autoridad o no, de tiempo y la desconfianza en la autoridad.

• Denuncias
• Denuncias NO denuncias
• No reportado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Condición de denuncia del delito

• Por causas atribuibles a la autoridad
• Por otras causas

Causas atribuibles a la autoridad	2010	2011
Otras causas	61.2	63.2
No	36.3	35.9
No	2.6	0.8

Del total de las denuncias refiere que en el 53.2% en el 2011, esta cifra fue...

• Con inicio de Atención Previa
• Sin inicio de Atención Previa
• No aplica

CIAL

A. PEMBAHASAN SIKLUS EKONOMI

Perekonomian umumnya mengalami pasang dan surut, setidaknya terlihat dari perkembangan tingkat *output* dan harga. Gelombang naik turun itu relatif teratur dan terjadi berulang ulang dengan rentang waktu yang bervariasi. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus menerus bertumbuh, tanpa satu tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Tahun 1998 di Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi hingga tahun 2000 krisis tersebut belum terselesaikan. Jumlah rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan bertambah sementara *output* perekonomian mengalami kontraksi sebanyak 13%. Itulah sebabnya siklus ekonomi sangat penting, sangat menarik dan penting dibahas secara khusus.

Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus menerus bertumbuh, tanpa satu tahun bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan tersebut disertai stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas. Neraca pertumbuhan dan neraca pembayaran pun mengalami surplus yang baik. Perekonomian seperti ini dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat dari generasi ke generasi.

Kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh siklus ekonomi global. Hal ini berakibat pada perusahaan di Indonesia yang telah mengalami beberapa kondisi terpuruk hingga akhirnya menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu mempertahankan kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa pengertian siklus ekonomi, yang sedikit berbeda dalam variasi namun secara garis besar artinya sama. Menurut situs investopedia, *economic cycle* atau siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode pelemahan atau resesi. Siklus ekonomi secara garis besar terdiri atas 4 fase atau periode yaitu: (1) pertumbuhan/ekspansi, (2) puncak/peak, (3) pelemahan/resesi, dan (4) titik terendah/palung.

Beberapa faktor seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat bunga, tingkat pengangguran, dan tingkat produksi dapat membantu menentukan sebuah perekonomian sedang berada di periode mana. Fase ekspansi ditandai dengan tingginya pertumbuhan dan produksi, serta rendahnya suku bunga dan pengangguran, sebaliknya dalam fase pelemahan indikator perekonomian menunjukkan tanda yang sebaliknya. Tidak ada durasi atau jangka waktu yang pasti atas masing-masing fase, bisa saja pada suatu periode masa ekspansi lebih panjang dibanding masa resesi atau malah sebaliknya. Namun demikian urutannya tetap sama yaitu ekspansi-titik-puncak-kontraksi-titik-terendah. Meskipun ada fase naik dan ada fase turun, pada umumnya negara berkembang memiliki trend output PDB yang terus meningkat.

B. SIKLUS EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan instrument yang digunakan pemerintah untuk merespon ketidakpastian dalam siklus perekonomian. Perilaku kebijakan fiskal yang ideal dalam merespon siklus ekonomi adalah *countercyclical*, yaitu kontraksi ketika ekonomi *boom* untuk menghindari *overheating* dan ekspansi, ketika ekonomi dalam masa resesi untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Analisis *output gap* digunakan dalam menganalisis siklus ekonomi yang terjadi, sedangkan *fiscal impulse measure* digunakan dalam melihat arah kebijakan fiskal.

Stabilitas ekonomi merupakan masalah yang terus berkembang dan menjadi perhatian. Setiap negara, pada umumnya menginginkan perekonomian yang idela dimana terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan. Faktanya, sejarah perekonomian dunia menunjukkan bahwa tidak ada perekonomian negara di dunia yang tumbuh secara berkesinambungan tanpa adanya guncangan. Guncangan dalam perekonomian akan terus terjadi menyesuaikan keadaan ekonomi dan siklus ekonomi bisnis yang terjadi. Siklus bisnis merupakan suatu pola aktivitas ekonomi yang selalu bergerak dan berfluktuasi.

Perilaku kebijakan fiskal di analisis dengan membandingkan nilai *output gap* dan *fiscal impulse measure*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perilaku kebijakan fiskal yang diambil pemerintah Indonesia adalah *procyclical* dalam merespon siklus ekonomi dan shock yang terjadi selama periode pengamatan, hal ini disebabkan oleh sempitnya ruang fiskal sehingga pemerintah kurang fleksibel dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan potensi serta memanfaatkan peluang dari ruang fiskal.

Siklus ekonomi merupakan suatu pola aktivitas ekonomi yang selalu bergerak dan berfluktuasi. Siklus ekonomi tersebut dapat berupa ekspansi dan kontraksi dari kegiatan ekonomi sepanjang tren pertumbuhan (Mankiw, 2009). Menghadapi siklus ekonomi dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dengan adanya beberapa guncangan di dalamnya, pemerintah Indonesia memiliki instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga kondisi perekonomian tetap stabil.

Menggunakan metode *fiscal impulse* yang bertujuan untuk mengukur dampak bersih dari kontraksi dan injeksi fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perilaku kebijakan fiskal yang diambil pemerintah Indonesia adalah *procyclical* dalam merespon siklus ekonomi dan *shock* yang terjadi disebabkan oleh sempitnya ruang fiskal sehingga pemerintah kurang fleksibel dan leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan potensi serta memanfaatkan peluang dari ruang fiskal.

Perilaku kebijakan yang diambil pemerintah selama kurun waktu 30 tahun adalah *procyclical* dalam merespon siklus ekonomi. Pemerintah Indonesia tidak mampu mengambil kebijakan fiskal *countercyclical* disebabkan oleh sempitnya *fiscal space* dalam belanja negara yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk secara leluasa mendorong perekonomian melalui kreativitas terhadap potensi yang dimiliki negara.

C. SIKLUS EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Siklus ekonomi adalah fenomena alami yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Dalam jurnal ini, kami melakukan analisis mengenai siklus ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana siklus ekonomi mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan menentukan strategi yang dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi siklus. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan tinjauan pustaka yang mendalam serta analisis data ekonomi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siklus ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penting bagi para pengambil kebijakan untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus ini guna meminimalkan dampak negatifnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kunci dalam mengatrrur perkembangan ekonomi satu negara. Analisis terkait pertumbuhan ekonomi ini penting dilakukan sebagai dasar memformulasikan arah kebijakan ekonomi makro serta target perkembangan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas melalui bauran kebijakan pemerintrah baik dari sisi fisik maupun moneter.

Formulasi kebijakan ekonomi yang dilakukan harus dapat mempertimbangkan siklus ekonomi yang terjadi dalam perekonomian agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran. Salah satu alat analisis yang sering digunakan dalam melakukan diagnosis posisi perekonomian dalam siklus bisnis adalah melalui pendekatan output gap. Out gap secara sederhana dapat menggambarkan adanya kelebihan permintaantrau penggunaan kapasitas produksi yang rendah di dalam satu perekonomian.

Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat, pemahaman yang baik tentang siklus ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Siklus ekonomi mengacu pada fluktuasi periodik dalam aktivitas ekonomi yang mencakup periode ekspansi dan kontraksi. Dalam pandangan ekonomi makro, pemahaman yang baik tentang

siklus ekonomi dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi.

Pembahasan ini termasuk studi literatur yang memfokuskan pada analisis siklus ekonomi: tinjauan terhadap pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil telaah menunjukkan bahwa siklus ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode ekspansi, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat dengan adanya peningkatan investasi dan konsumsi.

Namun, ketika siklus memasuki fase kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat bahkan bisa mengalami kontraksi. Siklus ekonomi juga dapat mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti sektor perumahan dan sektor keuangan. Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengantisipasi perubahan siklus dan merancang kebijakan yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari fluktuasi siklus.

Hasil tinjauan penulis menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang siklus ekonomi penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi, para pengambil kebijakan perlu mengintegrasikan pengetahuan tentang siklus ekonomi ke dalam perencanaan kebijakan jangka panjang.

D. HUBUNGAN SIKLUS EKONOMI DAN *EMPLOYEMENT RATE* DI INDONESIA

Salah satu model ekonomi yang memprediksi siklus ekonomi adalah Goodwin's Class Struggle Model (Model Godwin). Model ini merupakan memperlihatkan suatu siklus ekonomi berdasarkan relasi antar Workers share dan employment rate. Dalam konstruksinya, model ini menggabungkan dua aspek teori ekonomi yaitu teori model pertumbuhan Harrod Domar, dan teori model kurva philips.

Kegiatan ekonomi masyarakat senantiasa bergerak menurut pola yang secara periodik umumnya mengalami gelombang pasang surut. Dalam ilmu

ekonomi, kegiatan ekonomi yang mengalami gelombang pasang surut tersebut dikenal sebagai siklus ekonomi. Siklus ekonomi menyangkut segala segi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya tercermin pada pendapatan nasional.

Pola siklus ekonomi mencakup tahap Ekspansi yang pada suatu saat berbalik menuju tahap kemunduran yang kelak disusul oleh pemulihan kearah ekspansi lagi. Tahap ekspansi ditandai oleh kegiatan Ekonomi yang semakin menarik. Adanya pola siklus ekonomi juga dialami negara Indonesia, sebagai contoh ketika masa pemerintahan orde lama tahun 1956- 1967, perekonomian Indonesia porak poranda, hal ini terlihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi mencapai lebih dari 500%.

Namun setelah pemerintahan orde lama tahun 1966-1998, Indonesia mengalami tahap ekspansi yaitu meningkatnya pendapatan rata-rata perkapita mencapai di atas US \$ 1000. Tentunya hal ini membuat permintaan akan barang meningkat disusul dengan meningkatnya produksi dan kesempatan kerja. Salah satu model ekonomi yang memprediksi adanya siklus ekonomi dan menggambarkan fluktuasi dan keadaan ekonomi adalah Goodwin's class struggle atau yang dikenal dengan Model Goodwin (Goodwin, 1967).

Model Goodwin menggabungkan dua aspek teori ekonomi, yaitu Teori Model Pertumbuhan Harrod Domar, dan Model Kurva Philips. Kedua teori ekonomi ini yang terus berubah berdasarkan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Model Goodwin ini terinspirasi dari permodelan mangsa-pemangsa Lotka Volterra. Sehingga perilaku dari sistem Model Goodwin sama seperti perilaku permodelan mangsa-pemangsa Lotka Volterra. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana mengkonstruksi sistem Model Goodwin, serta menganalisis dan melakukan simulasi solusi sistem Model Goodwin berdasarkan data ekonomi Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia sebagai input dari parameter-parameter pada model tersebut.

Model Goodwin pertama kali dikemukakan oleh ekonom-Amerika Richard M. Goodwin. Model ini merupakan model yang mendeskripsikan siklus

ekonomi berdasarkan relasi antara workes share dan employment rate. Dimana workes share adalah saham dari pendapatan yang akan diterima pekerja, dan employment rate adalah tingkat pekerja. Workes share ini berupa rasio antara upah pekerja terhadap pendapatan yang merupakan indikator suatu pendistribusian pendapatan. Workes share menunjukkan berapa banyak pendapatan yang didistribusikan kepada tenaga kerja dan modal. Sedangkan employment rate merupakan tingkat pekerja yang berupa rasio antara pekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan teori kurva Philips yang membangun sistem dari model Goodwin hanya terpenuhi pada periode 2001-2003, maka untuk analisis dan simulasi sistem digunakan nilai parameter berupa data yang didapat dari pengolahan data ekonomi Indonesia tahun 2001- 2003.

E. MODEL SIKLUS EKONOMI

Salah satu model ekonomi yang memprediksi siklus ekonomi adalah Muhammad Latif Abdullah dan Dr. Afdawaiza S. Ag. Dalam konstruksinya, Siklus Ekonomi yang terjadi selama kurun waktu penelitian 1993-2022 menunjukkan bahwa Indonesia secara garis besar mengalami resesi dan kondisi terparah pada tahun 1998 akibat adanya krisis moneter.

Stabilitas ekonomi merupakan masalah yang terus berkembang dan menjadi perhatian. Setaip negara, pada umumnya menginginkan perekonomian yang ideal dimana terjadi pertumbuhan yang tumbuh berkesinambungan tanpa adanya guncangan (Samuelson dan Nordhaus, 2010). Guncangan dalam perekonomian akan terus terjadi menyesuaikan keadaan ekonomi dan siklus ekonomi yang terjadi. Siklus bisnis merupakan suatu pola aktivitas ekonomi yang selalu bergerak dan berfluktuasi. Silus bisnis tersebut dapat berupa ekspansi dan kontraksi dari kegiatan ekonomi sepanjang tren pertumbuhan (Mankiw, 2009).

Menghadapi siklus bisnis dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dengan adanya beberapa guncangan didalamnya, pemerintah Indonesia

memiliki instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek.

Selain itu, dengan meningkatkan kinerja ekonomi, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi sisi penawaran dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal dirancang untuk “leaning against the wind” yakni memberikan respon dan stimulus terhadap dinamika perekonomian baik ketika perekonomian menghadapi resesi maupun kontraksi (Ilzetki & Veghm 2008). Untuk dapat menjalankan kebijakan fiskal dan melakukan respon fiskal terhadap kondisi perekonomian, pemerintah harus memiliki estimasi yang kuat terhadap tren penerimaan dan belanja negara.

Menghadapi siklus bisnis dan kondisi perekonomian yang berfluktuasi dengan adanya beberapa guncangan didalamnya, pemerintah Indonesia memiliki instrument kebijakan fiskal untuk menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Kebijakan procyclical dan countercyclical merupakan kebijakan yang mengikuti arus siklus bisnis. Mengingat konsep siklus bisnis. Mengingat konsep tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas. Pembangunan siklus ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Siklus Ekonomi menggambarkan pertukaran uang dan barang dalam suatu perekonomian. Model Siklus. Ekonomi merupakan gambaran skematis Ekonomi merupakan gambaran skematis yang berlawanan. Disini diasumsikan bahwa siklus ekonomi menganalisis proses ekonomi secara keseluruhan dalam suatu perekonomian nasional. Fluktasi perekonomian di setiap negara terjadi antara periode ekspansi dan kontraksi. Perubahan kondisi ini disebabkan oleh tingkat pekerjaan, dan permintaan terhadap pasokan barang dan jasa disuatu negara. Dengan pemanfaatan ini membantu proses deteksi yang relative akurat mengenai turning point dan kondisi ekonomi Ekonomi makro.

F. SIKLUS EKONOMI DIMASA PANDEMIC COVID-19

Pandemi covid-19 menjadi salah satu shock terbesar dalam perekonomian indonesia. Akibat pandemi tersebut terjadi tekanan yang dalam terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat sehingga output perekonomian mengalami penurunan serta tidak berada pada tingkat output optimal. Penulis membahas siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi terjadi di masa pandemi covid 19 dengan metode dekomposisi PDB real kurtalan indonesia periode 2000-2022 kedalam pertumbuhan dan fluktuasi jangka pendek dengan *hodrick-prescott* (HP) filter berdasarkan data dari basis Federal Reserve Economic Data (FRED).

Hasilnya menunjukkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2020. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi dan diikuti resesi pada kuartal berikutnya. Setelah itu terjadi pemulihan ekonomi dan kembali mencapai output optimal jangka panjang setelah 1,5 tahun Karakteristik resesi dan pemulihan ekonominya mengikuti bentuk W (W.shaped) karena adanya tekanan baru saat proses pemilihan berupa varian delta yang menyebabkan terjadi resesi baru dengan melihat siklus bisnis perekonomian. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat baik fiskal mau moneter pada setiap fase.

Salah satu shock secara signifikan mengganggu *trend* perkembangan perekonomian global adalah pandemi covid 19. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara negara di dunia harus terditraksi oleh pandemi yang disebabkan oleh virus covid 19 dengan berbagai varian. Pandemi ini dirasakan oleh semua negara didunia dan menjadi salah satu krisis yang besar. Betapa tidak, pandemi yang awalnya merupakan krisis.

Dalam rentang priode 2000-2022, PDB kuartalan selalu mengalami kenaikan, kecuali saat covid 19 melanda. bahkan pada priode 2008 dan 2009 saat dunia mengalami krisis global, PDB indonesia kesehatan tersebut sudah menjalar menjadi krisis berbagai aktivitas manusia termaksud sosial dan ekonomi. Dari isi sosial, kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi terganggu akibat pembatasan yang dilakukan masing masing negara. Dari sisi ekonomi, pembatasan aktivitas membuat sumber pencarian

sebagian masyarakat terbatas. Masih mencatat pertumbuhan walaupun sedikit melambat pada akhir 2008.

Pandemi covid-19 menjadi salah satu shock perekonomian terbesar di dunia, termasuk Indonesia . Meskipun PDB rill kuartalan indonesia meningkat hingga hampir tiga kali lipat di priode 2000-2022 , dalam rentang waktu yang lebih sempit terjadi fluktasi ekonomi dimana fluktasi terbesar disebabkan oleh covid 19. Dampak pandemi ini lebih signifikan dibandingkan shock lain seperti krisis global subprime mortgage, geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas.

Dengan dekomposisi PDB rill menjadi komponen tren dan fluktuasi jangka pendek menggunakan HP filter, siklus bisnis perekonomian Indonesia bisa teramati. Di masa Pandemi Covid-19, resesi dan pemulihan ekonomi Indonesia memiliki bentuk W (W- Shaped).

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., & Tabellini, G. (2006). Why is fiscal policy often procyclical? March 2005.
- Badan Pusat Statistik. (2021).Berita resmi statistik :perkembangan ekspor dan impor indonesia desember 2020.
- Chauvet, M., & Hamilton, J.D (2006). Dating business cycle turning point. Contributions to Economic analysis , 276 , 1-54.
- Depkominfo. (2008). Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap. Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Fernandes, D. (2022). Business Cycle Accounting for the COVID-19 Recession. ^[1]_[SEP]
- Glocker, C., & Wegmueller, P. (2020). Business cycle dating and forecasting with real-time Swiss GDP data. Empirical Economics, 58
- Indarto, W. (2004). Assessment of contingent liability from certain quasy fiscal activities.

Joseph, C. P., & Arief Hartawan, & F. M. ^[1]_{SEPI} (1999). Kondisi Dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997-98. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1542.

Mankiw, N. G. (2009). *Makroekonomi (Edisi Keli)*. Erlangga.

Profil Penulis

Asriati



Permanent Lecturer, Job Placement: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, NIDN/NIDK 0031126303, Position Lektor Kepala IV/b, Email asriati@unismuh.ac.id, Phone Number +62 8124151934, Formal Education. Universitas Muhammadiyah Makassar 1998, Universitas Hasanuddin 2000, Universitas Muslim Makasar.

Book Publication and Research Experience:

Economic Strategy: Correlation Between Macro and Micro Economics on Income Inequality in Indonesia; Preparation of Financial Statements for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Based on Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM); Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Car, NPL Terhadap Penyaluran Kredit PT BTN Tbk Cabang Makassar; Penerapan Self-Assesment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Dikabupaten Gowa; Local Community of Belawa, Wajo Regency, South Sulawesi Province to Engage in Edible Bird's Nest Industry In The Perspective of Islamic Business Ethics; Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



DR. AGUS SALIM HR, SE., MM

NIDN

- 0911115703

JABATAN FUNGSIONAL

- IV.a / Lektor Kepala

FOKUS PENGAJARAN

- Pengantar Bisnis
- Pengantar Manajemen
- Kewirausahaan
- Manajemen SDM
- Budaya Organisasi

KEAHLIAN

- Economics and Finance Research
- Qualitative Analysis

BAHASA

Indonesia: Native
English: Intermediate

KEWARGANEGARAAN

Indonesia

KELAHIRAN

11 November 1957

ALAMAT

Perum Villa Mega Sari Blok D
No 1, Kota Makassar, 90221

EMAIL

agussalim.hr@unismuh.ac.id
agussalim.unair@gmail.com

TELEPON/WA

IDN: +62-813-547-122-16

PROFILE

Scopus ID
<https://www.scopus.com/author/detail.uri?authorId=57214556267>

Google Scholar

<https://scholar.google.co.id/citatis?user=BTTPBG8AAAAJ&hl=id>

Dr. Agus Salim HR, SE., MM adalah dosen tetap yayasan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Memperoleh gelar Doktor Ekonomi Islam pada tahun 2013 dari Universitas Airlangga, Surabaya. Lebih dari 20 tahun mengabdikan sebagai dosen, ia telah mempublikasikan berbagai literatur, jurnal nasional maupun internasional. Pada tahun 2020, artikel berjudul "Economic Strategy: Correlation between Macro and Microeconomics on Income Inequality in Indonesia" berhasil terpublikasikan di *Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)* terindeks scopus.

PENDIDIKAN

Universitas Airlangga (UNAIR)

[2007 – 2013] **S3 - Doktor Ekonomi Islam**

- Judul Disertasi "Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Islami Terhadap Motivasi Kerja Karyawan serta Kesejahteraan Karyawan pada Bank Syariah di Kota Makassar Sulawesi Selatan"

Universitas Muslim Indonesia (UMI)

[1997 – 2000] **S2 - Magister Manajemen**

- Judul Tesis "Tinjauan Komunitas Peserta Transmigrasi Suku Jawa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga yang berlokasi di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan."

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar

[1980 – 1989] **S1 – Sarjana Ekonomi**

- Judul Skripsi "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan"

PENGALAMAN PROFESIONAL

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

[2017 – 2021] **Wakil Dekan I**

PT Surya Pangan Indonesia

[2016 – 2021] **Direktur Keuangan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

[2015 – 2017] **Wakil Dekan II**

Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

[2011 – 2014] **Ketua Prodi**

Rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar

[2009 – 2011] **Kepala Unit PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)**

Pusat Studi Universitas Muhammadiyah Makassar

[2007 – 2009] **Ketua**

Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo

[2003 – 2007] **Ketua Prodi**

LP3M, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo

[1999 – 2003] **Sekretaris**

PRESTASI DAN PENCAPAIAN

[2010-2013] **Basiswa Pendidikan S3** dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

[2013] **Penerima Bantuan Penelitian S3** dari Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar

BAB V

PERTUMBUHAN

EKONOMI

Dr. Muhammad Rusydi, M.Si.



A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan penting bagi setiap negara di seluruh dunia karena mengarah pada peningkatan standar hidup, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengacu pada peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan peluang bagi individu dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya diukur dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil atau PDB per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dari kesehatan dan perkembangan ekonomi yang mencerminkan kemampuannya untuk menghasilkan kekayaan dan meningkatkan standar hidup.

1. Definisi pertumbuhan ekonomi

Berikut adalah beberapa definisi pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh para ekonom dan peneliti terkemuka:

- a. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan nilai pasar yang disesuaikan dengan inflasi dari barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi dari waktu ke waktu. Ini secara konvensional diukur sebagai persentase tingkat kenaikan PDB riil (Mankiw, 2014).
- b. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan nilai riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi selama periode waktu tertentu. Ini adalah ukuran kesejahteraan ekonomi dan standar hidup masyarakat (Jones, 2018).
- c. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perluasan kemungkinan produksi yang berkelanjutan dalam suatu ekonomi, memungkinkan tingkat potensi PDB riil yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Ini didorong oleh faktor-faktor seperti akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pengembangan kelembagaan (Acemoglu et al., 2019).

d. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan tingkat produksi dalam suatu ekonomi, yang dihasilkan dari perluasan input, perbaikan teknologi, dan pertumbuhan produktivitas. Ini adalah penentu penting perbaikan jangka panjang dalam standar hidup (Weil, 2013).

Pertumbuhan ekonomi dapat pula didefinisikan sebagai kenaikan atau perbaikan nilai pasar yang disesuaikan dengan inflasi dari barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi dalam satu tahun keuangan. Para ahli statistik mengukur pertumbuhan seperti tingkat persentase kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) riil dan nominal. Pertumbuhan biasanya dihitung secara riil yaitu suatu istilah yang disesuaikan dengan inflasi, untuk menghilangkan efek penyimpangan inflasi pada harga barang yang diproduksi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan akuntansi pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dibandingkan dengan menggunakan rasio PDB terhadap populasi (pendapatan per kapita). "*Economic growth rate*" mengacu pada tingkat pertumbuhan tahunan geometris dalam PDB antara tahun pertama dan tahun terakhir selama periode waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ini mewakili tren tingkat rata-rata PDB selama periode tersebut, dan mengabaikan fluktuasi PDB di sekitar tren tersebut.

Pertumbuhan ekonomi mencakup perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam produksi barang dan jasa ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini melibatkan analisa terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada *output* ekonomi, seperti peningkatan modal fisik, modal manusia, kemajuan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Cakupan pertumbuhan ekonomi lebih dari sekadar peningkatan PDB, karena mencakup indikator pembangunan dan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk peningkatan standar hidup, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan sosial.

2. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB riil, yang memperhitungkan perubahan harga untuk memberikan ukuran yang

lebih akurat dari volume output fisik yang diproduksi oleh perekonomian. Pertumbuhan PDB riil mencakup keseluruhan ekspansi atau kontraksi kegiatan ekonomi, yang mencerminkan perubahan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan (Mankiw, 2014). Beberapa pengukuran utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah:

- a. Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan pengukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB mencakup total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas geografis suatu negara selama periode tertentu. PDB dapat dihitung dalam harga berlaku (*current prices*) atau dalam harga tetap (*constant prices*) untuk memperhitungkan perubahan dalam tingkat harga.
- b. Pendapatan Nasional Bruto (PNB). PNB adalah pengukuran lain yang mirip dengan PDB. PNB mencakup total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dari semua sumber dalam jangka waktu tertentu, termasuk pendapatan dari dalam negeri dan dari luar negeri. PNB dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan ekonomi suatu negara.
- c. Pendapatan Riil Per Kapita. Pendapatan riil per kapita mengukur pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk suatu negara setelah memperhitungkan perubahan tingkat harga. Pengukuran ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi individu dalam suatu negara. Pendapatan riil per kapita dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mengacu pada gagasan mempromosikan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kesejahteraan lingkungan dan sosial, dan yang tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melibatkan keseimbangan ekspansi ekonomi dengan pertimbangan lingkungan

dan kesejahteraan sosial. Ini menekankan penggunaan sumber daya yang efisien, mengurangi degradasi lingkungan, dan mempromosikan pembangunan inklusif (World Bank, 2020). Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan kelestarian lingkungan, inklusivitas sosial, dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Beberapa aspek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan antara lain:

- a. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim
- b. Meningkatkan efisiensi sumber daya dan praktik ekonomi sirkular
- c. Mempromosikan inklusi sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua
- d. Mendorong inovasi dan transformasi sistem
- e. Memperkuat kerjasama internasional dan multilateralisme

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

Determinan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi laju pertumbuhan suatu perekonomian. Terdapat beberapa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang dikelompokkan dalam faktor penentu penawaran dan faktor lainnya adalah efisiensi dan permintaan. Faktor-faktor penawaran adalah sumber daya alam, barang modal, sumber daya manusia dan teknologi dan mereka memiliki pengaruh langsung terhadap nilai barang dan jasa yang disediakan. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB berarti kenaikan laju pertumbuhan PDB, namun yang menentukan kenaikan tiap komponen sangat berbeda. Pengeluaran publik, pembentukan modal, investasi swasta atau publik, tingkat pekerjaan, nilai tukar, dan lainnya. Terdapat faktor dan peristiwa sosial politik yang berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Sehingga ada juga perbedaan antara determinan ekonomi dan non-ekonomi (Acemoglu, 2009). Berikut ini beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

1. Pengeluaran publik (*public expenditure*).

Pengeluaran publik adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk berbagai barang dan jasa, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pengeluaran publik dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia dan alam, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pengeluaran publik untuk infrastruktur dapat mengurangi biaya dan waktu transportasi, meningkatkan akses ke pasar dan pekerjaan, serta meningkatkan perdagangan dan daya saing. Pengeluaran publik untuk pendidikan dapat meningkatkan modal dan keterampilan manusia, mendorong inovasi dan kreativitas, serta mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Pengeluaran publik untuk kesehatan dapat meningkatkan hasil kesehatan, mengurangi morbiditas dan mortalitas, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan harapan hidup. Pengeluaran publik juga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan menekan investasi dan konsumsi swasta, yang juga merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pengeluaran publik dapat meningkatkan defisit anggaran dan utang publik, yang dapat meningkatkan suku bunga dan inflasi, serta mengurangi tabungan dan investasi swasta. Pengeluaran publik juga dapat meningkatkan pajak atau mengurangi subsidi, yang dapat mengurangi pendapatan dan konsumsi agen swasta.

Pengeluaran publik juga dapat memiliki efek kondisional pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada efisiensi dan efektivitas sektor publik. Misalnya, belanja publik dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada komposisi, alokasi, dan kualitas belanja publik. Beberapa jenis belanja publik mungkin memiliki imbal hasil atau limpahan yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti belanja produktif untuk infrastruktur atau sumber daya manusia versus belanja tidak produktif untuk subsidi atau transfer. Beberapa sektor atau daerah mungkin memiliki kebutuhan atau potensi yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti sektor sosial atau

daerah tertinggal versus sektor non-sosial atau daerah unggulan. Beberapa program atau proyek publik mungkin memiliki kualitas atau kinerja yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti dirancang dengan baik, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi versus dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan buruk.

Banyak pandangan yang saling bertentangan mengenai dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi Ghosh dan Gregoriou (2008) dan Benos (2009) menyajikan hasil yang berbeda meskipun menggunakan metodologi yang sama. Ghosh dan Gregoriou (2008) menunjukkan bahwa komponen belanja publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan untuk sampel 15 negara berkembang. Sementara itu, Benos (2009) menegaskan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jangka panjang untuk kelompok 14 negara Uni Eropa. Arpaia dan Turini (2008), meneliti tentang hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan hukum Wagner. Hasil analisis Lamartina dan Zaghini (2008) membenarkan teori Wagner, karena koefisien elastisitas pengeluaran publik dibandingkan dengan PDB mengambil nilai di atas par. Temuan tersebut juga menyimpulkan bahwa nilai koefisien elastisitas jangka panjang yang diharapkan lebih tinggi di negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih rendah, menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang dibiayai oleh negara.

Peneliti lain seperti Pieroni (2009) menganalisis pengaruh pengeluaran militer terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa pembelanjaan pertahanan memiliki efek negatif pada pertumbuhan. Benoit (1973) adalah pelopor di bidangnya dan menemukan bahwa pengeluaran militer negara-negara yang kurang berkembang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Asumsi bahwa komponen belanja publik ini dapat berdampak positif bergantung pada sampel, spesifikasi teoretis yang berbeda, dan jangka waktu. McDonald dan Eger (2010) menegaskan bahwa belanja pertahanan memiliki pengaruh yang kecil atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di

sisi lain Pieroni (2009) menyimpulkan bahwa belanja militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Boldeanu dan Tache (2015) menganalisis korelasi antara belanja publik dan pertumbuhan di 30 negara Eropa dengan menggunakan metodologi COFOG. Peneliti tersebut memisahkan setiap komponen pengeluaran publik ke dalam subklasifikasinya dan menggunakan 3 metode statistik untuk menganalisis dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Komponen Perdagangan dan FDI

Komponen perdagangan adalah berbagai jenis barang dan jasa yang dipertukarkan antar negara, seperti barang dagangan, jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder, dan transfer modal. FDI (investasi asing langsung) adalah investasi yang dilakukan oleh entitas yang berbasis di satu negara di perusahaan yang berbasis di negara lain, dengan maksud untuk membangun kepentingan abadi dan tingkat pengaruh atau kendali yang signifikan atas perusahaan tersebut. Komponen perdagangan dan FDI dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia dan alam, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Komponen perdagangan dapat memungkinkan negara untuk berspesialisasi dalam keunggulan komparatif mereka, mengakses pasar yang lebih besar dan lebih beragam, mendapatkan keuntungan dari skala dan ruang lingkup ekonomi, dan mendapatkan input dan output yang lebih murah dan berkualitas lebih baik. FDI dapat memberi negara tambahan modal, teknologi, keterampilan, manajemen, dan akses pasar, yang dapat meningkatkan kapasitas produktif dan daya saing.

Komponen perdagangan dan FDI juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan distorsi dan ketergantungan yang dapat melemahkan potensi pembangunan negara. Komponen perdagangan dapat membuat negara terpapar guncangan eksternal, seperti fluktuasi ketentuan

perdagangan, volatilitas nilai tukar, atau perubahan kebijakan perdagangan. FDI dapat mendesak keluar investasi domestik, menciptakan masalah neraca pembayaran, menghasilkan eksternalitas negatif, atau mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja.

Komponen perdagangan dan FDI juga dapat memiliki efek kondisional terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor dan kebijakan pelengkap yang membentuk dampaknya. Misalnya, komponen perdagangan dan FDI dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada struktur, komposisi, kualitas, dan arah arus perdagangan dan FDI. Beberapa jenis perdagangan dan FDI mungkin memiliki pengembalian atau limpahan yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti perdagangan intra-industri versus antar-industri atau FDI horizontal versus vertikal. Beberapa sektor atau daerah mungkin memiliki kebutuhan atau potensi yang lebih tinggi daripada yang lain, seperti sektor teknologi tinggi versus teknologi rendah atau daerah tertinggal versus unggulan. Beberapa faktor atau kebijakan dapat meningkatkan atau menghambat manfaat perdagangan dan FDI, seperti modal manusia, infrastruktur, institusi, regulasi, atau insentif.

Banyak penelitian yang menganalisis hubungan antara FDI dan komponen perdagangan (ekspor, keterbukaan impor, pembatasan perdagangan) dan pertumbuhan. Sejumlah besar studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya terbuka untuk perdagangan memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat (Barro, 2003). Tekin (2012) menemukan bahwa peningkatan ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Sultan dan Haque (2011) menentukan pengaruh jangka panjang dan langsung antara beberapa faktor penentu perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Simuç dan Meşter (2014) mengidentifikasi korelasi langsung dan kausalitas antara ekspor, keterbukaan dan pertumbuhan ekonomi untuk 10 negara Eropa Timur dan Sultan dan Haque (2011) menemukan bahwa ada hubungan jangka panjang antara ekspor dan pertumbuhan di India. Pengaruh perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah telah dianalisis oleh banyak peneliti.

3. Penentu non-ekonomi

Determinan non-ekonomi adalah faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan produksi dan distribusi barang dan jasa, tetapi dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan pembangunan suatu negara. Penentu non-ekonomi dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan modal manusia dan sosial, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Budaya, agama, keluarga, dan bahasa dapat membentuk nilai, keyakinan, norma, dan perilaku individu dan kelompok, yang dapat memengaruhi motivasi, kreativitas, inovasi, kerja sama, kepercayaan, dan pembelajaran mereka. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat meningkatkan produktivitas, kemampuan kerja, dan pendapatan mereka.

Penentu non-ekonomi juga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan hambatan dan konflik yang dapat melemahkan potensi pembangunan suatu negara. Sebagai contoh, kelas, tradisi, individualisme, ketergantungan, dan korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan, inefisiensi, kekakuan, ketergantungan, dan perilaku mencari rente yang dapat mengurangi insentif dan peluang kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan politik, kekerasan, dan perang dapat merusak infrastruktur, mengganggu institusi, menggusur populasi, dan mengalihkan sumber daya dari penggunaan produktif.

Penentu non-ekonomi juga dapat memiliki efek kondisional pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada adaptasi dan integrasi berbagai faktor dan pelaku. Kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasinya. Globalisasi dan integrasi regional dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat keterbukaan, daya saing, saling melengkapi, dan kerjasama antar negara.

Arusha (2009) menguji peran tata kelola terhadap pertumbuhan ekonomi untuk 71 negara maju, berkembang, dan transisi antara tahun 1996 dan 2003. Arusha menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola yang tinggi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara dengan tata kelola yang lemah. Penentu penting dalam literatur adalah kerangka kelembagaan negara. Peran lembaga mulai diakui oleh temuan Ayres (1962) dan setelah awal tahun 90-an dengan penelitian yang dilakukan oleh Acemoglu et al. (2002). Rodrik (2000) menyatakan bahwa lima jenis kerangka kelembagaan (hak milik, lembaga regulasi, lembaga stabilisasi ekonomi makro, lembaga asuransi sosial dan lembaga manajemen konflik) dapat memiliki hasil langsung pada pertumbuhan dan determinan pertumbuhan ekonomi lainnya. Mauro (1995) menyatakan bahwa korupsi cenderung berdampak negatif pada satu pertumbuhan dengan mempengaruhi inovasi dan aktivitas *start up* lainnya dan dapat menurunkan produktivitas. Dalam hal inovasi, korupsi membatasi pengusaha baru untuk memasuki pasar.

C. DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi memiliki berbagai dampak pada berbagai aspek masyarakat dan ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pertumbuhan ekonomi:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi sering mengarah pada perluasan industri dan bisnis, menghasilkan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, yang mengarah pada peningkatan standar hidup dan pengurangan kemiskinan (Acemoglu & Robinson, 2012). Hubungan antara peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi umumnya bersifat positif dan saling menguatkan. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan produksi barang dan jasa, yang membutuhkan lebih banyak input tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak

permintaan akan pekerja. Peningkatan kesempatan kerja berarti lebih banyak orang memiliki pendapatan untuk dibelanjakan pada konsumsi, yang meningkatkan permintaan agregat dan merangsang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun, kekuatan hubungan ini dapat bervariasi antar negara dan dari waktu ke waktu, bergantung pada faktor-faktor seperti pertumbuhan produktivitas, lembaga pasar tenaga kerja, perubahan struktural, dan kebijakan ekonomi makro. Misalnya, pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dapat mengurangi elastisitas lapangan kerja dari pertumbuhan ekonomi, yang berarti lebih banyak output dapat diproduksi dengan input tenaga kerja yang lebih sedikit. Sebaliknya, pertumbuhan produktivitas yang lebih rendah dapat meningkatkan elastisitas lapangan kerja dari pertumbuhan ekonomi, yang berarti lebih banyak input tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang sama. Oleh karena itu, hubungan antara peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi tidak bersifat tetap atau linier, melainkan bersifat dinamis dan kompleks.

2. Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketika ekonomi tumbuh, maka akan menghasilkan tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi bagi individu dan rumah tangga. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan standar hidup, akses ke perawatan kesehatan yang lebih baik, pendidikan, dan layanan dasar lainnya, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Barro & Sala-i-Martin, 2003). Pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi dapat dilihat sebagai sebab dan akibat dari pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi, investasi, inovasi, produktivitas, dan sumber daya manusia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dapat memungkinkan pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi dengan meningkatkan output, lapangan kerja, pendapatan pajak, layanan publik, dan pembangunan ekonomi. Namun, pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi tidak selalu mengarah pada pertumbuhan

ekonomi, juga tidak selalu dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pendapatan, taraf hidup dan pertumbuhan, seperti distribusi pendapatan, kualitas kelembagaan, tingkat ketimpangan, tingkat keterbukaan, ketersediaan sumber daya alam, dampak lingkungan dari pertumbuhan. Dan norma sosial budaya.

3. Kemajuan Teknologi

Pertumbuhan ekonomi sering mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Ketika bisnis dan industri berkembang, mereka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada penciptaan dan adopsi teknologi baru. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut (Jones, 2016). Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan produksi barang dan jasa yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih murah dengan input yang sama atau lebih sedikit. Mereka juga dapat merangsang inovasi, akumulasi modal, pengembangan modal manusia, daya saing internasional dan perdagangan. Selain itu, kemajuan teknologi dapat menciptakan pekerjaan baru dan lebih baik, meningkatkan layanan publik, meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kemajuan teknologi dengan meningkatkan profitabilitas, insentif, dan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, mengadopsi teknologi baru, dan menginovasi produk dan proses baru. Ini juga dapat menciptakan putaran umpan balik positif antara pertumbuhan dan teknologi, karena pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang baru dan lebih baik, yang pada gilirannya memacu kemajuan teknologi lebih lanjut. Namun, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan tantangan dan risiko bagi pertumbuhan ekonomi. Mereka dapat mengganggu dan memerlukan transisi yang sulit bagi pekerja, perusahaan, dan sektor yang mungkin tergeser atau

menjadi usang oleh teknologi baru. Mereka juga dapat memperparah ketimpangan, konsentrasi pasar, hasil pemenang ambil semua, dan masalah sosial dan lingkungan jika tidak disertai dengan kebijakan dan institusi yang tepat. Selain itu, kemajuan teknologi dapat menghadapi pengembalian yang semakin berkurang, kegagalan pasar, hambatan institusional, dan limpahan global yang dapat membatasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat otomatis atau terjamin, melainkan bersifat kondisional dan kontekstual. Itu tergantung pada bagaimana teknologi dikembangkan, disebarkan, diadopsi, dan digunakan di berbagai sektor, wilayah, dan negara. Itu juga tergantung pada bagaimana kebijakan dan institusi mendukung dan mengatur teknologi untuk memastikan efek positifnya pada pertumbuhan dimaksimalkan dan efek negatifnya diminimalkan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi dapat memfasilitasi investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, sistem energi, dan fasilitas komunikasi. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya transportasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan perdagangan (World Bank, 2017). Perbaikan infrastruktur adalah investasi dalam aset fisik seperti jalan, jembatan, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jalur transmisi, dan jaringan telekomunikasi yang mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian. Hubungan antara peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan beragam.

Secara langsung sebagai faktor input: Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas input modal dan tenaga kerja dalam proses produksi, sehingga menghasilkan output dan produktivitas yang lebih tinggi. Misalnya, jalan yang lebih baik dapat mengurangi biaya dan waktu transportasi, memungkinkan lebih banyak barang dikirim ke pasar dan lebih banyak pekerja

mengakses pekerjaan. Pasokan listrik yang lebih baik dapat mengurangi pemadaman listrik dan memungkinkan penggunaan mesin dan peralatan yang lebih efisien. Jaringan telekomunikasi yang lebih baik dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan inovasi.

Secara tidak langsung dengan meningkatkan produktivitas dan efek jaringan: Perbaikan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi lainnya dengan menciptakan eksternalitas atau luapan positif. Misalnya, infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan keuangan, yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat menciptakan efek jaringan dengan menghubungkan berbagai wilayah, sektor, dan agen, yang dapat meningkatkan ukuran pasar, persaingan, dan spesialisasi.

Secara strategis dan transformatif: Perbaikan infrastruktur juga dapat memiliki dampak strategis dan transformatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian. Misalnya, infrastruktur yang lebih baik dapat mendukung pengembangan industri baru, seperti energi terbarukan atau layanan digital, atau transisi ke ekonomi rendah karbon atau sirkular. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat mendukung inklusi sosial dan kelestarian lingkungan dengan meningkatkan akses ke layanan dasar dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi.

5. Tantangan Lingkungan

Sementara pertumbuhan ekonomi membawa banyak manfaat, hal itu juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Peningkatan tingkat produksi dan konsumsi dapat menyebabkan tingkat polusi, penggundulan hutan, dan penipisan sumber daya yang lebih tinggi. Penting untuk mengadopsi praktik dan kebijakan berkelanjutan untuk memitigasi tantangan lingkungan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Stern, 2016). Tantangan lingkungan adalah ancaman dan masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dan

fenomena alam terhadap lingkungan alam dan kesejahteraan manusia. Beberapa tantangan lingkungan utama termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, penggundulan hutan, pengurangan, dan bencana alam. Hubungan antara tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan dinamis.

Secara negatif dengan mengurangi produktivitas dan kesejahteraan: Tantangan lingkungan dapat berdampak buruk pada produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia dan alam, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, perubahan iklim dapat menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan gagal panen, yang dapat merusak infrastruktur, mengganggu rantai pasokan, dan mengurangi hasil pertanian. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengurangi jasa ekosistem, seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan penjernihan air, yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan manusia. Pencemaran udara dan air dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penyakit pernafasan, kanker, dan kematian dini, yang dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan.

D. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Investasi dalam modal fisik dan manusia, kemajuan teknologi, inovasi, dan kebijakan yang menguntungkan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan keuangan publik, dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pembuat kebijakan harus fokus pada strategi yang memprioritaskan pendidikan, R&D, lingkungan yang ramah bisnis, dan pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ruang lingkup pertumbuhan ekonomi mencakup pengukuran dan analisis perubahan dalam produksi barang dan jasa ekonomi dari waktu ke

waktu. Ini melibatkan pemahaman pendorong pertumbuhan, seperti akumulasi modal fisik dan manusia, kemajuan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi memiliki implikasi yang signifikan bagi individu, bisnis, dan masyarakat, mulai dari peningkatan standar hidup hingga peningkatan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berupaya menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2009). *Introduction to modern economic growth*. Princeton NJ: Princeton University Press
- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (2019). *Economics (2nd ed.)*. Pearson.
- Acemoglu, D, Simon J, & James R. (2002). Reversal of fortune: geography and institutions in the making of the modern world income distribution. *Quarterly Journal of Economics*, 117(4): 1231–1294.
- Arpaia A., & Alessandro T. (2008). Government Expenditure and Economic Growth in the EU: Long-Run Tendencies and Short-Term Adjustment. *SSRN Working Paper Series*, 300: 800–844.
- Arusha, C.V. (2009). Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *Comparative Economic Studies*, 51(3): 401-418.
- Benos, Nikos. (2009). *Fiscal policy and economic growth: empirical evidence from EU countries*. University of Ioannina.
- Boldeanu, F.T., & Ileana T. (2015). Public expenditures by subdivision and economic growth in Europe. *BASIQ 2015 Proceedings*, Bucharest.
- Barro, R.J. (2003). Determinants of economic Growth in a Panel of Countries. *Annals of Economics and Finance*, 4(2): 231-274.
- Ghosh, Sugata, & Andros G. (2008). The composition of government spending and growth: Is current or capital spending better? *Oxford Economic Papers*, 60(3): 484-516.
- Jones, C. I. (2018). *Macroeconomics (4th ed.)*. W. W. Norton & Company.

- Lipsey, R. G., & Crystal, A. (2011). *Principles of Economics (12th ed.)*. Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Macroeconomics (7th ed.)*. Cengage Learning.
- Mauro, Paolo. (1995). Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 110: 681-712
- McDonald, Bruce D., and Robert J. Eger. (2010). The Defense-Growth Relationship: An Economic Investigation into Post-Soviet States. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 12(1): 1–26.
- Pieroni, L. (2009). Military expenditure and economic growth. *Defence and Peace Economics*, 20(4): 327-339.
- Weil, D. N. (2013). *Economic Growth (3rd ed.)*. Pearson.
- World Bank (2020). Data Bank: World Development Indicators. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&Topic=21>

Profil Penulis

Muhammad Rusydi



Dr. Muhammad Rusydi, M. Si., lahir di Soppeng 8 Oktober 1960. Pendidikan (S1) di Universitas Hasanuddin Makassar, FE Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 1986, Program Magister (S2) tahun 1997 di PPS Unhas, Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, dan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di PPS Unhas, lulus pada tahun 2014.

Sejak tahun 1987 sampai sekarang, DPK pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Jabatan Lektor Kepala. Beberapa jabatan yang pernah dimanahkan: Ketua Jurusan

IESP Fekon Unismuh Makakassar (2000-2004), Wakil Dekan I Fekon Unismuh Makassar (2005-2013), Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar (2010-2014). Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan, di antaranya: *The Role of Leadership in Supporting Competence and Achievement of Lectures Kopertis Region IX of Private Lecture Kopertis IX Sulawesi* (2017), *Analysis of Motivation, Work Discipline and Organization Culture on the Transformational Leadership and Work Performance of LLDIKTI Lecturers in Region IX: The Role of Empowerment Intervention* (2022). Buku: *Manajemen SDM: Teori dan Aplikasi di Perguruan Tinggi* (2018), dan *Manajemen Bisnis Modern Model Muhammad SAW* (2023).

BAB VI

KESEIMBANGAN

UMUM PASAR UANG

DAN PASAR BARANG

Dr. Muhammad Fahreza W, S.Pd, M.Pd



A. KONSEP KESEIMBANGAN UMUM

Teori keseimbangan umum (General Equilibrium Theory) adalah teori dalam ekonomi yang berfokus pada interaksi antara berbagai pasar di dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana keseimbangan di satu pasar dapat mempengaruhi keseimbangan di pasar lainnya. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi terkemuka seperti Léon Walras, Vilfredo Pareto, dan Arrow-Debreu.

Teori keseimbangan umum mencoba untuk menjelaskan bagaimana pasar dapat mencapai keseimbangan di mana penawaran dan permintaan di setiap pasar seimbang dan harga mengalami penyesuaian sehingga semua barang dan jasa dapat diproduksi dan dikonsumsi dengan efisien. Teori ini melibatkan model matematika yang kompleks untuk menjelaskan hubungan antara pasar yang berbeda dan menentukan keseimbangan umum di dalam sistem ekonomi secara keseluruhan.

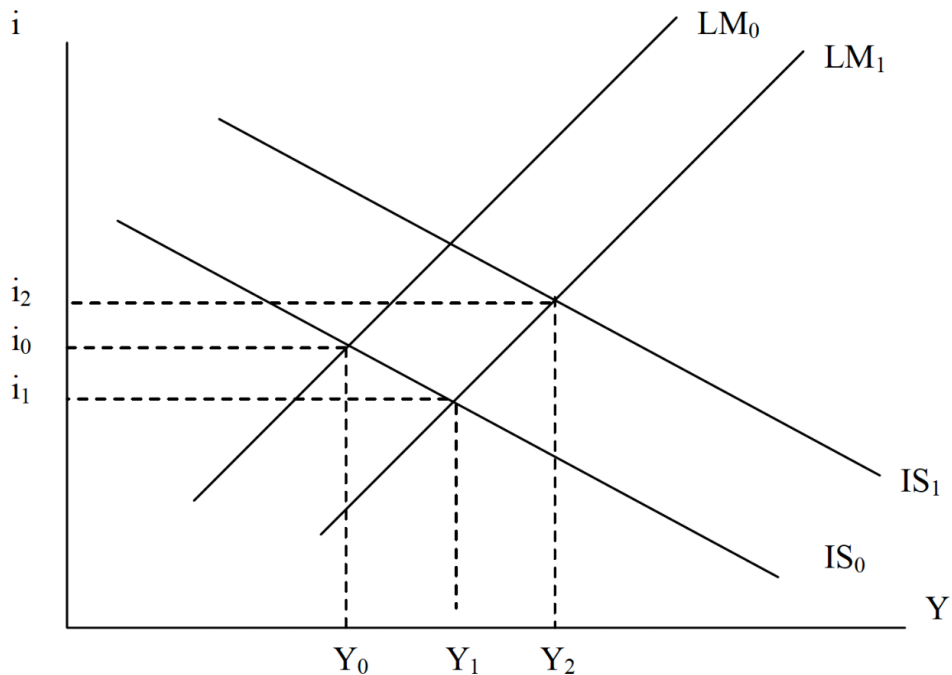
Salah satu konsep utama dalam teori keseimbangan umum adalah konsep utilitas dan pembatasan anggaran. Konsep utilitas menjelaskan preferensi konsumen terhadap barang dan jasa yang berbeda, sedangkan pembatasan anggaran menjelaskan sumber daya finansial yang tersedia untuk konsumen. Dengan memadukan konsep utilitas dan pembatasan anggaran, teori keseimbangan umum menghasilkan model matematika yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pasar dan mencapai keseimbangan umum di dalam sistem ekonomi.

Teori keseimbangan umum juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara berbagai pasar dapat mempengaruhi alokasi sumber daya secara keseluruhan. Teori ini menekankan pentingnya harga dan pasar dalam menentukan alokasi sumber daya dan produksi. Dengan menggunakan model matematika, teori keseimbangan umum dapat membantu analis ekonomi untuk memprediksi hasil dari kebijakan ekonomi yang berbeda, seperti perubahan pajak, subsidi, atau regulasi pasar.

Keseimbangan umum terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dari keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Seperti penjelasan pada bab yang terdahulu, keseimbangan pasar barang dicerminkan oleh Kurva IS dan keseimbangan pasar uang dicerminkan oleh Kurva LM

1. Keseimbangan Umum IS-LM

Kurva IS adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor riil atau pasar barang. Slope (kemiringan) dari kurva ini adalah negatif. Sementara itu kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor keuangan atau pasar uang. Slope kurva LM adalah positif. Kedua kurva akan berpotongan pada satu titik.



Gambar 1. Keseimbangan IS-LM

Pada awalnya, keseimbangan terjadi pada saat kurva IS_0 dan kurva LM_0 saling berpotongan. Keseimbangan ini menghasilkan tingkat bunga keseimbangan (i_0) dengan pendapatan nasional keseimbangan (Y_0).

Adanya easy money policy, menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Bertambahnya jumlah uang beredar menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dari LM_0 ke LM_1 . Akibatnya keseimbangan baru terbentuk. Di keseimbangan yang baru, pendapatan nasional keseimbangan menjadi Y_1 dan suku bunga keseimbangan menjadi i_1 .

Adanya pertambahan jumlah uang beredar menyebabkan suku bunga di pasar menjadi turun. Turunnya suku bunga menyebabkan investasi bertambah dan akibatnya kurva IS bergeser ke kanan menuju ke IS_1 . Pergeseran kurva IS menyebabkan keseimbangan berubah kembali menjadi i_1 dan Y_1 . Banyaknya permintaan dana untuk investasi menyebabkan suku bunga menjadi semakin mahal dan naik.

2. Perhitungan Keseimbangan IS-LM

Secara matematis keseimbangan IS-LM dapat dilakukan sebagai berikut:

Contoh:

Diketahui,

$$C = 100 + 0,75YI = 60 - 200i$$

$$M_s = 500$$

$$M_d = 0,2Y + 428 - 400i$$

Ditanya: keseimbangan umum IS-LM

Jawab:

$$Y = C + I$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200i \quad Y - 0,75Y = 160 - 200i \quad 0,25Y = 160 - 200i$$

$$Y = 640 - 800i \quad \text{(Keseimbangan pasar barang)}$$

$$M_s = M_d$$

$$500 = 0,2Y + 428 - 400i$$

$$0,2Y = 72 + 400i$$

$$Y = 360 + 2000i \quad \text{(Keseimbangan pasar uang)}$$

Keseimbangan umum IS = LM

$$640 - 800i = 360 + 2000i$$

$$2800i = 280$$

$$i = 0,1 \text{ atau } 10\%$$

$$Y = 640 - 800i$$

$$Y = 640 - 800(0,1)$$

$$Y = 560$$

Jadi pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560.

3. Pergeseran Kurva IS

Apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya (G) sebesar 20, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Maka keseimbangan yang baru adalah

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200i + 20Y - 0,75Y = 180 - 200i$$

$$0,25Y = 180 - 200i$$

$$Y = 720 - 800i$$

Barang)

(Keseimbangan di Pasar

Apabila kurva LM tetap, maka keseimbangan umum menjadi: $IS = LM$
 $720 - 800i = 360 + 2000i$

$$2800i = 360$$

$$i = 0,129$$

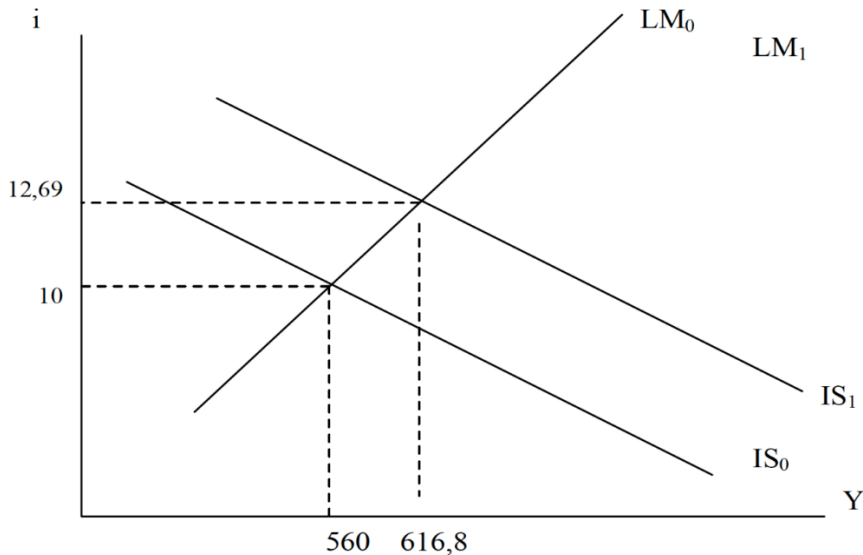
$$Y = 720 - 800i$$

$$Y = 720 - 800(0,129)$$

$$Y = 720 - 103,2$$

$$Y = 616,8$$

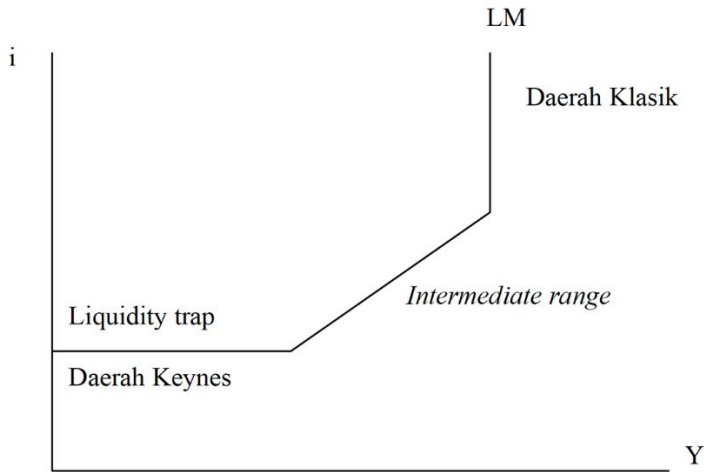
Naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 20, menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik menjadi 12,9% dan pendapatan nasional keseimbangannya naik menjadi 616,8.



Gambar 2. Pergeseran Kurva IS terhadap Keseimbangan IS-LM

B. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

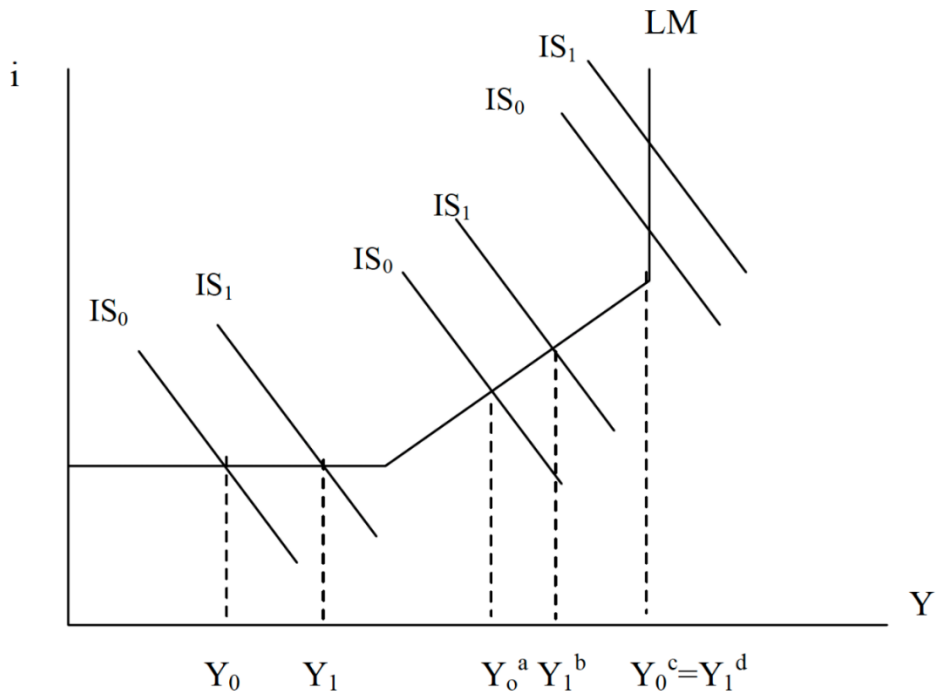
Dalam melihat efektivitas kebijakan kita membandingkannya pada 3 daerah yaitu daerah klasik, intermediate range dan daerah Keynes. Jika digambarkan, maka bentuk kurva LM menjadi seperti berikut ini.



LM

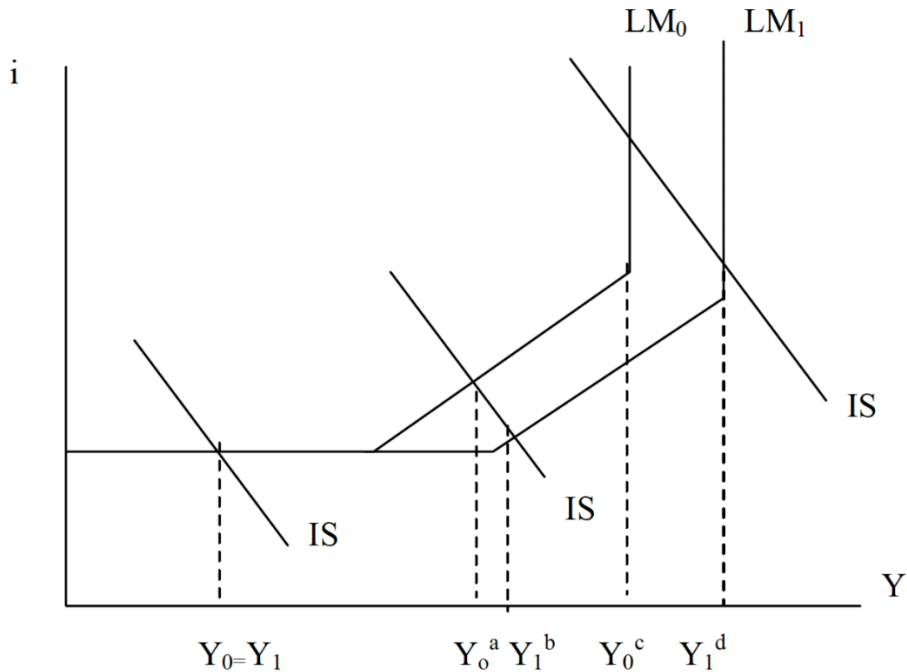
Gambar 3. Kurva LM

Daerah liquidity trap merupakan daerah yang idenya pertama sekali dikemukakan oleh Keynes. Keynes menganggap ada satu daerah pada kurva LM yang memiliki tingkat bunga yang sangat rendah dan tidak mungkin turun lagi. Daerah inilah yang disebut daerah liquidity trap. Sementara itu daerah klasik memiliki kurva LM yang tegak lurus. Hal ini dikarenakan pemahaman kaum klasik bahwa dalam teori permintaan uang, permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Menurut paham ini, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Karena tidak ada hubungannya dengan suku bunga, maka kurva LM bentuknya tegak lurus. Daerah intermediate range adalah daerah yang menunjukkan kurva LM dipengaruhi oleh suku bunga. Untuk melihat keefektifan kebijakan ekonomi dapat kita lihat pada gambar berikut



Gambar 4. Efektivitas Kebijakan Fiskal

Gambar di atas menunjukkan apabila kurva IS bergeser ke kanan berarti kebijakan fiskal ekspansif. Jika kita perhatikan pada masing-masing daerah, kebijakan fiskal sangat efektif pada daerah Keynesian dan efektif pada daerah *intermediate range*. Hal ini terlihat dari besarnya perubahan keseimbangan pendapatan nasional di daerah Keynesian. Sementara itu, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif pada daerah klasik. Ketika ada kebijakan fiskal, keseimbangan pendapatan nasional tidak berubah.



Gambar 5.. Efektivitas Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ekspansif ditandai dengan bergesernya kurva LM dari LM_0 ke LM_1 . Apabila dibandingkan pada ketiga daerah maka kebijakan moneter sangat efektif di daerah klasik dan efektif pada daerah *intermediate*. Sementara itu, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif pada daerah Keynesian.

C. KRITIK TERHADAP TEORI KESEIMBANGAN UMUM

Teori keseimbangan umum juga memiliki beberapa kritik. Kritik utama terhadap teori ini adalah bahwa model matematika yang digunakan terlalu kompleks dan abstrak, sehingga sulit untuk diaplikasikan pada situasi dunia nyata. Beberapa ahli ekonomi juga mengkritik teori keseimbangan umum

karena mengabaikan pentingnya informasi asimetris, yang dapat mempengaruhi perilaku pasar.

Meskipun demikian, teori keseimbangan umum tetap menjadi teori penting dalam ekonomi modern. Teori ini memiliki aplikasi luas dalam analisis ekonomi dan membantu analis ekonomi untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi sistem ekonomi secara keseluruhan.

Beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi sudah tercapai antara lain:

1. Pasar berjalan dengan efisien: Keseimbangan ekonomi menciptakan efisiensi pasar, di mana harga mencerminkan nilai sebenarnya dan jumlah pasokan sama dengan jumlah permintaan.
2. Tidak ada kelangkaan barang: Keseimbangan ekonomi berarti bahwa tidak ada barang atau jasa yang sangat kurang atau terlalu banyak sehingga harga dan permintaan menjadi tidak stabil.
3. Tidak ada tekanan inflasi atau deflasi: Dalam keseimbangan ekonomi, tidak ada tekanan inflasi atau deflasi yang signifikan karena harga mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang seimbang.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Keseimbangan ekonomi akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi, dan memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang.
5. Terdapat stabilitas keuangan: Dalam keseimbangan ekonomi, sistem keuangan stabil dan tidak terjadi ketidakseimbangan keuangan dalam jangka panjang.
6. Tidak ada pengaruh eksternal yang signifikan: Keseimbangan ekonomi akan terjadi ketika faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis ekonomi global tidak mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri secara signifikan.

7. Tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi: Keseimbangan ekonomi juga tercapai ketika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi atau kebijakan publik yang dapat memengaruhi kondisi pasar atau stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, keseimbangan ekonomi merupakan suatu kondisi yang ideal di mana terdapat stabilitas harga dan pasokan yang menciptakan efisiensi pasar, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Namun, mencapai keseimbangan ekonomi yang stabil bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2, BPFE, Yogyakarta, 1997
- Dulio, Eugene A., Teori Makroekonomi, Erlangga, Jakarta 1991
- Case & Fair, Principle of Macroeconomics, Prentice Hall, New Jersey, 1999
- Blanchard, Olivier, Macroeconomics, Prentice Hall, Singapore, 2003
- Wonnacott, Paul, Macroeconomics, Irwin, 1984
- Mankiw, N. Gregory, Principles of Macroeconomics, Thomson South Western, United States, 2004
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, Macroeconomics, McGraw-Hill, 2001

Profil Penulis
Muhammad Fahreza



Lahir di Ujung Pandang 21 Januari 1985. Penulis Menempuh Pendidikan Sarjana pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Makassar dan Lulus pada Tahun 2007. Tahun 2009, Penulis Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Magister pada Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dan lulus pada Tahun 2011. Tahun 2015 Penulis melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Doktor pada Program Studi Pendidikan Ekonomi dan lulus pada tahun 2020. Menjadi tenaga Pendidik Dosen pada Tahun 2008 sampai sekarang di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia Makassar yang sekarang telah beralih status menjadi Universitas Patempo Makassar sejak Tahun 2022. Mata Kuliah yang sering di ampu adalah Ekonomika Makro dan Mikro serta Ekonomi Internasional. Aktif menulis publikasi pada jurnal bereputasi nasional dan internasional serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.



BAB VII KESEIMBANGAN UMUM PASAR UANG



DAN BARANG

Naidah, M.Si.



A. PENDAHULUAN

Ada beberapa pembahasan yang diperlukan sebelum menganalisis keseimbangan umum makro ekonomi dalam suatu perekonomian, yaitu analisis keseimbangan pasar uang (analisis kurva LM) dan analisis pasar keseimbangan pasar barang (analisis kurva IS). Dalam pembahasan ini secara berturut-turut akan dibahas analisis keseimbangan uang (LM) dan kemudian dilanjutkan dengan analisis keseimbangan pasar barang (IS).

Untuk memperoleh gambaran tentang kurva LM (keseimbangan di pasar uang), terlebih dahulu akan dianalisis mengenai permintaan uang dan penawaran uang.

B. KESEIMBANGAN DI PASAR UANG (ANALISIS KURVA LM)

Kurva LM adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat bunga dengan produk nasional yang menjamin keseimbangan di pasar uang. Untuk memperoleh gambaran tentang kurva LM (keseimbangan di pasar uang), terlebih dahulu dianalisis permintaan uang dan penawaran uang.

C. PERMINTAAN UANG

Menurut Keynes bahwa ada tiga motif mengapa orang ingin memiliki uang, yaitu:

1. Motif transaksi
2. Motif berjaga-jaga
3. Motif spekulasi

Ketiga motif tersebut, dapat diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$L = L_1 + L_2 \quad \text{di mana}$$

L = Jumlah uang yang diminta

L_1 = Total dari jumlah uang yang diminta untuk transaksi dan berjaga-jaga.

Kedua motif ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ; $L_1 = f (Y)$

L_2 = Jumlah uang yang diminta dengan motif spekulasi, dan dipengaruhi oleh tingkat bunga ; $L_2 = f (r)$.

Variabel L_1 dan L_2 , dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sbb:

$L_1 = kY$, di mana k adalah suatu angka menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah uang yang diminta untuk transaksi dan berjaga-jaga dengan perubahan pendapatan, dan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$k = \frac{\Delta L_1}{\Delta Y}$$

Sedangkan L_2 yang merupakan fungsi dari tingkat bunga dapat diformulasi sbb

$$L_2 = L_0 + Nr \quad ; \text{dimana}$$

L_0 = Besarnya permintaan uang untuk spekulasi pada tingkat bunga nol.

N = Suatu angka menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah uang yang diminta untuk spekulasi dengan perubahan tingkat bunga dimana formulasinya sbb:

$$N = \frac{\Delta L_2}{\Delta r} \quad ; \text{dimana nila } N < 0 \text{ (negatif)}$$

Apabila formula L_1 dan L_2 disubtitusi ke dalam persamaan $L = L_1 + L_2$ maka akan diperoleh formulasi sbb :

$$L = k.Y + (L_0 - Nr)$$

D. PENAWARAN UANG

Jumlah uang yang ditawarkan dalam suatu periode adalah jumlah uang yang beredar pada periode tersebut. Variabel penawaran uang (M) diasumsikan sebagai variabel eksogen atau $M_s = M$. Dengan demikian, keseimbangan di pasar uang dapat diformulasikan sbb:

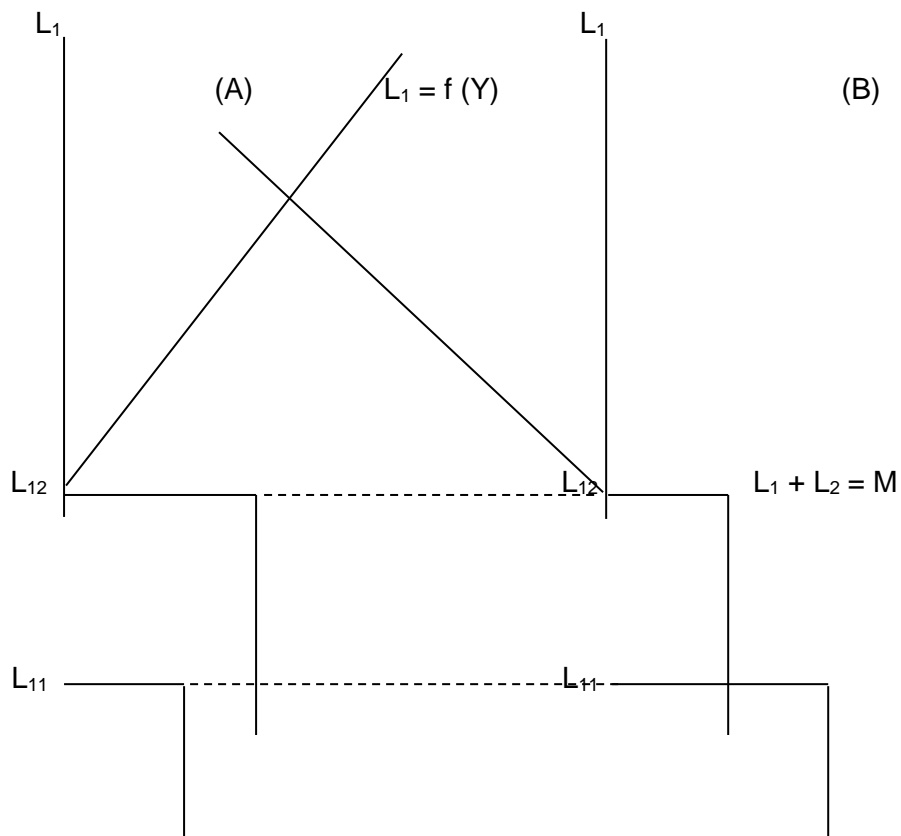
$$L = M$$

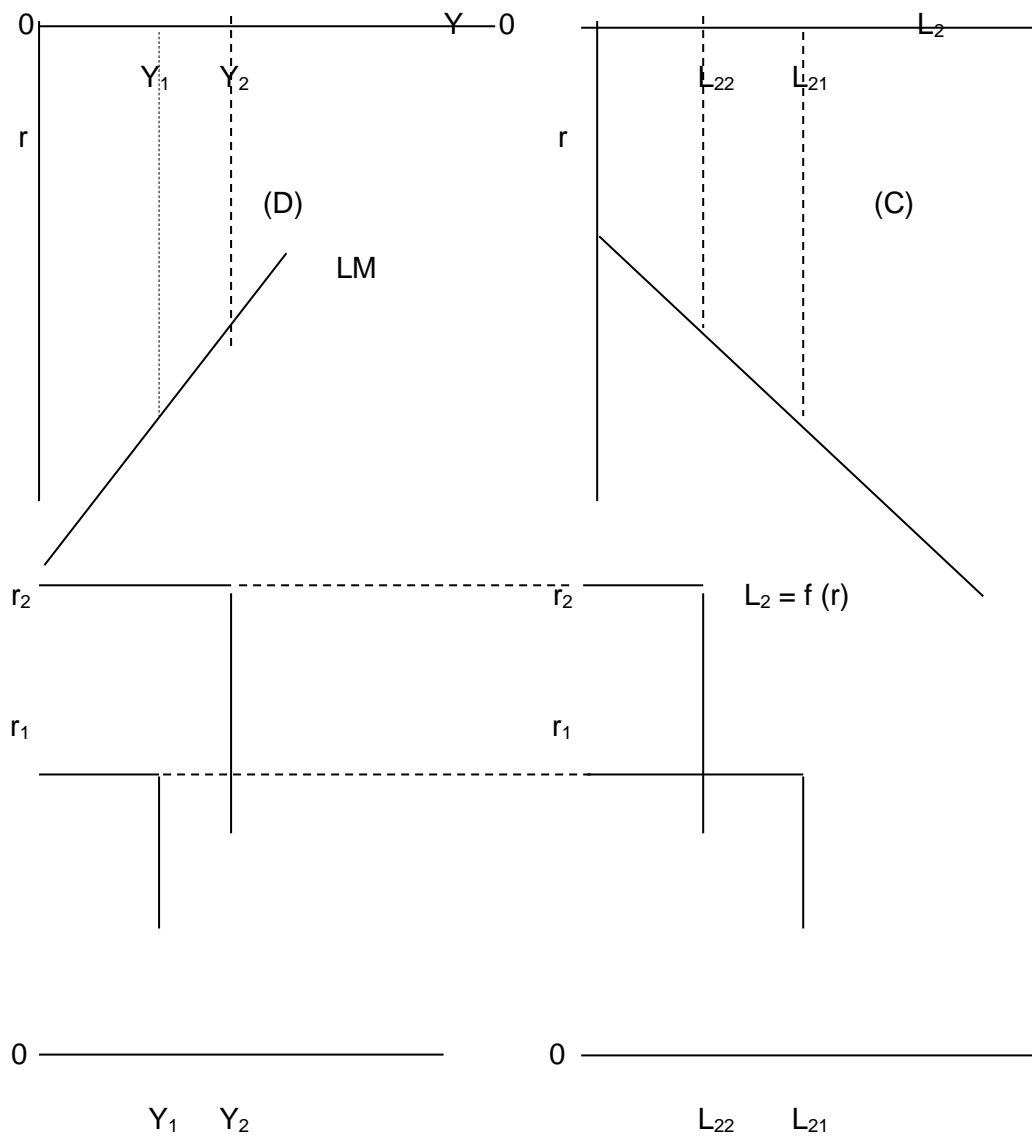
$$k.Y + L_0 - Nr = M$$

$$k.Y = M - L_0 + Nr$$

$$Y = \frac{M - L_0}{k} + \frac{Nr}{k}$$

Selanjutnya, kurva LM (keseimbangan di pasar uang) dapat diturunkan melalui penurunan tiga buah grafik seperti berikut:





Keterangan:

Gambar (A), kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan (Y) dengan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga (L_1). Gambar (B), kurva yang menjamin keseimbangan di pasar uang, dimana $L_1 + L_2 + M$. Gambar (C), kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga (r) dengan permintaan uang untuk spekulasi (L_2). Gambar (D), kurva yang diperoleh dari penurunan tiga buah grafik (yaitu grafik A, B, dan C). Kurva ini disebut kurva LM yaitu kurva yang menghubungkan berbagai tingkat bunga (r) dengan tingkat pendapatan (Y).

Selanjutnya, bila permintaan uang untuk spekulasi sebesar L_{21} ingin dicapai, maka tingkat bunga harus sebesar r_1 (gambar C). Dengan demikian, pada tingkat bunga r_1 , maka pendapatan nasional sebesar Y_1 . (Gambar D).

Pendekatan Matematika:

Contoh:

Y	L_1	R	L_2
0	0	0	90
125	25	0,05	50

Apabila jumlah uang yang beredar sebesar 300, maka persamaan kurva LM dapat diperoleh sebagai berikut:

$$L = M$$

$$L = kY + (L_0 - Nr) \quad k = \Delta L_1 : \Delta Y$$

$$k = 25 : 125 = 0,20Y$$

$$L_0 = 90$$

$$N = \Delta L_2 : \Delta r$$

$$N = (50 - 90) : (0,05 - 0)$$

$$N = - 800.$$

Jadi persamaan permintaan uang adalah : $L = 0,20Y + 90 - 800r$

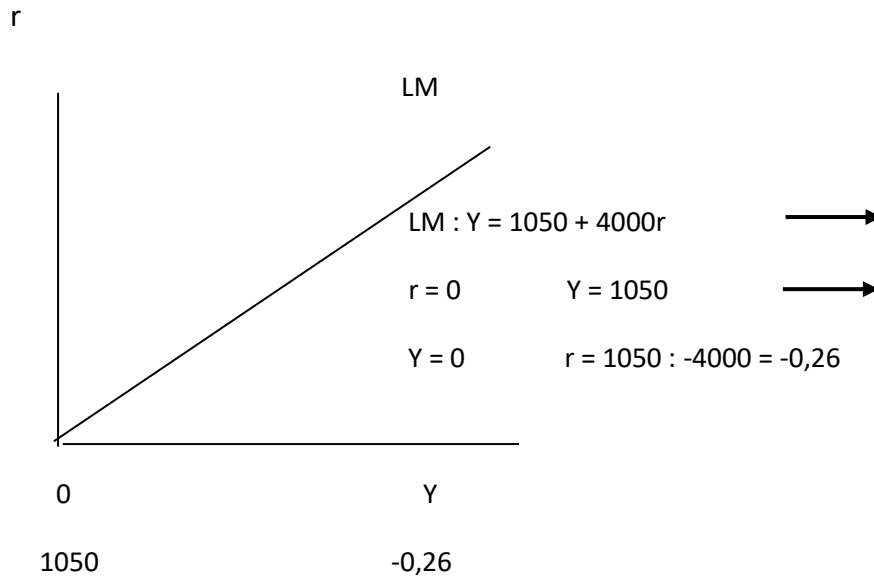
Bila jumlah uang yang beredar (M) = 300, maka persamaan kurva LM adalah

$$0,20Y + 90 - 800r = 300$$

$$0,20Y = 300 - 90 + 800r$$

$$Y = \frac{300 - 90}{0,20} + \frac{800r}{0,20}$$

$$Y = 1050 + 4000r \text{ (persamaan kurva LM)}$$



Bila $L_1 = 0,20Y$; $L_2 = 90 - 800r$; $M = 300$; maka persamaan kurva LM : $Y = 1050 + 4000r$

Pada tingkat bunga 5% $\longrightarrow L_2 = 90 - 800(0,05)$

$$L_2 = 50$$

$$L_1 = 300 - 50 = 250$$

$$Y = L_1 : k$$

$$Y = 250 : 0,20 = 1250 \quad \text{atau}$$

$$Y = 1050 + 4000(0,05)$$

$$Y = 1250$$

Pada tingkat bunga 6% $\rightarrow L_2 = 90 - 800 (0,06)$

$$L_2 = 42$$

$$L_1 = 300 - 42 = 258$$

$$Y = L_1 : k$$

$$Y = 258 : 0,20 = 1290 \quad \text{atau}$$

$$Y = 1050 + 4000 (0,06)$$

$$Y = 1290$$

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPANGARUHI KURVA LM:

1. Jumlah Uang Yang Beredar (M)

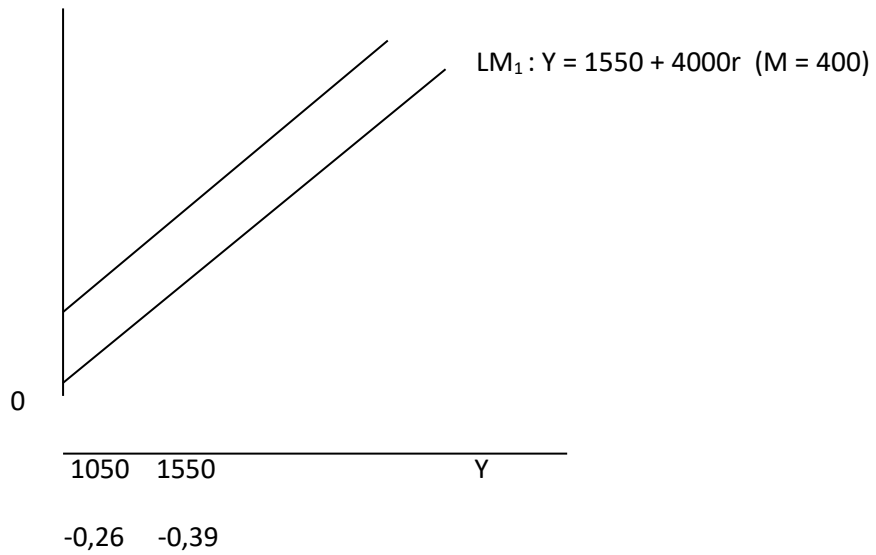
Berdasarkan data pada contoh di atas, dengan jumlah uang yang beredar (M) 300, persamaan kurva LM adalah $Y = 1050 + 4000r$. Apabila jumlah uang yang beredar (M) bertambah menjadi 400, maka persamaan kurva LM yang baru adalah:

$$Y = \frac{M - L_0}{k} + \frac{Nr}{k}$$

$$Y = \frac{400 - 90}{0,20} + \frac{800r}{0,20}$$

$$Y = 1550 + 4000r$$

$$LM_1 : Y = 1050 + 4000r \quad (M = 300)$$



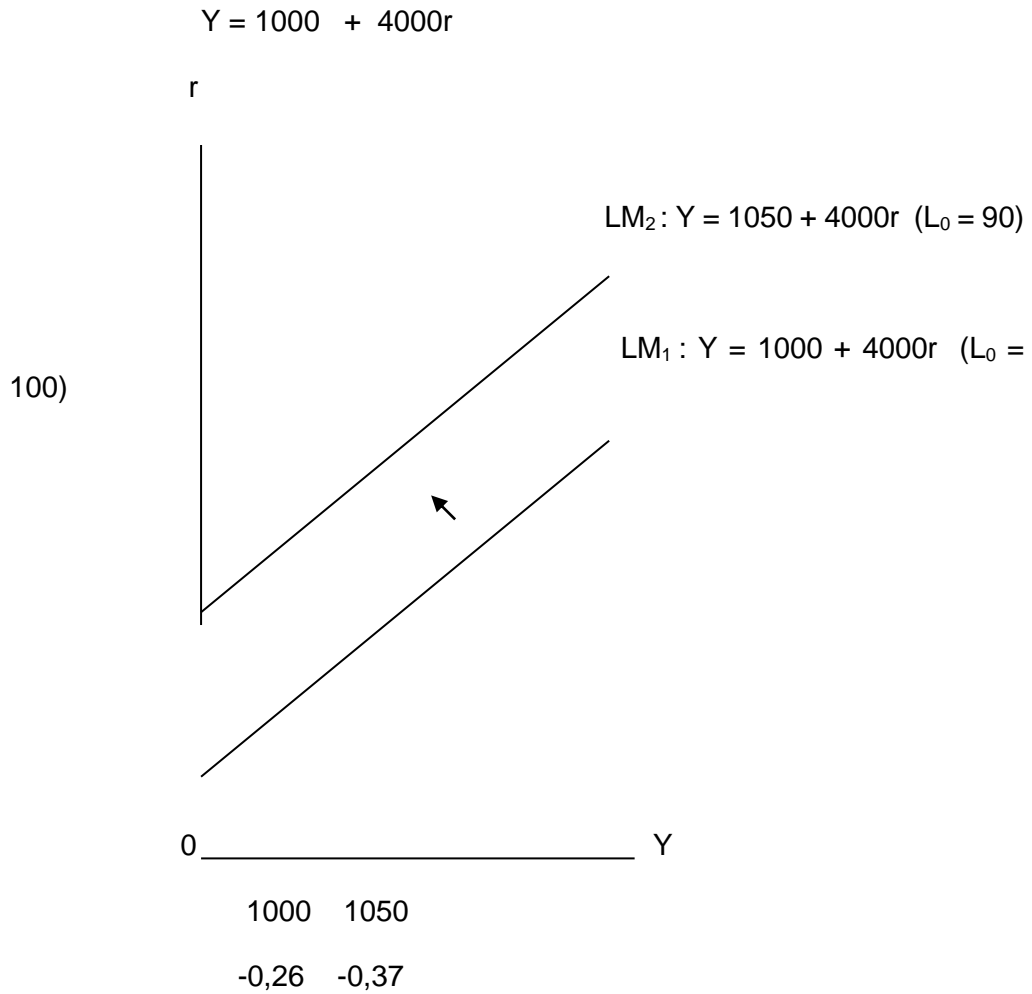
2. Jumlah Uang yang Diminta untuk Spekulasi pada Tingkat Bunga Nol (L_0)

Contoh di atas yang menunjukkan $L_0 = 90$, persamaan kurva LM : $Y = 1050 + 4000r$.

Apabila $L_0 = 100$, maka persamaan kurva LM yang baru adalah

$$Y = \frac{M - L_0}{k} + \frac{Nr}{k}$$

$$Y = \frac{300 - 100}{0,20} + \frac{800r}{0,20}$$



3. Kepekaan Permintaan Uang Untuk Transaksi Dan Berjaga-jaga (k)

Melalui perubahan perilaku masyarakat untuk memegang uang dengan tujuan transaksi dan berjaga-jaga (k), akan mempengaruhi dan menggeser kurva LM, dimana pada saat $(k) = 0,20$; persamaan kurva LM ; $Y = 1050 + 4000r$

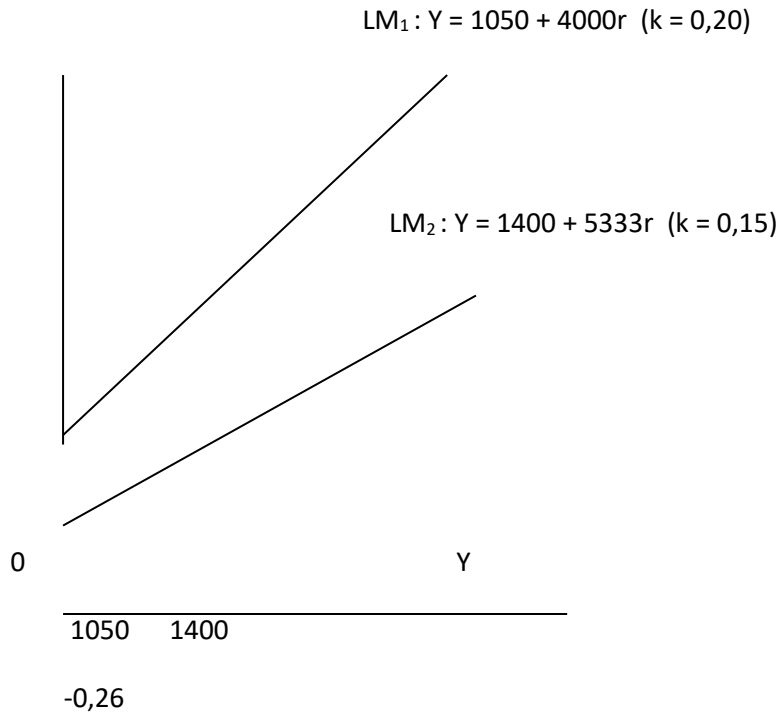
(lihat contoh di atas). Andaikan (k) berubah menjadi 0,15, maka persamaan kurva LM adalah:

$$Y = \frac{M - L_0}{k} + \frac{Nr}{k}$$

$$Y = \frac{300 - 90}{0,15} + \frac{800r}{0,15}$$

$$Y = 1400 + 5.333r$$

r



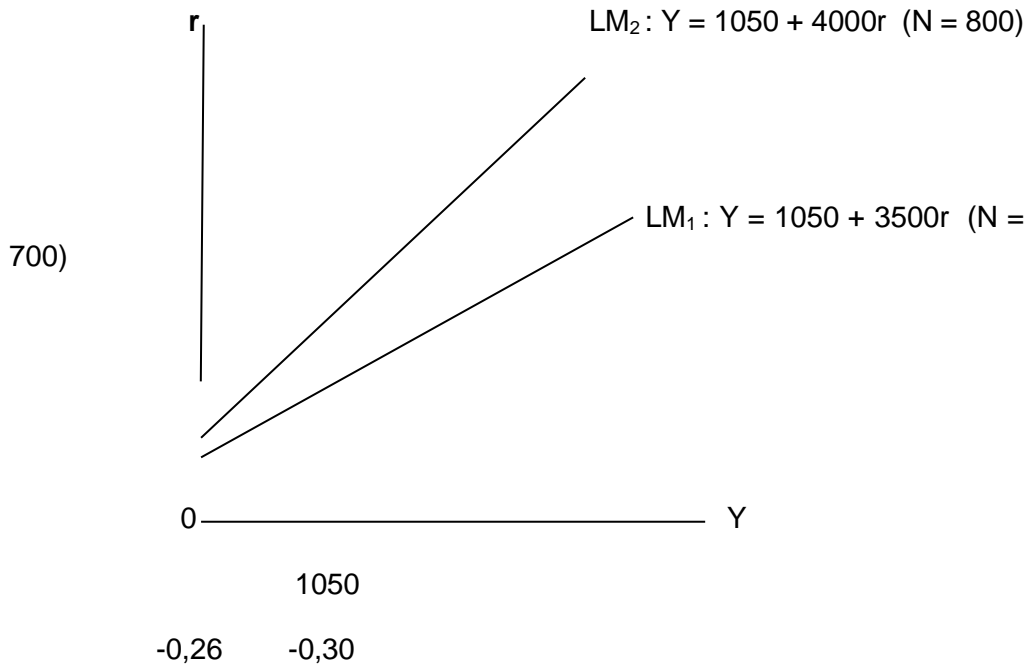
4. Kepekaan Permintaan Uang untuk Spekulasi terhadap Suku Bunga (N)

Contoh di atas menunjukkan (N) = 800, persamaan kurva LM ; $Y = 1050 + 4000r$. Andaikan (N) berubah menjadi 700 maka persamaan kurva LM yang baru adalah

$$Y = \frac{M - L_0}{k} + \frac{Nr}{k}$$

$$Y = \frac{300 - 90}{0,20} + \frac{700r}{0,20}$$

$$Y = 1050 + 3500r$$



F. KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG (ANALISIS KURVA IS)

Kurva IS adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi berbagai tingkat bunga dengan produk nasional (output). Keseimbangan ini terjadi jika investasi yang diinginkan sama besarnya dengan tabungan yang tersedia.

Berdasar pengertian tersebut di atas, maka kurva IS dapat dianalisis melalui penurunan fungsi tabungan dan fungsi investasi. Dengan demikian, persamaan kurva IS dapat diturunkan dari persamaan fungsi tabungan dan fungsi investasi sebagai berikut:

Fungsi Tabungan : $S = -a + MPS$, dan

Fungsi Investasi : $I = I_0 + br$; dimana:

I_0 = besarnya investasi pada tingkat bunga nol,

b = marginal propensity to investment, dan

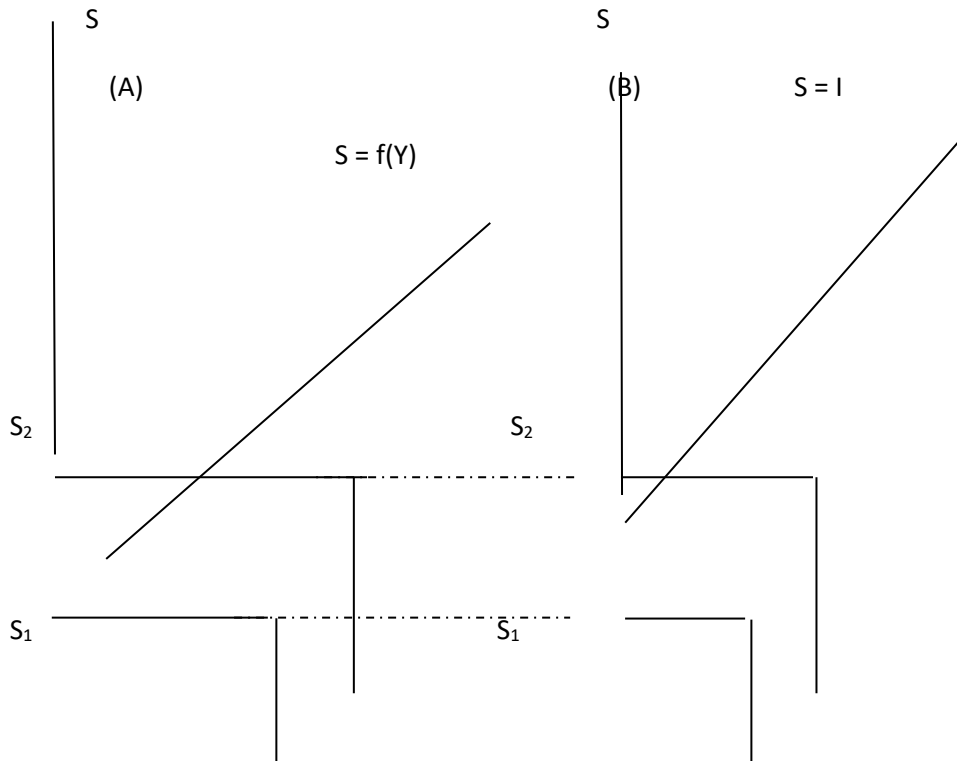
r = tingkat suku bunga.

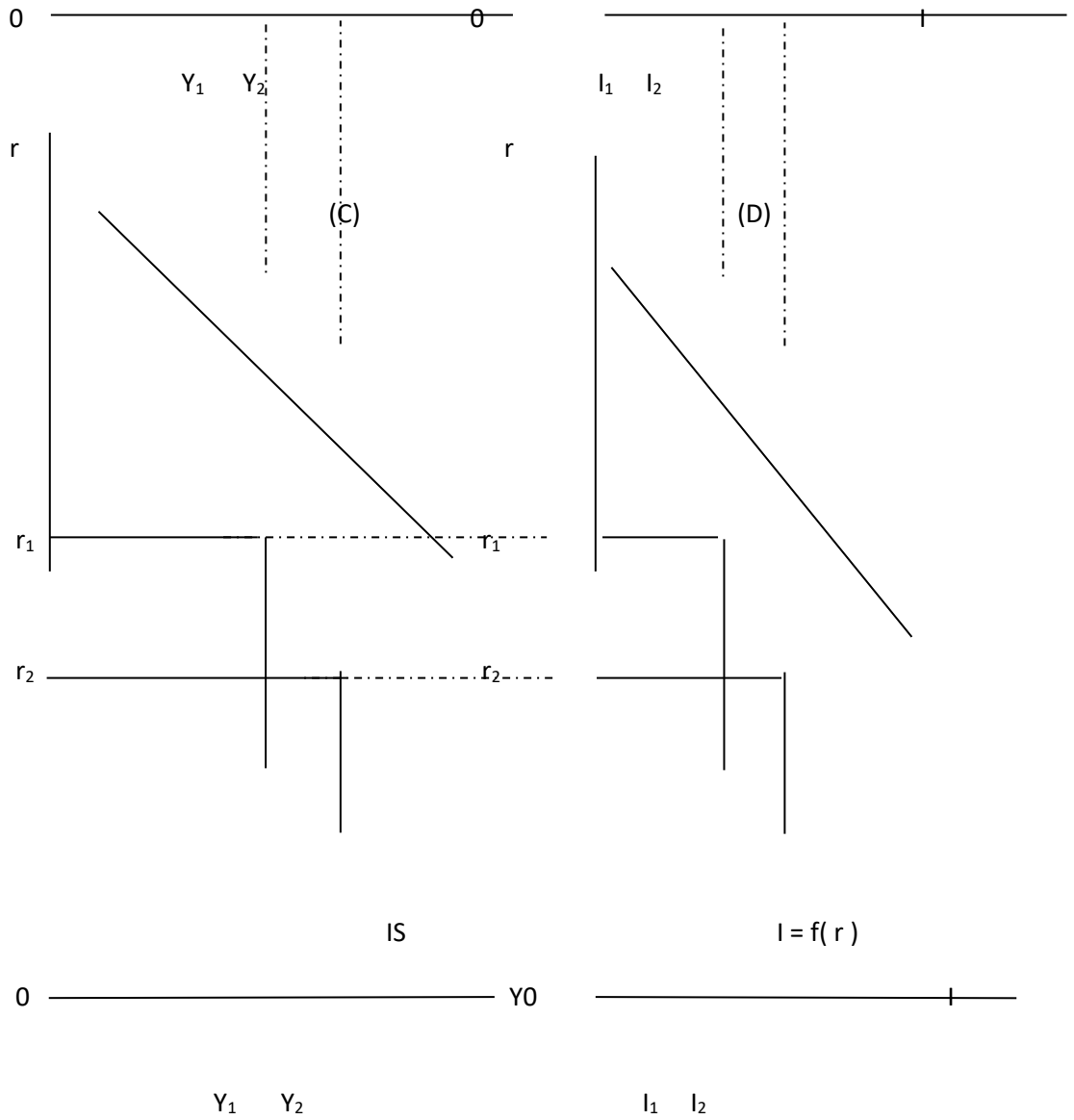
Kecenderungan berubahnya investasi (*Marginal propensity to investment-MPC*) adalah terjadinya perubahan tingkat bunga, atau angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan investasi dengan perubahan tingkat bunga, dimana dapat diformulasi sbb:

$$b = \frac{\Delta I}{\Delta Y}$$

Koefisien b tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dari nol ($b < 0$) atau negatif, karena terjadi hubungan terbalik (*invers*) antara tingkat bunga dengan tingkat investasi, yakni bila tingkat bunga naik, maka investasi akan menurun,

dan begitu pula sebaliknya. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas kurva IS, dapat dilihat pada grafik sbb.:





Keterangan:

Gambar (A) adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan tabungan. Gambar (B) adalah suatu kurva yang memperlihatkan keseimbangan di pasar barang, keseimbangan barang tercapai jika tabungan sama besarnya dengan investasi yang dilakukan ($S = I$). Gambar (C) adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan dengan investasi. Gambar (D) adalah kurva yang menghubungkan antara berbagai tingkat bunga dengan output nasional (kurva IS).

Berdasarkan uraian di atas, penurunan kurva IS menunjukkan, bahwa keseimbangan di pasar barang terjadi pada ketika tabungan sama dengan investasi.

$$S = I$$

$$-a + MPS.Y = I_0 - br$$

$$MPS.Y = a + I_0 - br$$

$$Y = \frac{a + I_0}{MPS} - \frac{br}{MPS}$$

Contoh:

Y	C	R	I
0	160	0	275
200	320	0,05	240

Jawab:

Keseimbangan di pasar barang tercapai jika $S = I$. Karena itu, harus ditentukan lebih dahulu fungsi saving dan fungsi investasi.

$$C = a + MPC \cdot Y ; \text{dimana } a = 160 ; \text{ dan}$$

$$MPC = \Delta C / \Delta Y \quad \text{atau}$$

$$320 - 160$$

$$MPC = \frac{\quad}{200 - 0} = 0,80$$

$$200 - 0$$

Jadi fungsi konsumsi adalah $C = 160 + 0,80Y$

Berarti fungsi saving adalah $S = -160 + 0,20Y$.

Sedangkan fungsi investasi $I = I_0 + br$; dimana $I_0 = 275$; dan

$$b = \Delta I / \Delta r \quad \text{atau}$$

$$240 - 275$$

$$b = \frac{\quad}{0,05 - 0} = -700$$

$$0,05 - 0$$

Jadi fungsi investasi adalah $I = 275 - 700r$

Setelah diketahui persamaan fungsi saving dan fungsi investasi, maka persamaan kurva IS dapat diperoleh sbb:

$$S = I$$

$$-160 + 0,20Y = 275 - 700r$$

$$0,20Y = 160 + 275 - 700r$$

$$160 + 275 \quad -700r$$

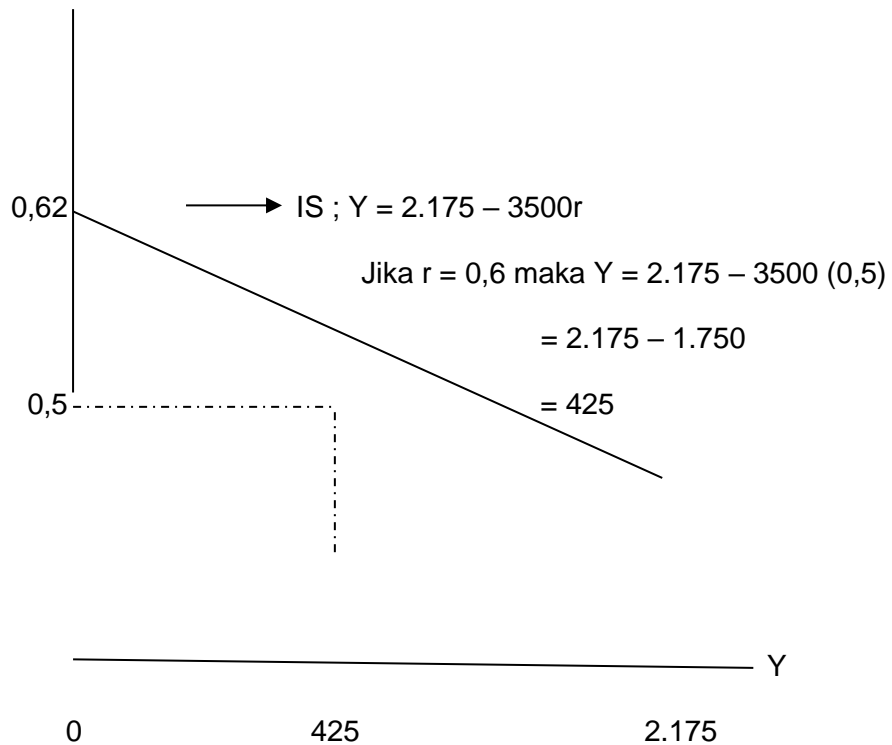
$$Y = \frac{\quad}{0,20} + \frac{\quad}{0,20}$$

$$Y = 2.175 - 3500r \text{ (Persamaan kurva IS)}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa pada tingkat bunga nol ($r = 0$), maka besarnya output nasional adalah 2.175, sedangkan besarnya tingkat bunga yang menyebabkan output = 0 adalah:

$$Y = 2.175 - 3500r ; \text{ jika } Y = 0 ; \text{ maka diperoleh persamaan:}$$

$$r \quad 3500r = 2.175 ; \text{ sehingga } r = 2.175 : 3500 = 0,62 \text{ (62\%)}$$



G. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURVA IS

1. Angka Penganda (*Multiplier*)

Komponen multiplier meliputi angka penganda seperti: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, subsidi pemerintah.

$$Y = \frac{a + I_0}{MPS} - \frac{b}{MPS}$$

$$Y = \frac{1}{MPS} (a + I_0) + \frac{1}{MPS} (-br) ; \text{ atau}$$

$$Y = K (a + I_0) + K (-br)$$

Berdasarkan contoh soal di atas, dengan MPC = 0,80, maka multipliernya adalah 5. Selanjutnya, bila MPC berubah menjadi 0,85, maka multipliernya adalah:

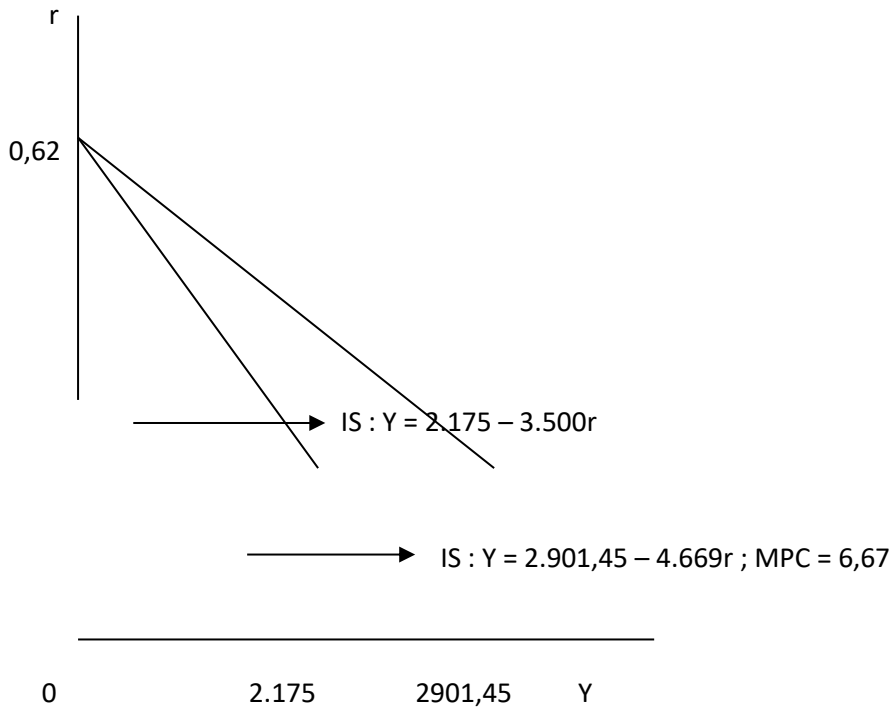
$$K = \frac{1}{1 - MPC} \text{ atau } K = \frac{1}{1 - 0,85} = 6,67$$

Untuk itu, bila persamaan kurva IS untuk MPC = 0,80, adalah $Y = 2.175 - 3500r$, maka dengan berubahnya MPC menjadi 0,85, persamaan kurva IS akan menjadi:

$$Y = K (a + I_0) - K (br)$$

$$Y = 6,67 (160 + 275) + 6,67 (-700r)$$

$$Y = 2.901,45 - 4.669r \text{ (persamaan kurva IS)}$$



2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perekonomian.

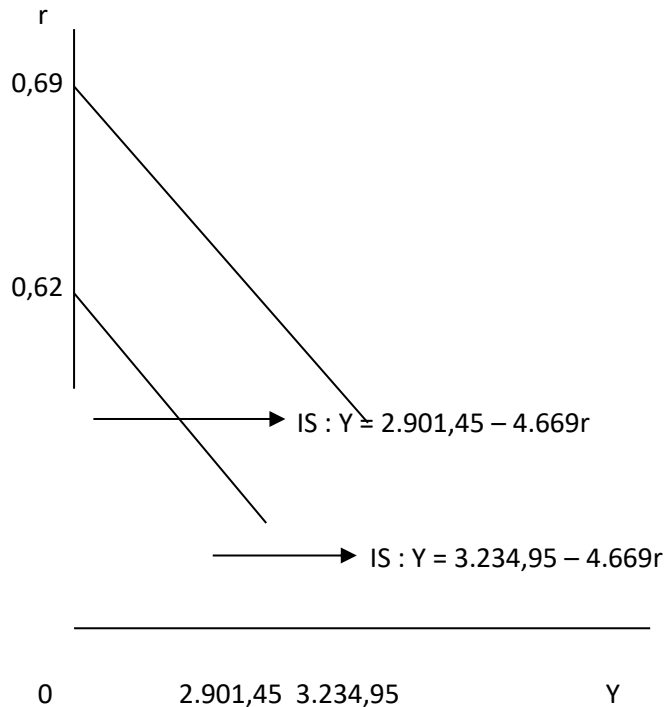
Keadaan perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan pembelian barang-barang modal bagi pengusaha.

Contoh sebelumnya memperlihatkan data $a = 160$ & $I_0 = 275$; yang menghasilkan persamaan kurva IS ; $Y = 2.901,45 - 4.669r$. Apabila konsumsi otonom (a) berubah menjadi 180 dan investasi otonom (I_0) berubah menjadi 305, maka persamaan kurva IS dapat diperoleh sbb:

$$Y = K(a + I_0) - K(br)$$

$$Y = 6,67(180 + 305) + 6,67(-700r)$$

$$Y = 3.234,95 - 4.669r \text{ (persamaan kurva IS)}$$



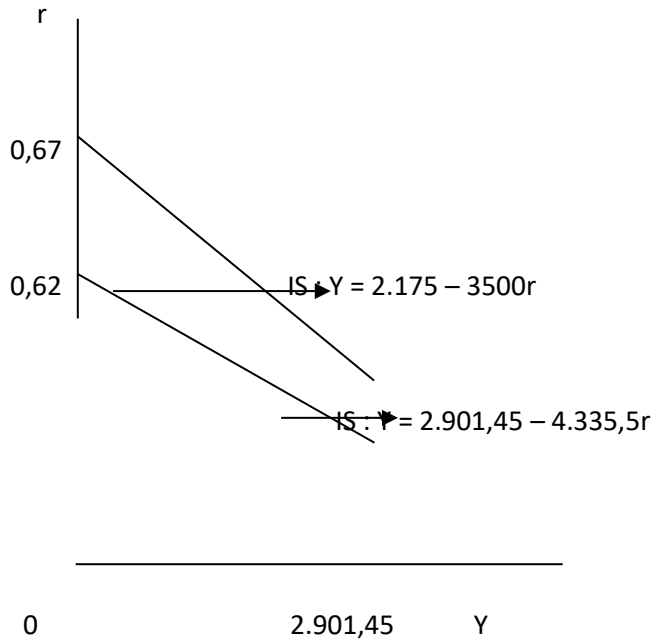
3. Kepekaan Pengeluaran Investasi Terhadap Tingkat Bunga

Kepekaan pengeluaran investasi ini akan tercermin pada besar kecilnya koefisien b , yakni semakin besar koefisien b maka semakin besar pula intersep kurva IS. Berdasarkan contoh di atas, dimana pada saat $b = -700$, maka persamaan kurva IS adalah $Y = 2.175 - 3500r$. Dan pada saat koefisien b meningkat menjadi -650 , maka persamaan kurva IS adalah:

$$Y = K (a + I_0) - K (br)$$

$$Y = 6,67 (160 + 275) + 6,67 (-650r)$$

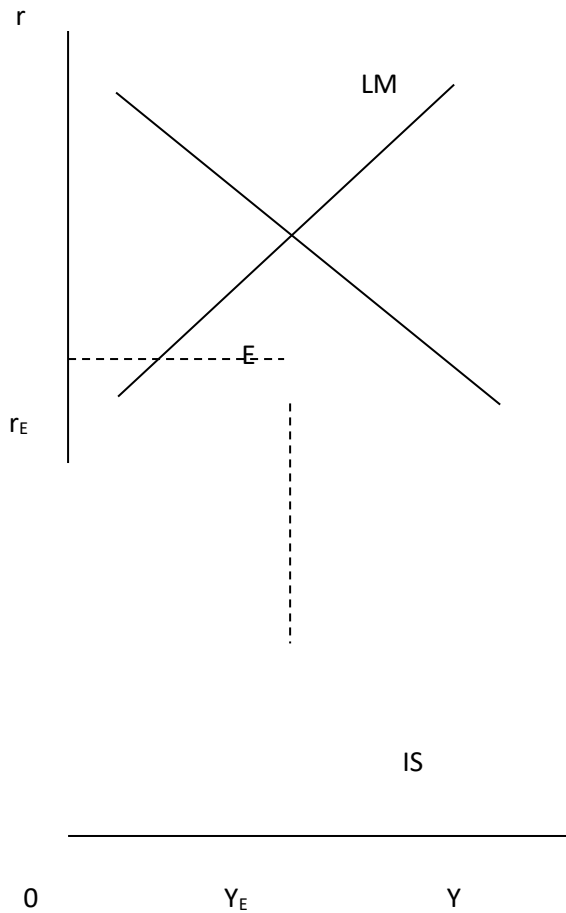
$$Y = 2.901,45 - 4.335,5r \text{ (persamaan kurva IS)}$$



H. KESEIMBANGAN EKONOMI MAKRO

1. Secara Grafis

Berdasarkan analisis keseimbangan pasar uang (kurva LM) dan analisis keseimbangan di pasar barang (kurva IS), maka keseimbangan ekonomi makro dapat dianalisis melalui analisis dasar kurva -LM-IS.



Grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat bunga r_E adalah tingkat bunga keseimbangan, dimana pada tingkat bunga tersebut, output atau pendapatan nasional adalah Y_E .

2. Pendekatan Matematis:

Secara matematis, keseimbangan ekonomi makro dapat dianalisis melalui persamaan kurva LM dan persamaan kurva IS.

Berdasarkan contoh di atas, persamaan kurva IS dan kurva LM adalah :

Kurva LM ; $Y = 1050 + 4000r$ IS ; $Y = 2175 - 3500r$; maka tingkat bunga keseimbangan dapat diperoleh sbb:

$$LM = IS = LM$$

$$1050 + 4000r = 2175 - 3500r$$

$$1050 - 2175 = -4000r - 3500r$$

$$-1.125 = -7500r$$

$$r = (-1.125) : (-7500)$$

$$r = 0,15 (15\%)$$

Berdasarkan tingkat bunga 15%, maka besarnya output pasar uang dan di pasar barang sebagai berikut:

$$LM : Y = 1050 + 4000r$$

$$Y = 1050 + 4000 (0,15)$$

$$Y = 1050 + 600$$

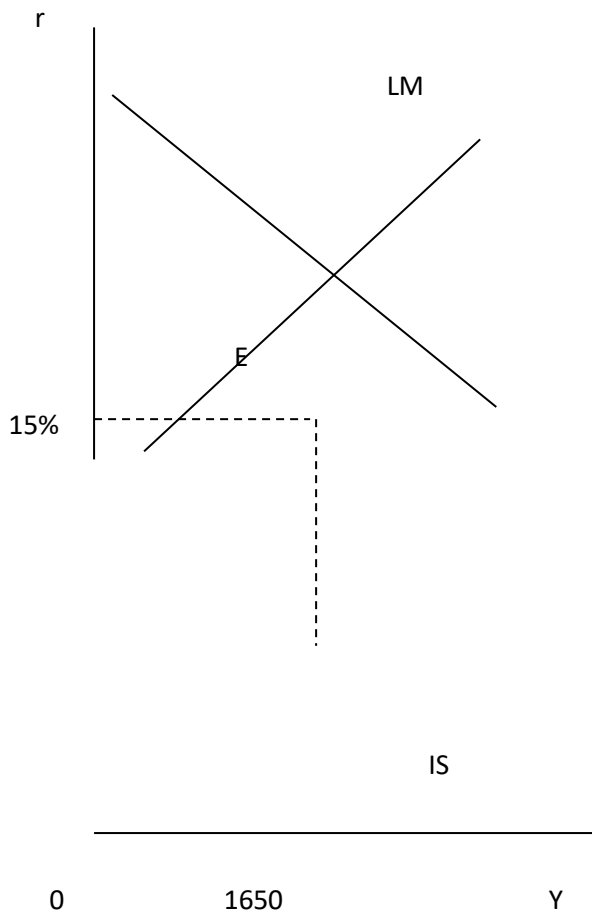
$$Y = 1650$$

$$IS : Y = 2175 - 3500r$$

$$Y = 2175 - 3500(0,15)$$

$$Y = 2175 - 525$$

$$Y = 1650$$



DAFTAR PUSTAKA

- Froyen, T. Richard, 2002. *Macroeconomics*, Teorites and Policies. Seven Edition, Prentice Hall. Muana Nanga, 2008. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan*. Edisi ke Dua, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudiger, D. & Stanley, 2004. *Macroeconomics*. 5 Th – Edition, Mc. Graw-Hill.
- Sadono Sukirno, 2018. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi ke Tiga, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Profil Penulis Naidah



Lahir di Ujung Pandang, 23 Pebruari 1964. Pendidikan (S1) di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 1987, Program Magister (S2) di PPS Unhas, Jurusan Agribisni, lulus pada tahun 2004. Tahun 1989 sampai sekarang, dosen dipekerjakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. dengan Jabatan Lektor Kepala. Jabatan yang pernah dimanahkan kepada penulis di antaranya: Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fekon Unismuh Makakssar (2000-2004), dan tahun (2005-2009).

Selain aktif sebagai dosen, juga aktif menulis. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan, di antaranya: *The Influence of Leadership and Empowerment on Competency of Private Lecturers Kopertis Ix Sulawesi* (2017), *Analisis Halal dan Sikap Keuangan Terhadap Karakter Manusia* (2023).



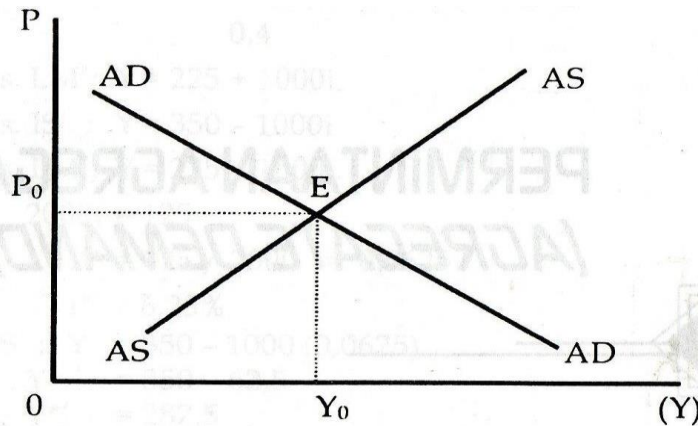
BAB VIII PERMINTAAN AGREGAT DAN PENAWARAN AGREGAT

Rini Ardista, S.Pd.I., MM

A. KONSEP DASAR PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT

Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam permintaan agregat akan dibahas bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Terbentuknya kurva permintaan agregat diperoleh dengan menurunkannya dari kurva keseimbangan pasar barang dan kurva keseimbangan pasar uang. Kurva AD (aggregate demand) dapat bergeser ke kanan atau ke kiri apabila terjadi perubahan pada variabel-variabel pembentuk kurva IS dan Kurva LM.

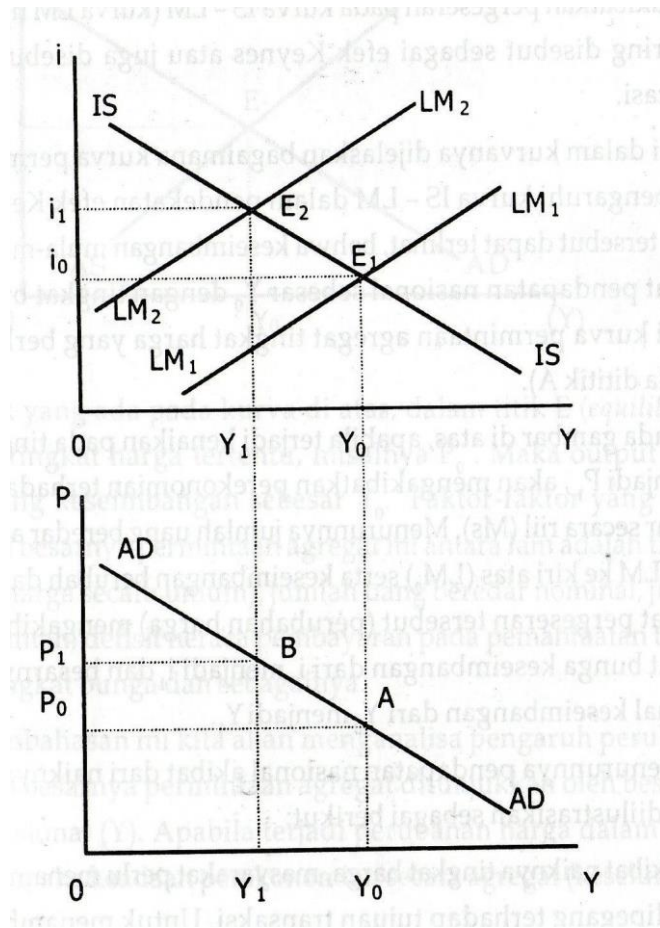
Penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk/jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, fungsi permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja, modal, tanah). Dalam jangka pendek, tanah dan modal dianggap tetap sehingga output tergantung pada jumlah input tenaga kerja.



Gambar 1. Kurva Permintaan dan Penawaran Agregat

Dalam menganalisis permintaan agregat, dua ekonom terkenal yaitu Keynes dan Pigou mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah yang beredar riil (M_s/P) akan berubah, akibatnya terjadi perubahan pada tingkat bunga (i). Selanjutnya perubahan tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi investasi (I) yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapat nasional.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Pigou. Menurutnya, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas riil (*real cash balance*) mereka berubah, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan nasional. Jadi pada intinya, perbedaan pendapat kedua ekonomi tersebut terletak pada perubahan variable-variabel ekonomi akibat adanya perubahan harga. Keynes menitikberatkan pada perubahan tingkat bunga, sedangkan Pigou menitikberatkan perubahan konsumsi ketika terjadi perubahan harga. Dari kedua pendapat di atas, yaitu Keynes dan Pigou, dapat diturunkan kurva permintaan agregatnya. Keynes menjelaskan bahwa perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar secara riil.

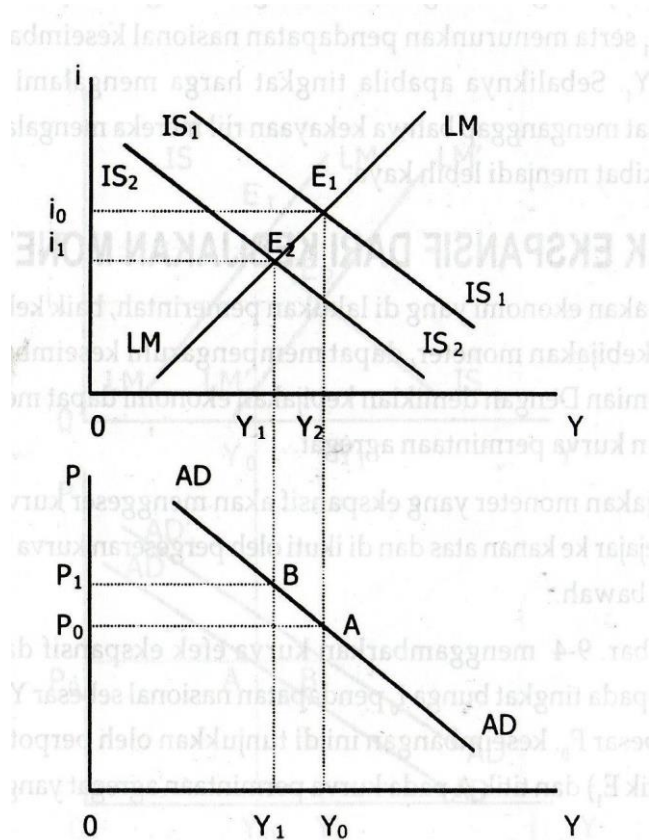


Gambar 6 Kurva permintaan agregate dan efek Keynes

Keseimbangan awal pada tingkat pendapatan nasional (Y_0), tingkat harga P dan tingkat bunga i_0 . Keseimbangan terjadi pada titik A pada kurva permintaan agregat. Misalnya terjadi kenaikan harga (P_1) menyebabkan jumlah uang beredar riil menurun. Hal ini ditandai dengan pergeseran kurva LM ke kiri (LM_1), sehingga mengakibatkan tingkat bunga naik menjadi i_1 dan pendapatan nasional turun menjadi Y_1 . Keseimbangan yang baru ini

terteta di titik B. Jika titik A dan titik B digabungkan pada satu garis, maka akan diperoleh kurva permintaan agregat (AD).

Pigou menjelaskan bahwa tingkat harga dapat mempengaruhi saldo kas riil (*real cash balance*).



Gambar 7. Kurva permintaan agregat dan efek Pigou

Mula-mula keseimbangan terjadi pada tingkat pendapatan nasional Y_0 , tingkat harga P_0 dan tingkat bunga i_0 . Keseimbangan ini tercermin pada titik. Ketika terjadi kenaikan harga menjadi P_1 sehingga menyebabkan saldo kas riil turun dan mereka akan mengurangi konsumsi. Berkurangnya

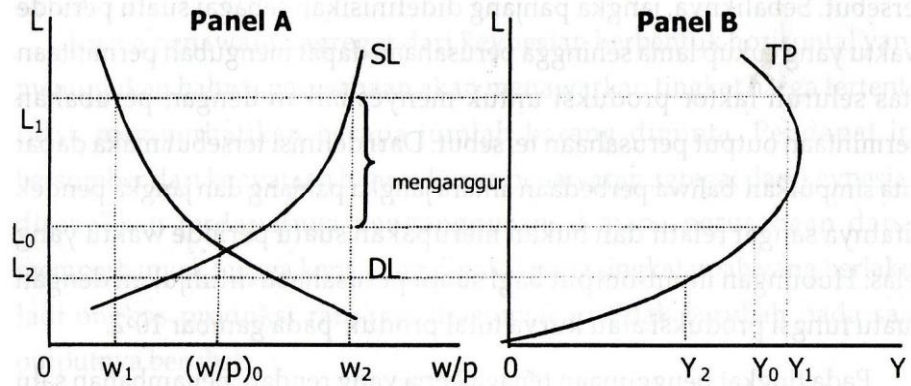
konsumsi ditandai dengan pergeseran IS ke kiri menjadi IS_1 . Selanjutnya pendapatan nasional turun menjadi Y_1 . Keseimbangan yang baru terletak pada titik D. Jika kita menghubungkan titik C dan titik D, maka akan diperoleh kurva permintaan agregat menurut Pigou.

B. PENAWARAN TENAGA KERJA UNTUK SUATU PERUSAHAAN

Reaksi suatu perusahaan atas perubahan permintaan antara lain tergantung pada jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek didefinisikan sebagai suatu periode waktu yang pendek sehingga perusahaan tidak dapat mengubah penggunaan paling sedikit satu input apabila terjadi perubahan permintaan atau output perusahaan tersebut. Sebaliknya, jangka panjang didefinisikan sebagai suatu periode waktu yang cukup lama sehingga perusahaan dapat mengubah permintaan atas seluruh faktor produksi untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan output perusahaan tersebut. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek sifatnya sangat relatif dan bukan merupakan suatu periode waktu yang jelas.

Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang rendah, penambahan satu unit tenaga kerja akan meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada kenaikan jumlah tenaga kerja sampai pada penggunaan tenaga kerja sebesar L_0 unit. Selain itu, penambahan tenaga kerja akan menyebabkan kenaikan output dalam jumlah yang semakin kecil, yaitu apa yang dikenal sebagai *Diminishing Return*. Yang ditunjukkan pada penggunaan tenaga kerja sampai sejumlah L_0 L_1 unit. *Diminishing Return* terjadi karena adanya tambahan satu unit input variabel pada input lainnya yang sifatnya konstan (tetap). Pada tingkat penggunaan tenaga kerja lebih besar dari L_0 , penambahan input tenaga kerja akan menyebabkan turunnya produksi total. Oleh karena itu, seorang produsen yang rasional tidak akan menggunakan tenaga kerja lebih banyak dari pada OL_1 Pada tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak OL_0 unit, produksi marjinal menurun dan pada penggunaan

tenaga kerja sebesar L_1 , produksi marjinal sebesar 0. Jika penambahan tenaga kerja melebihi L_1 , menyebabkan produksi marjinal negatif.

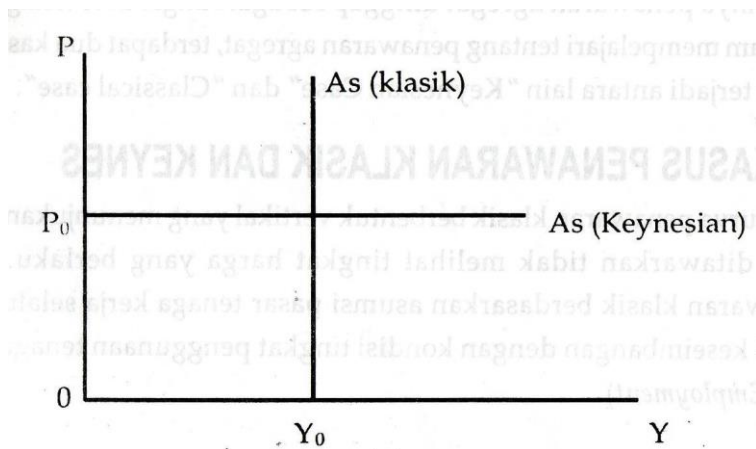


Gambar 8. Penggunaan Tenaga Kerja Pada Suatu Perusahaan

C. PENAWARAN AGREGAT MENURUT KAUM KLASIK DAN KEYNES

Dalam teori ekonomi, kurva penawaran agregat dapat dibedakan atas dua yaitu kurva penawaran agregat Klasik dan kurva penawaran agregat Keynes. Perbedaan esensial asumsi kurva penawaran agregat klasik dan Keynes adalah bahwa dalam penawaran klasik kepercayaan mereka terhadap pasar tenaga kerja bekerja secara lancar (*smoothly*) selalu menjaga keseimbangan penuh, sehingga yang berubah hanyalah tingkat upah saja. Sedangkan kurva penawaran agregat Keynesian berdasarkan asumsi tingkat upah tidak berubah banyak, karena terdapat sebagian pengangguran.

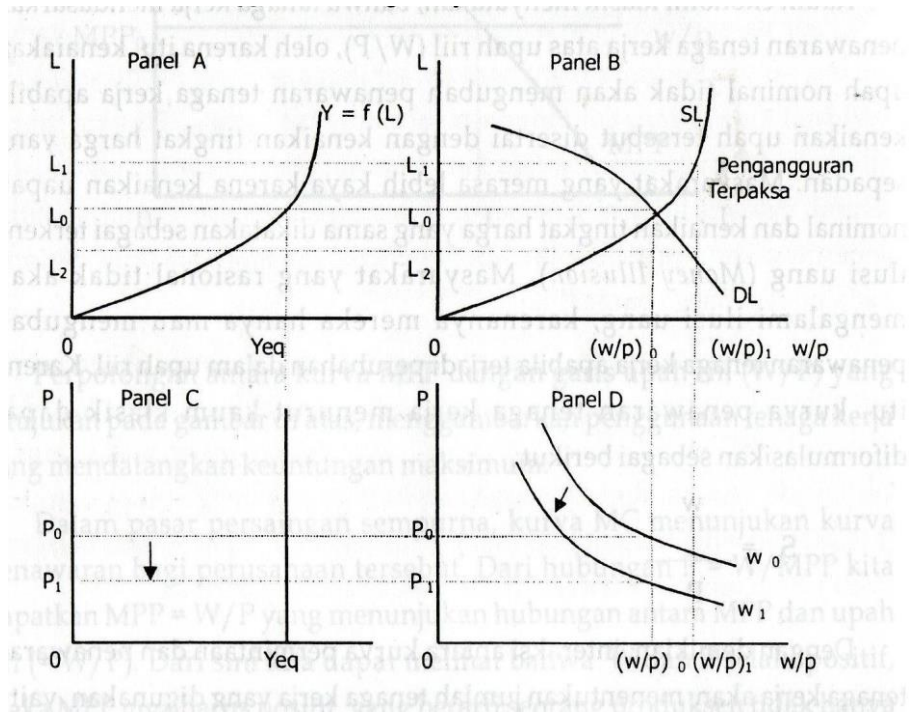
Kurva penawaran agregat dari keynesian berbentuk horisontal yang menunjukkan bahwa perusahaan akan menawarkan tingkat harga tertentu tidak memperhatikan berapa jumlah barang diminta. Pendapat ini bersumber dari kenyataan bahwa kurva penawaran agregat dari Keynesian disebabkan terdapatnya pengangguran, dimana perusahaan dapat memperbanyak tenaga kerja yang dipakai pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, biaya produksi rata – rata diasumsikan tidak berubah pada saat outputnya berubah.



Gambar 9. Penawaran agregat

a. Kurva Penawaran Agregat Klasik

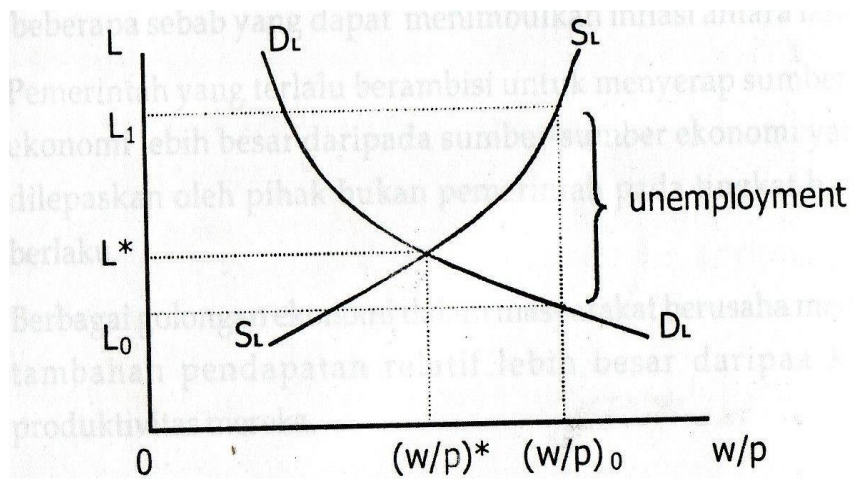
Kaum Klasik mengemukakan bahwa penawaran agregat berdasar pada upah riil (W/P). Kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran agregat apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan harga barang-barang yang sama besarnya dengan kenaikan upah nominal. Kurva penawaran agregat menurut kaum Klasik adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Penawaran agregat klasik

b. Kurva Penawaran Agregat Keynes

Menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dan adanya aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Penurunan kurva agregat Keynes dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 11. Penawaran agregat keynes

C. Dari Analisis Keynesian sederhana ke Analisis AD-AS. Penawaran Agregat (*Aggregate Supply/AS*) dan Permintaan Agregat (*Aggregate Demand/AD*)

Sebelum menerangkan analisis AD-AS, ada baiknya apabila terlebih dahulu di perhatikan faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis tersebut. Melalui uraian ini dapatlah di pahami alasan yang mendorong kepada perlunya memasukkan analisis AD-AS dalam teori makroekonomi. Uraian mengenai faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan analisis AD-AS akan di bedakan kepada dua aspek, yaitu: pandangan pokok teori Keynes yang menjadi landasan kepada perkembangan teori makroekonomi, dan kelemahan teori makroekonomi yang di landaskan kepada teori Keynes. Dari uraian mengenai kedua hal tersebut dapatlah ditunjukkan sumbangan analisis AD-AS dalam memahami penentuan kegiatan dalam suatu perekonomian dan masalah-masalah yang di hadapinya.

D. PERBEDAAN TEORI KLASIK DAN TEORI KEYNES

Analisis keseimbangan pendapatan nasional merupakan analisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi Negara yang di kenal sebagai “*analisis Keynes Sederhana*” atau “*Simple Keynesian analysis*”. Dinamakan demikian oleh karena pokok-pokok dari pemikiran tersebut di kembangkan oleh seorang ahli ekonomi inggris, yaitu *Johny Mynard Keynes*, dalam bukunya: *The General Theory Of Employment, Interest and Money*. Dan ia dinamakan “*seederhana*” oleh karena analisis itu belum memperhatikan peranan uang dan suku bunga dalam penentuan kegiatan ekonomi.

E. PANDANGAN KLASIK

Buku Keynes tersebut mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik yang yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut ahli-ahli ekonomi Klasik, seperti di contohkan oleh *Hukum Say* atau pandangan Jean Baptish Say seorang ahli ekonomi Perancis: “*Supply creates its own demand*”. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini dapat di nyatakan sebagai: “Penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan”. Maksudnya: diproduksi akan dapat terjual dipasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi menggunakan semua faktor produksi yang tersedia.

Berdasarkan kepada keyakinan ini selanjutnya ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa di setiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh. Dalam masyarakat yang ekonomiya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Y = f(K, L, Q, T)$$

Dimana: Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian,

K adalah jumlah barang modal yang tersedia,

L adalah jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, Q adalah jumlah kekayaan alam yang telah di kembangkan dan digunakan, dan

T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Dari pandangan ini selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ahli-ahli ekonomi Klasik berkeyakinan *segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara.*

Pandangan Keynes: Permintaan Efektif dan Kegiatan Ekonomi

Buku Keynes yang dinyatakan diatas mengkritik keyakinan Klasik

- a) Dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, dan oleh karena itu
- b) Ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Dalam buku tersebut Keynes berpendapat:

- a) Tingkat permintaan efektif (*effective demand*)-yaitu *pengeluaran agregat (permintaan efektif pada harga tetap) dan permintaan agregat (permintaan efektif pada berbagai tingkat harga)* akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai
- b) Dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dapat dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Sesuai dengan pandangan Keynes ini, analisis “*Keynes Sederhana*” memperhatikan tentang bagaimana pengeluaran agregat yang berlaku dalam masyarakat akan menentukan kegiatan keseluruhan ekonomi dan pendapatan nasional. Dengan misalkan *harga-harga tidak mengalami perubahan*, analisis tersebut menunjukkan bagaimana keseimbangan itu akan menentukan pendapatan nasional yang di wujudkan dalam perekonomian dan tingkat kesempatan kerja yang dicapai.

Pandangan Keynes: Uang dan Kegiatan Ekonomi

Buku *The General Theory Of Employment, interest and Money* juga membahas mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat: "Money is neutral" atau "uang adalah netral". Maksudnya: **Uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi**. Menurut ahli-ahli ekonomi Klasik, seperti telah diterangkan sebelum ini, kesempatan kerja penuh selalu dicapai dalam keadaan seperti ini pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, menurut ahli-ahli ekonomi Klasik, perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan ini di namakan **teori kuantitas**.

Teori Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapatan ahli-ahli ekonomi Klasik. Bagi Keynes *uang tidak netral*. Artinya: *perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian*. Perbedaan pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat di bedakan kepada dua aspek:

- a) Perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga
- b) Perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi (atau jumlah penawaran uang) kepada kegiatan ekonomi.

Penentuan Suku Bunga Teori *loanable fund* atau *dana dapat-pinjam* menerangkan pandangan Klasik mengenai penentuan suku bunga. Teori tersebut menerangkan bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Maka perubahan tabungan dan perubahan permintaan dan modal akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Keynes mengkritik pandangan ini. *Menurut Keynes suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang*.

Uang dan Kegiatan Ekonomi Telah diterangkan bahwa ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi

dan produksi nasional. Ini disebabkan karena kesempatan kerja penuh sudah dicapai. Keynes, yang berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai, berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut:

- a) Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila bertambah suku bunga akan turun
- b) Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian.
- c) Pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat dan selanjutnya pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapat nasional.

F. PERKEMBANGAN ANALISIS AD-AS. (AGGREGATE SUPPLY/AS) DAN (AGGREGATE DEMAND/AD)

Bagian ini secara ringkas akan melihat sejarah dari perkembangan analisis AD-AS. Dalam uraian ini akan ditunjukkan faktor-faktor yang mendorong kepada pemikiran yang mengembangkan analisis AD-AS. Untuk melakukan hal tersebut pertama sekali akan disimpulkan pandangan pokok analisis makroekonomi yang dikaitkan kepada pandangan Keynes yang diterangkan dalam buku: **The General Theory**. Sesudah itu akan ditunjukkan kelemahan dan kritik ke atas analisis makroekonomi Keynesian yang mendorong kepada perkembangan analisis AD-AS.

Pandangan Pokok Teori Makroekonomi Keynesian.

Apabila diperhatikan dan mengenai pandangan yang terkandung dalam *teori makroekonomi Keynesian, atau Keynesian macroeconomic* secara kasarnya pandangan tersebut meliputi tiga aspek berikut:

- (a) peranan pengeluaran agregat
- (b) suku bunga dan peranan uang

- (c) peranan pemerintahan dan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu.

G. PERANAN PENGELUARAN AGREGAT

Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia, yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu/tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis *Keynesian sederhana* atau *simple Keynesian*. Dinamakan sedemikian oleh karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor:

- (a) efek dari perubahan suku bunga
- (b) efek perubahan tingkat harga, kepada kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara.

Analisis Keynes merupakan jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis itu tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu dalam analisis tersebut terdapat pertalian yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja. Apabila pengeluaran agregat bertambah maka kegiatan ekonomi, produksi nasional dan kesempatan kerja akan meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

H. TINGKAT HARGA DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Dalam suatu waktu tertentu tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diterima dipeoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak

barang dan jasa yang dapat di beli. Dengan kata lain: nilai ril pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah.

I. TINGKAT HARGA, SUKU BUNGA DAN INVESTASI

Pada umumnya terdapat perkaitan yang cukup rapat diantara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil, atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan menjadi semakin tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga rill yang tetap besarnya dan ini dilakukan dengan menuntut bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat. Terdapat perkaitan yang rapat pula diantara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi.

Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan agregat. Dengan demikian kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut:

- (a) harga naik menyebabkan suku bunga naik
- (b) suku bunga naik menyebabkan investasi turun
- (c) investasi yang merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan rill merosot.

J. TINGKAT HARGA, EKSPOR DAN IMPOR

Berbagai Negara, terutama Negara-negara yang telah maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand dapat memproduksi sepatu, pakaian dan mobil. Oleh karena itu tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ekspor dan impor suatu Negara. Secara umum dapat dikata

- (a) apabila barang-barang dalam suatu Negara adalah relatif lebih murah, ekspor akan meningkat, dan impor berkurang, dan sebaliknya
- (b) apabila barang-barang dalam suatu Negara adalah relatif lebih mahal ekspor akan merosot dan impor meningkat.

Berdasarkan sifat ini dapat disimpulkan:

- a) Kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto (ekspor dikurangi impor)
- b) Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional riil.

Model penawaran agregat (*Aggregate Supply/AS*) dan permintaan agregat (*Aggregate Demand/AD*) sering kali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Model AS-AD ini merupakan turunan dari model IS-LM, dimana pada model IS-LM menggunakan asumsi bahwa tingkat harga bersifat konstan. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Sedangkan kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen. Artinya, dalam periode satu atau dua tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa dan penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa (Mankiw, 2006:293-304).

Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan dalam penawaran dan permintaan agregat ini sebagai guncangan (*shock*) terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran (*supply shock*). Sedangkan guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan (*demand shock*).

Kerangka kerja penawaran dan permintaan agregat bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan yang terjadi pada penawaran dan permintaan agregat. Para pembuat kebijakan memiliki dua kelompok besar alternatif kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang diatur

oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter adalah perubahan cadangan uang yang beredar, perubahan tingkat suku bunga – tingkat diskonto dan pengawasan terhadap sistem perbankan. Kebijakan fiskal adalah bidang kewenangan parlemen dan biasanya diprakarsai oleh lembaga eksekutif. Instrumen kebijaksanaan fiskal adalah tarif pajak dan besarnya tingkat pengeluaran pemerintah.

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) atau pengurangan tarif pajak (T) untuk meningkatkan permintaan agregat (AD) di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh (*full-employment level of income*).

Guncangan yang mempengaruhi komponen permintaan agregat dapat berasal dari variabel moneter domestik maupun luar negeri. Variabel moneter tersebut antara lain berupa jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi maupun nilai tukar. *Internal Monetary Shock* atau guncangan pada variabel moneter domestik tersebut bisa berupa adanya perubahan kebijakan oleh otoritas moneter, seperti kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif, yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya *money supply shock* dan *interest rate shock*. Selain itu adanya *inflation shock*, turut berpengaruh terhadap penerapan kebijakan moneter yang diambil, yaitu apakah bank sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif. Sehingga adanya *shock* pada variabel moneter secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap permintaan agregat dan selanjutnya terhadap output. *Internal monetary shock* dapat menyebabkan penurunan output nasional. Misalnya, adanya kebijakan moneter kontraktif, yaitu penurunan JUB (Jumlah Uang Beredar) akan menyebabkan suku bunga domestik mengalami *shock* (meningkat) dan menimbulkan konsekuensi pada penurunan output nasional. Kenaikan suku bunga domestik menyebabkan tersendatnya upaya menstimulasi sektor riil

perekonomian. Tingginya suku bunga akan menyebabkan masyarakat merelokasi pendapatan ke dalam aset-aset simpanan dan menahan tingkat konsumsi sehingga dana yang tersedia untuk investasi semakin sedikit. Lebih rendahnya tingkat investasi, konsumsi dan pengikisan nilai aset yang terjadi akibat inflasi akan menyebabkan tertekannya permintaan agregat masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Money supply shock menyebabkan kenaikan output bergerak pada arah yang negatif. Hal ini terjadi karena uang beredar tidak lagi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun justru menimbulkan inflasi. Adanya kenaikan pada JUB yang diikuti oleh tingkat suku bunga menyebabkan output turun. Selanjutnya, tingginya tingkat inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan output. Hal ini karena inflasi berpengaruh terhadap keputusan konsumsi masyarakat, pemerintah maupun bisnis. Dimana konsumsi adalah salah satu komponen penyusun permintaan agregat. Sehingga bila inflasi naik, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Ketika secara *agregat* tingkat konsumsi berkurang, maka output juga akan berkurang. Bila pergeseran *agregat demand* ini terus berlanjut dan menyebabkan sektor bisnis menjadi lemah, maka akan menyebabkan perekonomian mengalami resesi.

Indonesia yang memenuhi kriteria “*small and open economy*”, menyebabkan setiap guncangan eksternal (*eksternal monetary shock*) yang terjadi dalam perekonomian dunia akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Adanya *external monetary shock* atau guncangan pada variabel moneter luar negeri bisa berupa *exchange rate shock*, yaitu perubahan sistem nilai tukar yang dianut maupun pergerakan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing. Adanya guncangan pada nilai tukar bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sehingga menyebabkan inflasi, konsekuensi dari inflasi yang tinggi adalah mata uang akan mengalami depresiasi (Mankiw, 2003:132).

Kerangka kerja penawaran dan permintaan agregat bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi

guncangan yang terjadi pada penawaran dan permintaan agregat. Para pembuat kebijakan memiliki dua kelompok besar alternatif kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Instrumen kebijakan moneter adalah perubahan cadangan uang yang beredar, perubahan tingkat suku bunga – tingkat diskonto dan pengawasan terhadap sistem perbankan. Kebijakan fiskal adalah bidang kewenangan parlemen dan biasanya diprakarsai oleh lembaga eksekutif. Instrumen kebijaksanaan fiskal adalah tarif pajak dan besarnya tingkat pengeluaran pemerintah. Permintaan Agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dalam sebuah negara. Penawaran Agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara.

Terdapat dua jenis penawaran agregat, yaitu jangka pendek dan jangka panjang :

- a) Pada jangka panjang, kurva akan berbentuk vertikal ke atas, tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat inflasi, ditentukan oleh faktor produksi yaitu SDA, SDM, kewirausahaan dan modal. Kurva jangka panjang akan bergeser apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi yaitu tenaga kerja, modal, kemajuan teknologi, investasi serta edukasi.
- b) Pada jangka pendek, jika inflasi naik maka kuantitas supply akan meningkat dan kurva berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Beberapa hal yang mencakup aggregate demand adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Setiap variabel ini nantinya akan dianggap sama selama diperdagangkan pada nilai pasar yang sama.

Dalam dunia ekonomi terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi aggregate demand yaitu:

- a) Perubahan Suku Bunga Naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dan para pebisnis. Menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang yang berharga, seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah.
- b) Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Saat pendapatan nasional memang sedang meningkat, maka pendapatan setiap rumah tangga akan turut meningkat. Di saat seperti inilah permintaan agregat akan turut meningkat. Sebaliknya, penurunan pendapatan nantinya akan berimbas pada menurunnya jumlah aggregate demand.
- c) Perubahan Ekspektasi Inflasi Bila suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri. Bila masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi, maka mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi meningkat tinggi.
- d) Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Nilai mata uang pun akan turut memberikan dampak besar pada aggregate demand.

Bila nilai mata uang dalam suatu negara sedang anjlok, maka harga barang tentu akan semakin mahal, khususnya barang impor. Sebaliknya, bila mata uang sedang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih murah. Naik turunnya harga ini pun akan turut mempengaruhi nilai aggregate demand. Komponen di dalamnya adalah komponen permintaan agregat, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Bila Anda perusahaan Anda fokus pada kegiatan impor ekspor, maka perusahaan Anda turut mempengaruhi nilai aggregate demand negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. Yogyakarta : BPF
- Dornbusch, Rudiger. Stanley Fisher dan Richard Startz. 2008. *Makroekonomi*. PT Media Global Edukasi: Jakarta
- Froyen. Richard T. 2002. *Macroeconomics: Theories and Policies*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemahan Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA. Jakarta : Erlangga.
- Idris, 2008. *Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*, MM UNP : Padang.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta
- Miskhin, Frederic S. 2009. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi Terjemahan. Jakarta : Salemba Empat.
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo : Jakarta
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPF-Yogyakarta.
- Nordhous, Samuelson. 2004. *Ilmu Makroekonomi*. PT Media Global Edukasi : Jakarta

Profil Penulis


Rini Ardista



Lahir di Ponorogo 27 Juli 1969. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Ponorogo. Kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di SMA Yaspri 1 Jakarta tahun 1998, D3 ASMI Pulo Mas Jakarta tahun 1992, S1 STIT INSIDA Jakarta tahun 2012, S2 di STIMA IMMI Jakarta tahun 2015. Setelah mengantongi gelar Magister Manajemen, penulis berkarier di dunia pendidikan dan menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya menjadi dosen tetap di Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM)

Bekasi sampai saat ini.

Sebagai dosen penulis aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, aktif melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan menulis beberapa buku sesuai bidang ilmu yang ditekuni, serta aktif menulis buku bahan ajar untuk materi manajemen yang dikonsumsi mahasiswa pada mata kuliah yang diampu. Penulis mendedikasikan diri menjadi dosen professional serta telah lulus Sertifikasi Dosen.

A full-page background image featuring a bronze statue of Pietro Verri. The statue is a standing male figure with powdered hair, wearing a long, draped coat and a high-collared shirt. He is holding a book in his right hand and has his left hand tucked into his coat. The statue is set on a stone pedestal with the name 'PIETRO VERRI' inscribed on it. The background is a dark, arched architectural structure.

BAB IX

MASHAB PENENTU

KEGIATAN EKONOMI

NEGARA

Warda, S.E., M.E.

A. PENGERTIAN MAZHAB EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya pemikiran-pemikiran ekonomi.

Pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini telah mengalami suatu proses yang panjang. Perkembangannya berlangsung berabad-abad seiring dengan munculnya peradaban-peradaban yang ada di dunia. Bahkan pemikiran tersebut mulai tampak sejak zaman batu, perunggu, dan besi. Kemudian semakin berkembang sejak ditemukannya tulisan pada peradaban India kuno, Mesir kuno, dan Babylonia. Sedangkan barat lebih cenderung pada peradaban Yunani kuno yang kaya akan peninggalan dari kaum intelektualnya. Sejarah pemikiran ekonomi tergantung pada siapa pemikirnya dan teori yang mendasari dalam bidang ekonomi politik dan ekonomi dari masa lalu hingga saat ini, mulai dari pemikiran Aristoteles (politik dan etnis), lalu ada Thomas Aquinas (moral). Pemikiran ekonomi berevolusi dari feodalisme (abad pertengahan) menjadi teori merkantilisme pada masa renaissance (berorientasi pada kebijakan perdagangan). Dan filsuf Inggris, Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia, dengan ide-idenya pada abad ke-18. Namun harus diingat bahwa, sebelum Adam Smith telah terbit banyak sekali buku dan artikel tentang ekonomi.

Aliran pemikiran ekonomi atau mazhab pemikiran ekonomi adalah beragam pendekatan dalam sejarah pemikiran ekonomi yang cukup penting untuk dikelompokkan sebagai aliran pemikiran. Meskipun para ekonom tidak selalu tergabung dalam aliran tertentu, terutama di era modern, pengelompokan ekonom ke dalam sejumlah aliran pemikiran umum terjadi dalam ilmu ekonomi. Pemikiran ekonomi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni pramodern (Yunani-Romawi, India, Persia, Arab, dan Tiongkok), modern awal (merkantilisme, fisiokrat), dan modern (dimulai dengan pemikiran Adam Smith dan ekonomi

klasik pada akhir abad ke-18). Teori ekonomi yang sistematis telah berkembang sejak awal era modern.

Saat ini, sebagian besar ekonom mengikuti pendekatan yang disebut dengan ekonomi arus utama (atau ‘ekonomi ortodoks’). Ekonomi arus utama terbagi menjadi dua aliran, yakni aliran ‘air asin’ (terkait dengan Berkeley, Harvard, MIT, Pennsylvania, Princeton, dan Yale), dan pemikiran *laissez-faire* dari aliran ‘air tawar’ (terkait dengan Universitas Carnegie Mellon, Rochester, Minnesota, dan Eropa). Kedua aliran pemikiran ini dikenal dengan sintesis neoklasik.

Beberapa pendekatan yang berpengaruh pada masa lalu, seperti aliran sejarah ekonomi dan ekonomi institusional, tidak lagi berlaku atau berkurang pengaruhnya, dan saat ini dianggap sebagai pendekatan heterodoks. Pemikiran heterodoks terkini termasuk feminis, ekonomi hijau, ekonomi pascaautistik, dan termoekonomi.

1. Sejarah Mazhab (Aliran) Ekonomi

Berikut ini terdapat beberapa sejarah perkembangan mazhab (aliran) ekonomi, terdiri atas:

1.1. Aliran Praklasik

Menurut Samuelson (1992) analisis ekonomi datang dari sumber utamanya, yakni dari (1) para ahli ilmu pengetahuan (filosof) dan dari (2) kaum praktisi terutama mereka yang sangat tertarik akan masalah-masalah kebijakan ekonomi dalam kurun waktu yang bersangkutan hidup. Sebagai sebuah peta silsilah perkembangan teori dan ilmu, yang kemudian berkembang sebagai aliran-aliran pendapat tentang ekonomi, oleh Samuelson disajikan dalam bentuk istilah aliran – aliran dalam ilmu ekonomi yang memberikan petunjuk kepada peminat ilmu ekonomi peran dan pandangan para ahli ekonomi dalam kurun waktu yang bersangkutan.

Aliran praklasik terutama berkembang pada abad pertengahan dan muncul dari pandangan para pemikir dan penasihat ahli kepada raja atau penguasa dan

mereka memegang pusat kekuasaan terutama pandangan kaum Merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah.

Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro, hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan, hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme.

1.2 Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan.

Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan

kapital. Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (low of diminishing return) karena sumber daya alam itu terbatas. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik yang sangat mempengaruhi dunia dalam era globalisasi adalah pemikiran mengenai perdagangan internasional.

Pemikiran kaum klasik menentang pemikiran kaum merkantilis yang hanya mementingkan masuknya logam mulia dan berorientasi ekspor dengan meminimumkan impor barang dari luar negeri. Kaum merkantilis meletakkan tekanan pada perdagangan luar negeri. Kaum physiokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran.

Pemikiran kaum klasik telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah memelopori pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur. Pemikiran kaum klasik ini telah menginspirasi "*Washington Consensus*". Berdasarkan "*Washington Consensus*" peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.

Menurut "*Washington Consensus*" (terdiri dari 10 paket kebijakan ekonomi makro), peran pemerintah dalam pembangunan harus dibatasi dan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perencanaan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan "Government Failure", seperti birokrasi yang berlebihan, KKN, dan lain sebagainya. Membatasi APBN dapat mengurangi defisit, karena akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam ekonomi.

Pemanfaatan kekuatan pasar yaitu mengembangkan pasar yang efisien, bebas dari monopoli, oligopoli, dan eksternal disekonomis. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus bersifat “Market Friendly”. Suku bunga dan Nilai tukar asing harus ditentukan oleh pasar. Harga yang dibentuk pasar dianggap sebagai harga yang sebenarnya. Pasar dianggap lebih efisien daripada pemerintah yang menggarap sektor perekonomian, sehingga perekonomian akan lebih optimal.

Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith (1723-1790), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Jean Baptiste Say (1767-1832), David Ricardo (1772-1823), Johan Heinrich von Thunen (1780-1850), Nassau William Senior (1790-1864), Friedrich von Herman, John Stuart Mill (1806-1873) dan John Elliot Cairnes (1824-1875) memperoleh kehormatan dari Karl Marx (1818-1883) atas keklasikan dalam mengetengahkan persoalan ekonomi yang dinilai tidak kunjung lapuk.

Berbeda dengan kaum Merkantilis dan Physiokrat, kaum klasik memusatkan analisis ekonominya pada teori harga. Kaum klasik mencoba menyelesaikan persoalan ekonomi dengan jalan penelitian faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Marilah secara singkat kita lihat teori-teori perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik Diantaranya:

1. Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada Luas Pasar, pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri.

Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Adam Smith (1723-1790) sebagai *tokoh aliran klasik menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"* yaitu: "Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat itu pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri." Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi.

2. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu:

- a. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.
- b. Golongan buru ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat.
- c. Golongan tuan tanah ini mereka hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang di sewakan.

David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya.

3. Thomas Robert Malthus

Menurut Thomas Robert Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan, tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibaring dengan kemajuan faktor-faktor

atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Menurut Thomas Robert Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus.

4. John Maynard Keynes

Berpendapat bahwa pandangan klasik yang memusatkan perhatian analisa ekonominya pada teori harga, maka perlu dipahami arah penggunaan alat produksi dengan sempurna. Dalam hubungan ini maka pengertian klasik diperluas kepada para ahli ekonomi yang tidak menganggap tidak mungkin adanya suatu pengangguran yang tidak dikehendaki (involuntary unemployment).

Sanggahan Adam Smith kepada Aliran Fisiokrat dan anjurannya yang kuat kepada sistem perdagangan bebas, merupakan dukungannya yang kuat terhadap falsafah persaingan bebas. Ini disebabkan karena Adam Smith yang pertama kali dengan jelas mengemukakan peran yang penting yang dapat dilakukan oleh negara dalam perekonomian.

Itulah sebabnya masyarakat ekonomi memandang Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Secara singkat buku Adam Smith yang berjudul; “*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” yang terbit tahun 1776, membawakan jalan pikiran ekonomi yang boleh dikatakan dapat berlaku secara universal dan bahkan Adam Smith merupakan tokoh bagi berkembangnya sistem liberal (bebas).

1.3 Aliran Historis

Pandangan kaum klasik perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, dimana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Dan akhirnya melalui apa yang disebut invisible hand, akan tercipta

suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai terlalu mekanistik, dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Pada intinya pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mereka masyarakat harus di ganti sebagai satu keatuan organisme dimana interaksi social berkait dan berhubungan antar individu.

Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu system yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Investasi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama dan tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak akan ada jaminan keadilan sosial.

Bagi pemikir-pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah, karena itu semua pemikiran, teori, dan kesimpulan ekonomi harus di landaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neo-klasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal.

Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Dengan pendekatan deduktif analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum. Kemudian dari pengamatan secara umum itu diambil kesimpulan secara khusus (reasoning from the general to the particular). Bagi pakar aliran sejarah metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, dimana dari beberapa postulat kemudian meng-claim bahwa pemikiran-pemikiran mereka berlaku umum (universal).

Menurut kaum sejarah metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realitas, dan karenanya sering membawa kita kedalam kesimpulan yang sering keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut maka pemikir-pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif-historis.

Pola pendekatan induksi empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sini ini diambil suatu kesimpulan umum (reasoning from the particular to general). Dengan metode induksi empiris maka hukum-hukum, dalil-dalil dan teori-teori ekonomi hanya berlaku suatu tempat pada waktu-waktu tertentu, sebab hukum, adil maupun teori ekonomi sangat bergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Dengan demikian bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai keadaan dan masalah yang dihadapi.

Pokok-pokok aliran historis adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan perekonomian harus dibagi atas tingkat – tingkat *stufen* menurut sejarahnya
- 2) Kepentingan nasional harus diutamakan
- 3) Manusia harus dipandang satu dalam masyarakat sehingga motif mementingkan diri pribadi dipengaruhi oleh norma – norma yang lainnya. Misalnya adat istiadat, kesusilaan, dan agama.
- 4) Hukum ekonomi tidak bersifat mutlak

Tokoh-tokoh aliran historis

- 1) *Friedrich List (1789-1846)*
- 2) *Bruno Hildebrand (1812-1878)*
- 3) *Gustav Von Schmoller (1839-1917)*
- 4) *Werner Sombart (1863-1941)*
- 5) *Max Weber (1864-1920)*
- 6) *Henry Charles Carey (1793-1879)*

1.4 Aliran Sosialis

1. Sosialisme utopis

Dari pandangan pemikiran yang revolusioner Karl Marx dan Enggel pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis dengan dipelopori oleh Thomas More, Francis Bacon, Thomas Campanella, Oliver Cromwell, Gerard Winstanley, James Harrington.

Perkataan Utopis berasal dari judul buku Thomas More dalam tahun 1516 Tentang Keadaan Negara yang Sempurna dan Pulau Baru yang Utopis. Francis Bacon dalam bukunya Nova Atlantis (1623), dan Thomas Campanella (1623) dalam bukunya Negara Matahari (Civitas Solis).

Saint Simon (1760-1825), dari Perancis bukunya The New Christianity dan Charles Fourier (1772-1837) bercita-cita menciptakan tata dunia baru yang lebih baik bukan dengan kotbah tetapi dengan model percontohan. Louis Blanc mengusahakan agar didirikan ateliers sociesux yakni pabrik-pabrik yang dihimpun negara. Pierre Joseph Proudhom (1809 – 1865) Beliau yakin akan asas persamaan dan lama sekali tidak setuju dengan hak milik pribadi terhadap perusahaan.

Pokok-pokok ajaran para pelopor Sosialis Utopis adalah sebagai berikut:

- 1) Milik pribadi ditiadakan, yang ada adalah milik Bersama
- 2) Pekerjaan dikerjakan/ dilakukan secara gotong royong
- 3) Pendapatan dibagi secara adil dan sama rata

1.5 Aliran Sosialisme ilmiah

Karl Marx dilahirkan di Treves Jerman dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof serta Pemimpin Sosialisme Modern. Ia belajar di Universitas Bonn kemudian di Universitas Berlin di

Jerman dan memperoleh sarjana bidang Filsafat. Dalam masa studinya ia banyak dipengaruhi oleh Friedrich Engels seorang Filosof Besar Jerman bidang falsafah murni.

Friedrich Engels, berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman, keluarganya memiliki sejumlah perusahaan industri tekstil di Jerman maupun di Inggris. Sejak usia muda Engels menaruh minat terhadap ilmu falsafah dan ilmu pengetahuan masyarakat. Nalurnya tergugah oleh apa yang diamatinya dan disaksikannya sendiri mengenai kehidupan masyarakat dalam lingkungan kawasan industri di Jerman dan di Inggris. Engels bertemu dengan Marx tahun 1840 di Paris, sewaktu Marx hidup dalam pembuangan.

Teori tentang perkembangan ekonomi menurut Marx sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama pemikirannya tentang proses akumulasi dan konsentrasi, kedua teori tentang proses kesengsaraan/pemiskinan yang meluas (*die verelendung* atau *increasing misery*), ketiga teori tentang tingkat laba yang cenderung menurun.

Menurut teori konsentrasi perusahaan-perusahaan makin lama makin besar, sedangkan jumlahnya makin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil maka perusahaan kecil akan kalah dalam persaingan dan kemudian perusahaan kecil lenyap. Timbullah perusahaan-perusahaan raksasa. Para pengusaha kecil dan golongan menengah menjadi orang miskin.

Sedangkan teori akumulasi menyatakan bahwa para pengusaha raksasa semakin lama semakin kaya dan menumpuk kekayaan yang terkonsentrasi pada beberapa orang, dan para pengusaha kecil akhirnya jatuh miskin dan pengusaha kecil yang berdiri sendiri menjadi proletariat. Sejauhmana proses akumulasi yang dimaksud di atas bisa berjalan tergantung dari a) tingkat nilai surplus, b) tingkat produktivitas tenaga kerja, dan c) perimbangan bagian nilai surplus untuk konsumsi terhadap bagian yang disalurkan sebagai tambahan modal.

1.6 Aliran Neo – Klasik

Kira-kira pada tahun 1870-an ada pengeseran dalam aliran ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik, alasannya pada waktu itu tampak penting kemajuan teknologi dan adanya penemuan sumber-sumber produksi baru, juga ada kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut dibawah kemajuan teknologi. Aliran baru itu disebut Aliran Neo-Klasik. Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang.

Pendapat Neo-Klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikuti sertakan sebagai berikut:

a. **Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi.**

Menurut Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi, jika tingkat bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya.

b. **Perkembangan sebagai proses yang Gradual**

Perkembangan merupakan proses yang gradual dan terus menerus. Menurut Alfred Marshall menganggap bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual.

c. **Perkembangan sebagai proses yang Harmonis dan Kumulatif**

Yang dimaksud dengan Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif ialah bahwa proses ini meliputi berbagai faktor dimana faktor-faktor itu tumbuh bersama sama. Misalnya menurut Marshall menggambarkan pula bahwa harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal ekonomis dan external ekonomis. Internal ekonomis timbul karena adanya kenaikan skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisien dari pengusaha itu sendiri. Sedangkan External ekonomi timbul karena kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungan dengan perkembangan pengetahuan dan

kebudayaan. Mengenai kumulatifnya yang dikatakan oleh Allen Young bahwa perkembangan industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja di antara para buruh.

d. Optimis Terhadap Perkembangan Ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber daya alam. Dipihak lain kaum Neo-Klasik berpendapat dan yakin bahwa ada kemampuan manusia untuk mengatasi terbatasnya pertumbuhan itu.

e. Aspek Internasional

Perkembangan ekonomi suatu Negara pada umumnya mempunyai lima aspek tingkat perkembangan ekonomi yaitu:

- 1) Mula-mula negara meminjam kapital atau infor kapital. Negara itu merupakan negara pinjaman yang masi mudah dan disebut sebagai dibitur yang belum mapan. (Immatured Debtor).
- 2) Kemudian Negara peminjam tersebut dapat menghasilkan dengan kapital pinjaman tadi, membayar dividend dan bunga atas pinjaman tersebut.
- 3) etelah pengasilan nasional Negara itu meningkat maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkannya. Negara ini ada dalam tingkat dibitur yang sudah mapan (Motured Debtor).
- 4) Negara tersebut sudah dapat menerima dividend dan bunga yang lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus.
- 5) Akhirnya Negara tersebut hanya melulu menerima dividend dan bunga saja dari Negara lain. Negara itu sudah pada tingkat kreditur yang sudah mapan (Matured Creditor).

1.7 Aliran Keynes

Pada hakikatnya, konsep teori Keynes dapat dipandang sebagai suatu teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes terdiri dari tiga faktor penting, yaitu:

1) **Hasrat berkonsumsi (propensity to consume)**

Pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi.

2) **Tingkat bunga (interest) yang memiliki kaitan dengan dengan preferensi likuiditas (liquidity preference)**

Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas (independent) dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas. Sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. (Akan dijelaskan lebih lanjut di poin nomor 4)

3) **Efisiensi marginal dari investasi modal (marginal efficiency of capital)**

Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal, yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Jelaslah bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor itu.

1.8 Aliran Pasca-Keynes

Aliran ini merupakan aliran ekonomi sesudah Keynes, dimana ilmu ekonomi mengalami perkembangan sangat pesat. Ekonomi bukan lagi menjadi masalah para ahli ekonomi saja, melainkan juga menjadi masalah bagi setiap orang, masalah yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Ini berarti akan melibatkan para ahli dan masyarakat dalam sistem – sistem ekonomi mana yang mereka laksanakan.

Pada masa aliran ini, masyarakat kapitalis dengan sistem perdagangan bebas mereka, mencoba mengembangkan suatu sistem ekonomi yang disebut “*Sintesis Pemikiran Neoklasik*” (*neoclasical synthesis*) yakni suatu aliran baru dalam ilmu ekonomi yang melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang efektif, mereka mencoba mengadakan paduan antara mikro ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan Alfred Marshall dengan aliran mikro ekonomi modern dari Keynes tentang penentuan pendapatan yakni memadukan segi-segi positif dari tiap pendekatan mikro maupun makro ekonomi dalam setiap analisis ekonomi mereka.

Pasca Keynes ini mencoba menyatukan konsep-konsep pemikiran mikro ekonomi yang bersifat pendekatan individual dengan pemikiran makro ekonomi yang lebih suka melakukan pendekatan secara total, serentak dan menyeluruh. Tujuannya terutama terletak dalam pemecahan masalah-masalah penentuan pendapatan bagi semua anggota masyarakat dan pemerintah.

2 Mazhab Dalam Ekonomi Islam

Adiwarman A. Karim (2010), salah satu ahli di bidang ekonomi Islam dari Indonesia, membagi Mazhab ekonomi Islam menjadi tiga bagian utama. Mazhab pertama Baqir al-Sadr, baik Mazhab umum, dan tiga alternatif Mazhab-kritis.

3.1. Pertama

Mazhab Baqir as-Sadr. Ini Mazhab dipelopori Baqir as-Sadr dengan nya fenomenal “*Iqtishaduna*” (Ekonomi kami). Aliran pemikiran berpendapat ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi Islam dan ekonomi masih tetap Islam. Keduanya tidak pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi bertentangan. Bahwa anti-Islam, orang lain Islam.

3.2. Kedua

Mazhab umum. Aliran pemikiran tidak setuju dengan Mazhab Baqir. Mazhab kedua pemikiran ini akan setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas.

3.3. **Ketiga**

Alternatif Mazhab-kritis. Ini adalah Mazhab pelopor Kuran Timur (Ketua Departemen Ekonomi Universitas California Sourthen), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik Mazhab sebelumnya.

Mazhab Baqir dikirik sebagai Mazhab yang berusaha untuk menemukan hal-hal baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, lalu ganti dengan teori baru. Sementara itu, Mazhab umum dikritik sebagai replika dari ekonomi neoklasik (modern) yang menghilangkan variabel meliputi variabel riba dan zakat dan niat.

4. **Penentu Kegiatan Ekonomi dalam Analisis Makroekonomi**

Salah satu bagian terpenting dalam analisis makroekonomi adalah analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai suatu perekonomian. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat (permintaan agregat) dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu dan pendapatan nasional produksi nasional yang tercapai. Dalam analisis tersebut diterangkan pula komponen-komponen dari pengeluarannya agregat dan ciri-ciri dari setiap komponen tersebut. Dalam suatu perekonomian moderen komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Investasi perusahaan-perusahaan
3. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan
4. Ekpor (pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negeri-negeri lain)

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian perlu dibedakan kepada tiga bentuk abstrak atau penyederhanaan:

1. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap dan suku bunga tetap. Dalam menunjukkan penentuan

kegiatan perekonomian berdasarkan kepada dua pemisalan tersebut, analisis dibuat secara bertahap, yaitu diawali dari menerangkan keseimbangan dalam perekonomian dan sektor, kepada keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor, dan akhirnya dalam perekonomian yang terdiri dari empat sektor.

2. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian.

3. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan suku bunga mengalami perubahan. Melalui analisis ini dapat diterangkan bagaimana perubahan-perubahan penawaran uang dan suku bunga mempengaruhi keseimbangan kegiatan perekonomian.

Dari ketiga analisis diatas, Ketiga aspek ini merupakan analisis yang menerangkan kegiatan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang yakni jangka waktu yang dimana faktor-faktor produksi seperti buruh, kapasitas barang modal dan teknologi mengalami perubahan, akan dihadapi masalah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Sadono Sukirno, 2012. Sumber Buku: Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga Cetakan ke-21 tahun 2012, Penerbit: PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, (1992), Economics, 12th Ed, McGraw Hill, International Book Company., Inc

Created by: DosenPendidikan.com/2014. <https://dosenpendidikan.co.id>

Adiwarman A.Karim. 2010. Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Profil Penulis

Warda



Kelahiran Rajuni 27 Maret 1990 berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) jurusan ilmu ekonomi pada tahun 2013 dan pendidikan S2 di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016 jurusan ilmu ekonomi dan mengambil konsentrasi Ekonomi Islam.

Saat ini aktif pengajaran Pengantar ekonomi Makro, Perekonomian Indonesia, Pengantar ekonomi Mikro, Pengantar Bank syariah, selain itu juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



BAB X
PENDAPATAN
NASIONAL

Sriwanti Belani, S.E., M.M.

BAB X
PENDAPATAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi merupakan variabel ekonomi makro yang saling berhubungan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perubahan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan nasional, maka jumlah dana yang bisa ditabung/diinvestasikan semakin besar. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu pertanda suksesnya pembangunan ekonomi. Demikian juga, suksesnya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Nasional adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Data pendapatan nasional yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Perkiraan ini dapat digunakan untuk seseorang yang ingin melakukan bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, dan untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa yang akan datang. Tujuan dari mempelajari pendapatan nasional yaitu untuk menilai tingkat kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, untuk memperoleh pemikiran yang maksimal nilai barang dan jasa yang dihasilkan rayat dalam kurun waktu satu tahun, dan untuk membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang. Manfaat mendalami pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tentang susunan dalam perekonomian suatu negara, dapat membandingkan kondisi perekonomian antar daerah atau antar provinsi, dan juga dapat membandingkan kondisi perekonomian negara satu dengan negara lainnya.

B. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional memiliki arti khusus dilambangkan dengan huruf *Y*. Perhitungan Pendapatan Nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu Petty menamakannya dengan “Pendapatan Masyarakat” yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun. Yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan negara. pendapatan masyarakat sekaligus juga merupakan pengeluaran masyarakat, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat yang ditaksir oleh Sir William Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penaksiran yang lebih sistematis dikerjakan oleh Gregory King pada tahun 1696. Pada waktu itu, King menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional.

Negara kedua yang menghitung pendapatan nasional adalah Perancis. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Pierre le Pesant de Boisguillebert pada tahun 1690an. Pada awal tahun 1700an Marshall Vauban menyempurnakan perhitungan dengan perluasan cakupan. Menjelang akhir abad ke-18 Francois Quesnay dan sejumlah fisiokrat melakukan perhitungan pendapatan nasional negara Perancis dengan pendekatan produksi. Rintisannya dilanjutkan oleh Lavoisier dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel ekonomi.

Russia dan Amerika Serikat merupakan negara ketiga dan keempat. Perhitungan pendapatan nasional negara Russia dilakukan oleh BFG Hermann dan AN Radishchev sekitar akhir abad ke-18. Perhitungan pendapatan nasional di Amerika Serikat sudah dilakukan sejak tahun 1843 oleh George Tucker dari University of Virginia. Namun perhitungan yang lebih seksama baru dilakukan pada awal tahun 1930an oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Simon Kuznets. Sampai dengan sebelum Perang Dunia I berakhir tercatat ada 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Di sepanjang kurun antara dua Perang Dunia negara yang menghitung atau menaksir pendapatan nasional bertambah

secara drastis, dari 13 negara pada tahun 1919 menjadi 33 negara pada tahun 1939. Jumlah ini meningkat pesat menjadi 93 negara selama dasawarsa pertama sesudah perang. Minat besar negara-negara untuk menghitung pendapatan nasional dipicu antara lain oleh tiga hal. Pertama, terbitnya “The General Theory” yang dikenalkan oleh Keynes. Isinya mengenai teori tentang penentuan pendapatan nasional. Kedua, terbitnya “Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts” oleh Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) pada tahun 1947 (Kendrick, 2008). Liga Bangsa-Bangsa kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, United Nations). Ketiga, terbentuknya International Association for Research in Income and Wealth pada tahun 1947.

Di samping semua itu, pada tahun 1953 PBB menerbitkan “A System of National Accounts and Supporting Tables”(biasa disingkat SNA), dan dibagikan kepada negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1968 SNA melakukan perbaikan menjadi acuan perhitungan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Konsep dari SNA senantiasa diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, transaksi keuangan dan teknologi. SNA terbaru yang sekarang digunakan adalah SNA 2008.

Negara pertama yang menghitung pendapatan nasional dengan konsep Produk Nasional Bruto adalah Amerika Serikat pada tahun 1942. Negara ini baru menyajikan pendapatan nasional dengan konsep Produk Domestik Bruto pada tahun 1991. Selain mengacu pada SNA, Amerika Serikat juga memiliki acuan sendiri berjudul “National Income and Product Accounts of the U.S.”, biasa disingkat NIPA. Negara-negara Eropa juga mempunyai pedoman sendiri dengan nama “European System of Accounts”, disingkat ESA. Seperti halnya SNA dan NIPA, ESA juga selalu melakukan perbaikan. ESA terbaru yang kini diacu oleh negara-negara Eropa adalah ESA 2010. Pada masa sekarang ini semua negara di bumi menghitung pendapatan nasionalnya, terutama dengan konsep Produk Domestik Bruto atau PDB, sehingga kinerja ekonomi

antarnegara bisa dibandingkan. Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada SNA 2008.

C. PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Menurut Sadono Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara fiktif pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Pendapatan Nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pendapatan Nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal disuatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Atau dengan kata lain Pendapatan Nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan

domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut.

D. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NASIONAL

a. Keseluruhan Permintaan dan Penawaran (*Aggregate Demand and Supply*)

Keseluruhan Permintaan (*Aggregate Demand*) adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan Keseluruhan Penawaran (*Aggregate Supply*) adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional.

b. Investasi

Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional selama periode tertentu. Penanaman modal atau sering disebut dengan investasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan, maupun organisasi bahkan individu yang mana sering mengalokasikan penghasilan yang dimiliki untuk simpanan dalam bentuk barang dan jasa dengan harapan akan memberikan manfaat dan keuntungan kedepan (Harjono 2012).

c. Konsumsi

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang, Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas SDM tinggi, hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia, walaupun Indonesia memiliki SDM yang banyak serta kaya, faktor kualitas SDM menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk mengelola SDM yang ada di dalamnya. Seperti halnya yang dibahas pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi Sdm.

e. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau SDA yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya, biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan.

f. Tingkat Teknologi

Tingkat teknologi suatu negara dapat memengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak.

g. Stabilitas Keamanan

Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme bahkan peledakan bom akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut, serta sebaliknya. Apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik maka akan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya meningkat..

h. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih serta berkualitas maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara.

E. JENIS–JENIS PENDAPATAN NASIONAL

Ada beberapa konsepe / jenis – jenis pendapatan nasional antara lain sebagai berikut :

a. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode. Dalam menghitung GDP jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitngan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu neara, baik di luar negeri mapun dalam negeri. Di negara berkembang Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan

nasional lainnya. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Dimana didalamnya termasuk *output* barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara yang bersangkutan maupun milik warga negara asing yang berdomisili di negara yang bersangkutan.

Didalam perekonomian negara maju maupun berkembang barang dan jasa diproduksi bukan dari perusahaan milik penduduk negara tersebut namun juga berasal dari perusahaan milik negara lain atau perusahaan asing. Adanya perusahaan multinasional dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Perusahaan multinasional menyediakan modal, teknologi serta tenaga kerja dimana perusahaan tersebut beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi didalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta menambah ekspor. Operasi perusahaan multinasional merupakan bagian yang cukup penting kegiatan ekonomi suatu negara dan nilai produksi yang disumbangkan dalam perhitungan pendapatan nasional.

b. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun. Dimana yang dihitung dalam kategori PNB adalah produksi barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi/input yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan, baik yang secara geografis berdomisili didalam negeri maupun yang secara geografis berada dinegara lain atau luar negeri. Pengelompokan PDB dan PNB terdapat dua kategori yaitu PDB atau PNB nominal dan PDB atau PNB riil. PDB atau PDB nominal adalah pengukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara menurut harga yang berlaku ketika barang dan jasa tersebut diproduksi. Sedangkan PDB atau PNB riil merupakan pengukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi pada kurun waktu

tertentu menurut harga konstan pada tahun tertentu (sebagai tahun dasar) dan seterusnya digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional pada tahun berikutnya.

c. Produk Nasional Neto (*Net National Product*)

Investasi dalam sektor perusahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya investasi dapat mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimasukkan adalah total pengeluaran investasi bruto. Namun yang lebih relevan adalah investasi neto (investasi bruto-depresiasi). Untuk menghasilkan output yang lebih akurat, maka PNB dikurangi depresiasi yang menghasilkan NNP. Produk Nasional Netto (NNP) adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian.

d. Pendapatan Nasional Netto (*Net National Income*)

Dalam perhitungan output nasional dengan metode pendapatan dijelaskan bahwa Pendapatan Nasional (PN) adalah balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN ke PNN harus mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung dan menambahkan angka subsidi. Pendapatan Nasional Netto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

e. Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Yang artinya bahwa pendapatan yang di peroleh tanpa melakukan pekerjaan tertentu atau dengan kata lain Pendapatan Personal (PP) adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi.

f. Pendapatan Personal Disposabel (*Disposable Personal Income*)

Pendapatan Disposibel adalah pendapatan yang siap dibelanjakan guna membeli barang dan/atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak.

F. MANFAAT PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional memiliki manfaat dari berbagai aspek. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah manfaat dari pendapatan nasional:

- Untuk membandingkan peran seorang penggerak ekonomi atau pemimpin dan mengetahui kekurangan yang sebelumnya terjadi di bidang ekonomi, sehingga di masa mendatang dapat diperbaiki.
- Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga negara bisa mengetahui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau kemunduran.
- Untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara

- Lewat pendapatan nasional maka bisa dilihat negara tersebut masuk ke dalam kategori maju atau berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya artinya negara tersebut semakin maju begitu juga sebaliknya
- Untuk mengetahui struktur perekonomian sebuah negara. Pendapatan nasional bisa dijadikan tolak ukur untuk melakukan perbaikan jika terjadi kelemahan ekonomi. Hal tersebut juga dapat menyatakan persentase pendapatan nasional, melihat dari jenis pendapatan (*income*) atau produksi (*product*).
- Penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan agar peningkatan perekonomian dapat terjadi tiap tahunnya.
- Opini masyarakat mengenai pendapatan nasional dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai. Selain itu juga opini masyarakat dapat menyadarkan pemerintah bahwa perekonomian suatu negara adalah hal yang penting
- Melihat sebuah negara mendapatkan pendapatan nasional paling tinggi dari sektor tertentu, seperti sektor pertanian atau sektor industri.
- Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah.
- Melihat bagaimana tingkat perekonomian sebuah negara telah melakukan evaluasi dari pendapatan nasional tersebut apakah kebijakan bisa ditingkatkan lagi atau tidak.
- Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional.
- Data pendapatan nasional bisa dipakai juga untuk menggolongkan sebuah negara menjadi negara pertanian Industri atau jasa. Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk kedalam negara pertanian atau agraris.
- Menentukan besarnya kontribusi sektor perekonomian. Data-data di berbagai sektor pada sebuah negara dapat dipakai untuk membandingkan Kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu membandingkan

perekonomian antar negara dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

G. METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Secara teoritis, perhitungan GNP dilakukan dengan tiga cara, yakni sebagai berikut (Rosyidi, 2012):

a. Pendekatan produksi (*Production Approach*)

Menurut pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sector - sektor produktif. Cara ini menghasilkan *gross national product* atau GNP Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (*value added*) dari masing-masing lapangan usaha/sector-sector ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Dimana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC) yang dikeluarkan oleh PBB Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi adalah sebagai berikut :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan atau konstruksi
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa lain

Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan

lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara, dan antar waktu di suatu negara. Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$Y = (Q1 \times P1) + (Q2 \times P2) + (Q3 \times P3) + \dots + (Qn \times Pn)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

P1 = Harga barang ke-1

Pn = Harga barang ke-n

Q1 = jenis barang ke-1

Qn = jenis barang ke-n

b. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*)

Dalam metode pendapatan, Pendekatan pendapatan adalah cara menjumlahkan semua pendapatan termasuk upah sewa bunga dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Atau dengan kata lain pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya satu tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa (rent). Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah (wage). Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga (interest). Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba (Profit). Adapun Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi untuk pekerja (*Compensation for employees*)
2. Keuntungan perusahaan (*Corporate profits*)
3. Pendapatan usaha perorangan (*sole proprietor's income*)
4. Pendapatan sewa (*Rental income of person*)

5. Bunga neto (*Net interest*)

Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$PN = w \text{ (wages/salary)} + i \text{ (interest)} + r \text{ (rent)} + p \text{ (profit)}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

R = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya

W = Pendapatan bersih dari sewa

i = Pendapatan dari bunga

p = Pendapatan dari keuntungan / usaha perorangan

c. Pendekatan Pengeluaran

Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam empat sektor yang sama dalam metode pendapatan. Perhitungan pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah semua pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi, seperti rumah tangga (Consumption), pemerintah (government), pengeluaran investasi (investment) dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.

Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$PN = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional

C = consumption (konsumsi rumah tangga)

I = investment (investasi)

G = government expenditure (pengeluaran pemerintah)

X = ekspor

M = impor

H. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

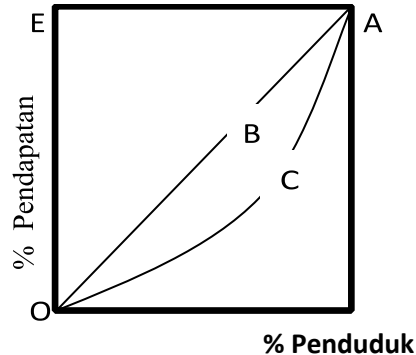
PDRB merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, disuatu wilayah dalam periode tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan atas factor produksi. Produk domestik regional bruto dapat diartikan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

I. PENDAPATAN PER KAPITA

GDP dan GNP diperlukan untuk menentukan besarnya pendapatan per kapita (*Income Per Capita*). Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata setiap penduduk di satu negara dalam 1 tahun yang dihitung dari jumlah GDP/GNP dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita dinyatakan dalam satuan Dollar Amerika Serikat sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain. Pendapatan per kapita memberikan gambaran umum kedudukan tingkat kesejahteraan suatu negara dibandingkan negara lain.

J. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Distribusi pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien Gini atau Gini rasio. Koefisien gini diketahui dari bentuk kurva Lorenz, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan.



Gambar 12. Kurva Distribusi

Keterangan :

1. Semakin besar indeks gini, semakin timpang (tidak merata) distribusi pendapatannya
2. Semakin kecil indeks gini, semakin merata distribusi pendapatannya
3. Kurva Lorenz ditunjukkan garis lengkung OA

Luas Daerah B $IG = \frac{\text{Luas Daerah B}}{\text{Luas Segitiga OAD}}$
4. OA merupakan garis pemerataan sempurna 5. Indeks Gini / Koefisien Gini dirumuskan : D

Koefisien gini atau rasio gini merupakan rasio (perbandingan) antara luas bidang yang diarsir dengan luas segitiga AOD. Koefisien Gini berkisar antara 0 dengan 1. Semakin merata pendapatan, maka luas daerah yang diarsir semakin kecil atau mendekati garis diagonal AO. Apabila pendapatan merata sempurna maka luas daerah yang diarsir sama dengan nol atau berhimpit dengan garis diagonal. Rasio gini sama dengan nol. Sebaliknya, jika hanya satu pihak yang menguasai pendapatan, maka luas daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga AOD, sehingga rasio gini sama dengan 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, RA. 2012. “Peningkatan Kemampuan Belajar Pendapatan Nasional Dengan Komik Ekonomi Pada Siswa Kelas X SMA N 1 Mranggen”. Demak: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. VII, No. 1.
- Dumairy, Syamsul Hadi, Muhammad. 2018. “ Model Perhitungan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Surakarta: Jurnal CMES volume XI Nomor 2.
- Fauziana, Lutvi. Dkk. 2014. “Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia”. Semarang: Economics Development Analysis Journal
- Rusdi, Muhamad. 2018. Pendapatan Nasional Dan Kesejahteraan Ekonomi. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan- Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar. 2016. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro. 2001. Suatu Pengantar Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.*
- Priyono dan Teddy Chandra. 2016. Esensi Ekonomi Makro. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Profil Penulis
Sriwanti Belani



Lahir di Desa Tikupon, 08 Seotember 1989 anak Tunggal pasangan dari Ayah Manaf Belani (Alm) dan Ibu Tadek Bunti. Penulis menempuh Pendidikan di SD Negeri 1 Tikupon Kecamatan Bualemo, di SMP Negeri 2 Bualemo, di SMK Negeri 1 Luwuk dan melanjutkan Kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Luwuk kemudian pada Tahun 2012 penulis melanjutkan Kembali kuliah S2 di Univeristas Muslim Indonesia Makassar. Setelah lulus penulis bertemu jodoh dan menikah di Tahun 2016 dengan Moh. Sutami Dimu, SKM dan memiliki 2 orang putra yang 199asyara Uwais Hafiz Al Qarni Dimu dan Syawal Al Khalifi Dimu yang saat ini keduanya masih balita. Alhamdulillah setelah menikah dan punya anak penulis di panggil kembali untuk mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Luwuk tempat kuliah sewaktu S1 dulu & kini mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital. Terima Kasih.

BAW XI KEBIJAKAN STABILISASI

DR. Muhammad Ikram Idrus, SE, MS.



A. PENGERTIAN KEBIJAKAN STABILISASI

Stabilitas adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menggambarkan 201asyar keuangan suatu negara yang hanya menampilkan fluktuasi pertumbuhan output yang kecil dan memiliki rekam jejak inflasi yang rendah. Semua bank sentral ekonomi maju, dan 201asyarakat besar negara lain di dunia, melihat stabilitas ekonomi sebagai keadaan yang diinginkan (Market Business News, 2023).

Beberapa 201asyar yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi suatu negara adalah terdiri dari lokasi geografis, modal manusia, cuaca, perkembangan teknologi, tingkat infrastruktur, sumber daya alam, harga komoditas, dan 201asyar politiknya.

Untuk beberapa ekonomi, kurangnya sumber daya alam tidak menghalangi untuk menjadi salah satu yang paling stabil di dunia. Contohnya Jepang, adalah kelompok pulau yang berpenduduk sangat padat dengan sumber daya alam yang 201asyarakat sangat sedikit, memiliki ekonomi yang sangat stabil. Contoh lain yang disampaikan Hayes (2021), yaitu sebuah studi oleh Brookings Institution mencatat bahwa ekonomi AS telah mengalami resesi sekitar satu dari setiap tujuh bulan sejak akhir Perang Dunia II. Siklus ini dipandang tak terelakkan, tetapi kebijakan stabilisasi berupaya melunakkan pukulan dan mencegah meluasnya pengangguran.

Negara-negara yang menikmati stabilitas terus meningkatkan efisiensi, produktivitas yang lebih besar, dan tingkat pengangguran yang rendah. Untuk mencapai stabilitas itu diperlukan adanya kebijakan stabilitas yang dibuat oleh pemerintah nasional. Modifikasi kebijakan ekonomi oleh pemerintah adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi tanpa perubahan besar dalam pengangguran, inflasi, dan suku bunga.

Istilah kebijakan stabilisasi juga digunakan untuk menggambarkan 201asyarakat pemerintah dalam menanggapi krisis atau guncangan ekonomi seperti gagal bayar utang negara atau jatuhnya pasar saham. Tanggapan dapat mencakup 201asyarakat darurat dan reformasi undang-undang (Hayes, 2021). Di

sisi lain, Ettliger (2008) menyebut kebijakan stabilisasi adalah untuk memulihkan ekonomi ke fungsi dasar yang normal-blok dasar yang diperlukan untuk membangun pemulihan ekonomi penuh dan pertumbuhan ekonomi jangka 202asyara.

Jadi kebijakan stabilisasi dapat diartikan sebagai modifikasi kebijakan ekonomi oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Wallstreetmojo (2023) menyebut stabilitas ekonomi adalah mengacu pada situasi bahwa semua sumber daya ekonomi penting suatu negara tersedia bagi warganya, dan tidak ada perubahan ekonomi yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga. Ini membantu mencapai tujuan makroekonomi seperti mengurangi pengangguran, neraca pembayaran, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. MEMAHAMI KEBIJAKAN STABILITAS

Setiap negara senantiasa 202asya terhadap stabilitas perekonomiannya (*economic stability*) karena bila terjadi ketidakstabilan maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti yang sudah disebutkan yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi.

Kebijakan stabilisasi yang dibuat berusaha untuk membatasi ayunan yang tidak menentu dalam total output ekonomi, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) negara, serta mengendalikan lonjakan inflasi atau deflasi. Stabilisasi faktor-faktor tersebut umumnya mengarah pada tingkat pekerjaan yang sehat (Hayes, 2021).

Mempromosikan stabilitas ekonomi adalah tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makro-ekonomi lainnya tercapai. Ini juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk penciptaan lapangan kerja dan neraca pembayaran (Nasrudin, 2019).

Stabilitas penting dalam membuat keputusan ekonomi. Ini memudahkan bisnis untuk membuat prediksi 202asyaraka-indikator ekonomi seperti inflasi,

yang berguna untuk merumuskan strategi seperti penetapan harga jual atau kenaikan gaji karyawan. Sebaliknya, ketidakstabilan dapat meningkatkan ketidakpastian. Ini juga menghambat investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak standar hidup. Tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah untuk meminimalkan ketidakstabilan tanpa mengurangi kemampuan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup melalui peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan (Nasrudin, 2019).

Jadi, kebijakan stabilisasi dalam pengertian ekonomi adalah mengacu pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk memastikan bahwa perekonomian tetap stabil, kebijakan ini mengurangi fluktuasi harga dalam suatu perekonomian melalui penerapan langkah-langkah tertentu dan pemantauan siklus ekonomi. Mengingat bahwa ekonomi mengalami fluktuasi (naik dan turun), pemerintah menerapkan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter untuk menjaga perekonomian tetap terkendali. Kebijakan stabilisasi adalah 203asyara yang digunakan Bank Sentral atau Pemerintah untuk mencegah perubahan harga yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) dan output ekonomi. Kebijakan stabilisasi sering digunakan sebagai kebijakan ekonomi dan diskresioner yang menjaga ekonomi dalam keadaan sehat. Fluktuasi yang terjadi dalam suatu perekonomian, adalah sesuatu yang dapat terjadi secara alami atau karena sebab-sebab yang tidak wajar. Beberapa faktor, termasuk inflasi dan deflasi meningkatkan perekonomian dan merupakan tugas pemerintah dan bank sentral untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Kebijakan stabilisasi merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan mencegah lonjakan serta pergerakan harga yang tidak menentu dalam perekonomian. Seperti namanya, kebijakan stabilisasi membantu menstabilkan perekonomian melalui kontrol yang efektif atas permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian, tingkat harga yang sehat, dan pemantauan perdagangan yang memadai dalam perekonomian (Gordon, 2023).

Kebijakan stabilisasi selain mengacu pada penyesuaian kebijakan moneter oleh bank sentral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi juga menjaga agar tanpa fluktuasi besar dalam pengangguran, inflasi, dan suku bunga (Zanzalari, 2022).

C. AKAR KEBIJAKAN STABILISASI

John Maynard Keynes adalah ekonom pertama yang memperkenalkan kebijakan stabilisasi sebagai proses utama untuk menghentikan atau mencegah pergerakan yang tidak menentu dan lonjakan harga barang dalam suatu perekonomian. Inti dari kebijakan stabilisasi adalah kontrol permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Perubahan harga yang tiba-tiba dapat mempengaruhi banyak aspek ekonomi, termasuk tingkat lapangan kerja, jumlah uang beredar, dan lain-lain. Ada banyak contoh yaitu kebijakan stabilisasi ini dapat diterapkan atau digunakan oleh Pemerintah dan Bank Sentral. Selama guncangan keuangan atau krisis ekonomi, kebijakan stabilisasi dapat digunakan sebagai mekanisme pemulihan untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan tersebut juga dapat diterapkan untuk mencegah lonjakan atau deflasi yang tidak menentu dan pergerakan inflasi dalam suatu perekonomian.

D. PENYEBAB KETIDAKSTABILAN

Beberapa uraian yang telah disampaikan maka dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan ekonomi makro dapat disebabkan oleh kurangnya stabilitas keuangan, seperti yang dicontohkan oleh “Resesi Hebat” yang diakibatkan oleh krisis keuangan misalnya yang terjadi pada tahun 2007–2008. Moneteris menganggap bahwa jumlah uang beredar yang sangat bervariasi mengarah ke tingkat output yang sangat bervariasi. Milton Friedman percaya bahwa ini adalah 204asyarakat204 utama Depresi Hebat pada tahun 1930-an.

John Maynard Keynes percaya, dan Keynesian berikutnya percaya, bahwa permintaan agregat yang tidak stabil menyebabkan ketidakstabilan ekonomi

makro, sementara ahli teori siklus bisnis riil percaya bahwa fluktuasi pasokan agregat mendorong siklus bisnis.

E. EFEK KETIDAKSTABILAN

Ketidakstabilan ekonomi dapat memiliki sejumlah efek 205asyarakat pada kesejahteraan 205asyarakat dan negara secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan di mana 205asya ekonomi kehilangan nilai dan investasi terhambat atau terhenti. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran, resesi ekonomi, atau dalam kasus ekstrim, keruntuhan 205asyarakat.

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STABILITAS EKONOMI

Stabilitas ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan warga negara. Ini merupakan indikator ekonomi yang sehat, bebas dari gangguan. Fluktuasi ekonomi dapat berupa keuangan, politik, sosial, hukum, atau teknologi. Dengan demikian, suatu negara harus bersiap untuk meminimalkan kerentanannya terhadap masalah ekonomi.

Berikut ini dapat dilihat uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian, yaitu :

Tabel 2. Faktor-Faktor Perekonomian

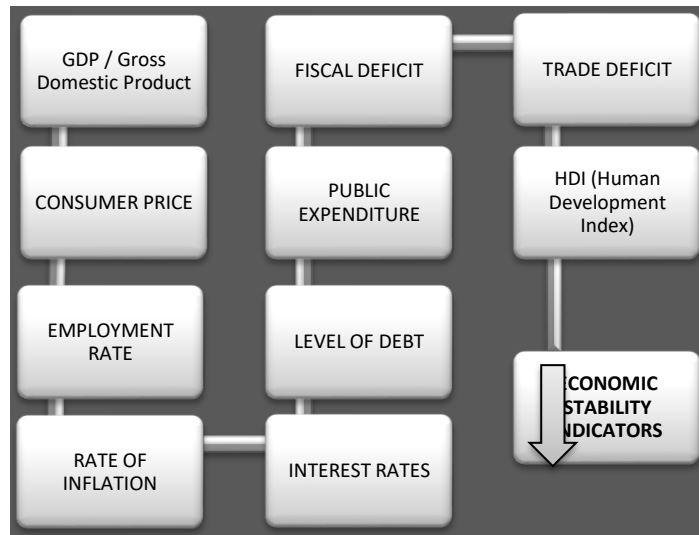
Faktor	Dampak
Finansil	Ini adalah faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan terkait dengan sistem keuangan negara. <ul style="list-style-type: none"> - Contohnya termasuk inflasi tinggi, utang nasional meningkat, defisit fiskal meningkat, dan suku bunga tinggi. - Terlalu banyak pinjaman keuangan dengan kredit buruk dan risiko gagal bayar hipotek yang tinggi (penyebab krisis keuangan 2007-2008), yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global.

Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor politik berkaitan dengan pemerintahan dan urusan negara. - Keretakan antara partai politik, korupsi, dan kerusuhan merusak ekonomi. -
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Ini termasuk variabel-variabel yang berdampak tidak hanya pada sektor atau kelompok tetapi masyarakat secara keseluruhan, - Contoh terbaik adalah pandemi COVID-19, yang menyebabkan pengangguran massal di beberapa industri, sementara yang lain seperti e-commerce dan layanan online mengalami peningkatan baru. -
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor hukum mengacu pada perubahan kebijakan pemerintah atau undang-undang yang mendorong atau melarang kegiatan tertentu. - Undang-undang bank dan amandemen oleh pengadilan yang berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis berada di bawah kerangka hukum. -
Teknologi	<p>Teknologi berubah dengan cepat di seluruh dunia. Akibatnya, hal itu menyebabkan beberapa efek ekonomi makro.</p> <p>Misalnya, pekerja terampil kehilangan pekerjaan karena otomatisasi, pengenalan uang digital, dan mata uang kripto.</p>

Sumber : Wallstreetmojo Team, Economic Stability, 2023.

G. INDIKATOR STABILITAS EKONOMI

Karena pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sangat erat kaitannya, ekonomi yang tumbuh harus stabil terlebih dahulu, baru kemudian maju. Dengan demikian, indikator utama stabilitas ekonomi mirip dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator dimaksud ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 13. Indikator Stabilitas Ekonomi

Sumber : Wallstreetmojo Team, Economic Stability. 2023.

Masing-masing indikator dijelaskan seperti berikut :

1. GDP (The Gross Domestic Product / PDB)

Produk Domestik Bruto adalah indikator ekonomi makro yang penting. Ini menggambarkan tingkat pendapatan nasional suatu negara. Pendapatan yang lebih tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Consumer Prices (Harga Konsumen)

Ini bertindak sebagai indikator untuk kekurangan atau kelebihan sumber daya yang memengaruhi tanggapan konsumen dan lembaga terhadap pasar yang berubah. Semua orang lebih baik ketika harga konsumen stabil.

3. Employment Rate (Tingkat Ketenagakerjaan)

Tingkat lapangan kerja atau pengangguran menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi. Ini menjelaskan jumlah orang yang duduk menganggur tanpa berkontribusi pada perekonomian.

4. Rate Of Inflation (Tingkat Inflasi)

Tingkat inflasi mungkin merupakan indikator stabilitas ekonomi yang lebih andal. Inflasi ringan diperlukan untuk perekonomian, tetapi tingkat inflasi yang tinggi dapat membahayakan perekonomian. Selain itu, inflasi yang tinggi menghambat atau menghentikan investasi dari negara lain karena uang dan aset kehilangan nilainya.

5. Interest Rates (Suku Bunga)

Suku bunga pinjaman yang rendah akan mendorong pengeluaran konsumen dan mendorong jumlah uang beredar, yang menjaga stabilitas ekonomi.

6. Level Of Debt (Tingkat Utang)

Utang nasional menunjukkan kesehatan ekonomi. Utang diperlukan karena memastikan pengeluaran pemerintah. Namun, utang yang terlalu banyak dapat mengancam perekonomian dan mengganggu stabilitas ekonomi.

7. Public Expenditure (Pengeluaran Publik)

Efek pengeluaran publik terhadap stabilitas ekonomi sangat banyak. Pemerintah harus membelanjakan secara memadai di bidang-bidang di mana fokus diperlukan untuk mempertahankan stabilitas keuangan.

8. Fiscal Deficit (Defisit Fiskal)

Defisit fiskal muncul ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Ini dapat merugikan ekonomi karena akan mengurangi pengeluaran ekonomi. Pemerintah akan meminjam dana untuk membiayai defisit tersebut. Defisit yang lebih rendah menyiratkan stabilitas yang lebih baik.

9. Trade Deficit (Defisit Perdagangan)

Defisit perdagangan mengacu pada nilai impor atas ekspor. Ekonomi yang sehat harus memiliki ekspor yang lebih tinggi daripada impor untuk memastikan lebih banyak uang mengalir ke negara tersebut. Namun, inkonsistensi muncul ketika persamaan terganggu.

10. HDI (Human Development Index / Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia menyajikan standar hidup masyarakat, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan demikian, melek huruf, harapan hidup, dan angka kematian bayi berada di bawah HDI.

Selain itu, indikator lainnya adalah nilai tukar mata uang dan harga saham dunia. Seiring kemajuan indikator ini, ekonomi mencapai stabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memantau hal itu dan membuat amandemen yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian.

H. KUNCI KEBIJAKAN STABILISASI

Economic stability atau stabilitas ekonomi adalah ketika indikator makroekonomi bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga (Nasrudin, 2019).

Kunci dari kebijakan stabilisasi yaitu berupaya menjaga perekonomian tetap seimbang dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai kebutuhan. Suku bunga dinaikkan untuk mencegah pinjaman untuk dibelanjakan dan diturunkan untuk meningkatkan pinjaman untuk dibelanjakan. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan dengan meningkatkan atau menurunkan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat. Hasil yang diinginkan adalah ekonomi yang terlindung dari efek perubahan permintaan yang liar.

Dalam bahasa berita bisnis, kebijakan stabilisasi dirancang untuk mencegah ekonomi dari over-heating (kelebihan panas) atau slowing down (perlambatan yang berlebihan) (Hayes, 2021).

Menjaga stabilitas ekonomi sangat penting karena menciptakan kepercayaan dan kepastian di benak para investor yang ingin berinvestasi dalam modal manusia dan sumber daya teknologi. Selain itu, pemerintah dapat mengidentifikasi indikator ekonomi yang stabil dan mengendalikannya.

I. MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN STABILISASI

Karena ekonomi berfluktuasi, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal atau moneter untuk memastikan ekonomi berjalan dengan baik. Kebijakan stabilisasi adalah solusi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi yang merugikan PDB ekonomi. Ini sering digunakan sebagai alat ekonomi dan politik untuk menjaga kesejahteraan ekonomi (Studysmarter, 2023). Masalah ketidakstabilan ekonomi (termasuk fluktuasi output, tenaga kerja, dan inflasi) tujuan akhirnya adalah untuk memberikan landasan bagi kebijakan stabilisasi, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dan moneter secara sistematis untuk meningkatkan kinerja perekonomian (Guitton, 2006). Issing (2005) juga mempertegas bahwa secara umum, kebijakan stabilisasi dapat dilaksanakan dengan bantuan kebijakan moneter atau fiskal.

Kebijakan fiskal sering dikontraskan dengan kebijakan moneter yang diberlakukan (Hayes, 2023). Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua alat berbeda yang berdampak pada aktivitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan oleh pembuat kebijakan dan bank sentral di seluruh dunia untuk mencapai stabilitas ekonomi. Ada perbedaan mencolok tentang cara kerjanya dan dampak yang ditimbulkan masing-masing.

Kebijakan moneter melibatkan kebijakan yaitu bank sentral mengelola pasokan uang. Kebijakan-kebijakan ini memungkinkan bank sentral untuk mengelola cara-cara di mana uang baru dapat disuntikkan. Di sisi lain, kebijakan fiskal melibatkan kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian dengan bantuan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak.

Kebijakan moneter umumnya digunakan untuk melawan inflasi, sedangkan kebijakan fiskal biasanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat resesi ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal dapat digunakan untuk merangsang perekonomian.

Langkah-langkah stabilisasi, seperti kebijakan fiskal atau moneter, membantu menjaga ekonomi tetap pada jalurnya. Jadi, pemerintah dapat

mengambil kebijakan moneter yang mudah atau ketat sesuai dengan kebutuhan keuangan.

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan cara pemerintah mengelola aspek pengeluaran dan perpajakan. Ini adalah cara pemerintah menstabilkan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memodifikasi kebijakan fiskal dengan membawa langkah-langkah dan perubahan tarif pajak untuk mengendalikan defisit fiskal perekonomian.

Berikut ini adalah poin-poin perbedaan tertentu antara kebijakan moneter dan fiskal.

Tabel 3. Perbedaan Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan moneter	Kebijakan fiskal
Definisi	
Ini adalah alat keuangan yang digunakan oleh bank sentral dalam mengatur aliran uang dan suku bunga dalam suatu perekonomian	Ini adalah alat keuangan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengelola pendapatan pajak dan kebijakan yang terkait dengan pengeluaran untuk kepentingan ekonomi.
Dikelola Oleh	
Bank Sentral suatu perekonomian	Kementerian Keuangan suatu perekonomian
Pengukuran	
Ini mengukur tingkat suku bunga yang berlaku untuk meminjamkan uang dalam perekonomian	Ini mengukur pengeluaran modal dan pajak ekonomi
Area fokus	
Stabilitas suatu perekonomian	Pertumbuhan ekonomi

Dampak terhadap nilai tukar	
Nilai tukar membaik ketika ada suku bunga yang lebih tinggi	Itu tidak berdampak pada nilai tukar
Target	
Kebijakan moneter menargetkan inflasi dalam perekonomian	Kebijakan fiskal tidak memiliki target khusus
Dampak	
Kebijakan moneter berdampak pada pinjaman dalam perekonomian	Kebijakan fiskal berdampak pada defisit anggaran

Sumber : BYJU'S, Difference between Monetary Policy and Fiscal Policy, 2023

Pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen untuk menstabilkan ekonomi secara aktif sehubungan dengan permintaan agregat. Kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar dengan efek diferensial dipandang sebagai alat untuk mencapai ekuilibrium pendapatan-pekerjaan internal suatu negara dengan keseimbangan eksternal dalam pembayaran internasionalnya. Robert Mundell, seorang ekonom Kanada, percaya bahwa efektivitas kebijakan dalam perekonomian terbuka kecil sangat tepat, menyatakan bahwa kebijakan moneter hanya bekerja di pasar nilai tukar mengambang, sedangkan kebijakan fiskal akan impoten dan hanya efektif pada nilai tukar tetap (Breman, 2016).

Berikut adalah uraian stabilitasi melalui kebijakan fiskal dan moneter.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah keputusan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran untuk mengubah tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dimulai dengan evolusi Model Keynesian oleh John Maynar. Keynes percaya bahwa inflasi atau resesi hanya dapat dipulihkan dengan penggunaan kebijakan ekonomi makro. Namun, Model Keynesian dikritik karena kurang tanggap

terhadap stagflasi, suatu kondisi ketika ekonomi mengalami pertumbuhan dan inflasi yang lambat.

Selama depresi besar, John M. Keynes percaya bahwa permintaan keseluruhan yang tidak memadai dapat menyebabkan periode pengangguran tinggi yang berkepanjangan. Model Keynesian terpisah sama sekali dengan model ekonomi klasik bahwa setiap ekonomi mandiri. Menurut Model Keynesian dan kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa akan meningkatkan permintaan produk dan jasa yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, jika ekonomi terlalu panas, penurunan pengeluaran bisa mungkin menurunkan permintaan serta produksi. Stimulasi permintaan agregat seperti yang disebutkan, dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif; pengurangan AD disebut kebijakan fiskal kontraktif. Oleh karena itu, efek utama dari kebijakan fiskal adalah permintaan agregat untuk barang dan jasa. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tertentu untuk mengatur arah pembangunan yang dinamis. Kebijakan fiskal ini bergantung pada 2 metode, yaitu perpajakan dan pengeluaran pemerintah; namun demikian, beberapa ekonom percaya bahwa pembayaran transfer juga dapat digunakan sebagai kebijakan. Ketiga kebijakan tersebut diterapkan baik sebagai kebijakan ekspansif (menstimulasi pertumbuhan ekonomi saat resesi), maupun kebijakan fiskal kontraktif (melambatkan pertumbuhan ekonomi saat inflasi)(Breman, 2016).

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah alat kebijakan ekonomi makro kedua yang dapat digunakan pemerintah untuk mengintervensi perekonomian. Moneter mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian yang dikenal sebagai jumlah uang beredar, yang diatur oleh bank nasional. Selanjutnya, kebijakan ini mengubah ketersediaan kredit bagi individu untuk meningkatkan atau menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Model Keynesian juga dapat berhasil diterapkan untuk kebijakan moneter, baik bersifat ekspansif

maupun kontraktif untuk mengubah permintaan agregat dan PDB. Namun perbedaan antara kedua kebijakan ekonomi makro tersebut adalah alat yang digunakan, tetapi juga waktu untuk menerapkan setiap kebijakan. Menurut penelitian, kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal. Tiga alat berbeda yang diterapkan kebijakan moneter, berfokus pada pasokan uang dalam kaitannya dengan bank sentral, disebut tingkat diskonto, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan (Breman, 2016).

J. MASA DEPAN KEBIJAKAN STABILISASI

Secara umum, kebijakan fiskal dan moneter akan terus digunakan oleh bank sentral dan pemerintah negara yang menjaga perekonomian dalam keadaan sehat. Kebijakan stabilisasi sebagai kebijakan fiskal utama akan dibutuhkan bahkan di masa mendatang. Mengingat permintaan terus-menerus agar pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik dan tingkat harga yang stabil, kebijakan stabilisasi akan tetap menjadi alat ekonomi yang vital.

DAFTAR PUSTAKA

- Breman, Alexander C., 2016. The Effect of The Fiscal and Monetary Policy On the Exchange Rate. Seminar paper.
- BYJU'S. 2023. Difference between Monetary Policy and Fiscal Policy. <https://byjus.com/commerce/difference-between-monetary-policy-and-fiscal-policy/>. Accessed, 28 June, 2023.
- Ettlinger, Michael. 2008. Time for Stabilization, Stimulus, Recovery, and Growth. <https://www.americanprogress.org/article/time-for-stabilization-stimulus-recovery-and-growth/>. Accessed, 25 June, 2023.
- Gordon, Jason 2023. Stabilization Policy (Economics) – Explained, What is a Stabilization Policy? <https://thebusinessprofessor.com/economic-analysis-monetary-policy/stabilization-policy-definition>. Accessed : 20 June 2023.

- Guitton, Henri. 2023. Economic Stabilizer. Encyclopedia Britannica, Invalid Date, <https://www.britannica.com/money/topic/economic-stabilizer>. Accessed 27 June 2023.
- Hayes, Adam. 2021. Stabilization Policy: Definition in Economics and Future. <https://www.investopedia.com/terms/s/stabilization-policy.asp>. Accessed : 20 June 2023.
- Issing, Otmar. 2008. Asset Prices and Monetary Policy. Paper. Contribution to Cato Institute, 26th Annual Monetary Conference November 19, 2008-09-22, Cato Institute, Washington, DC.
- Market Business News, 2023. What is stability? Definition and meaning. <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/stability-definition-meaning/>. Accessed : 24 June 2023.
- Nasrudin, Ahmad. 2019. Stabilitas ekonomi. <https://cerdasco.com/stabilitas-ekonomi/>. Accessed : 23 June 2023.
- Studysmarter, 2023. Stabilization Policy. <https://www.studysmarter.us/explanations/macroeconomics/macroeconomic-policy/stabilization-policy/>. Accessed : 23 June 2023.
- Wallstreetmojo Team, 2023. Economic Stability <https://www.wallstreetmojo.com/economic-stability/>
- Zanzalari, Danielle. 2022. What Is Stabilization Policy? <https://www.thebalancemoney.com/what-is-stabilization-policy-5205132>. Accessed : 23 June 2023.

Profil Penulis

Muhammad Ikram Idrus



Lahir di Makassar pada 26 Desember 1959. Pendidikan yang telah dilalui adalah: Sekolah Dasar Negeri Mangkura Makassar, tamat tahun 1972; Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Makassar, tamat tahun 1975; Sekolah Menengah Atas Negeri I Makassar, tamat tahun 1979; S1 Universitas Hasanuddin, Program Studi Manajemen, tamat tahun 1985; S2 Universitas Hasanuddin, Program Studi Ekonomi Sumber Daya Alam, tamat tahun 1992; S3 Universitas Hasanuddin, Program Ekonomi, tamat tahun 2017. Bermukim di Makassar dan bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan status sebagai Dosen dipekerjakan (DPK). Prestasi yang pernah diraih diantaranya :Sebagai Dosen Teladan II di wilayah kerja Kopertis IX Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya tahun 2000; Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2017 atas Peran Aktif dan Pengabdian dalam Pembangunan Bidang Keagamaan di Sulawesi Selatan; Anugrah Prestasi Insani / YAPI AWARD, The Prominent Figure Of Indonesian Development, Certificate, 2011.



BAB XII

KEBIJAKAN

FISKAL

Dr. Arniati, S.E., M.Pd.

**FINANCIAL
RESERVE**

**FINANCIAL
RESERVE**

A. DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL

Peraturan atau pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang dikenal dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, sebagaimana ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah arahan dari pemerintah yang berdampak pada perekonomian negara melalui penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempertahankan kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Kebijakan fiskal, sebagaimana didefinisikan oleh Dornbusch et al. (2011), merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai besarnya transfer dan belanja serta komposisi pajak. Menurut Hubbard et al. (2012), kebijakan fiskal didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang mengatur perubahan perpajakan, pengeluaran, dan transfer dengan maksud mempengaruhi kondisi ekonomi makro. Menurut bappenas.go.id, secara umum kebijakan fiskal mengacu pada penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pemerintah antara lain menurunkan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Benar-benar tujuan yang bagus.

Beberapa ahli, seperti Zain, menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dan dikumpulkan pemerintah melalui pajak. Negara memungut pajak, baik melalui pemerintah nasional atau kota. Sementara itu, menurut Alam, kebijakan fiskal merupakan strategi yang mengubah pengeluaran dan pendapatan pemerintah guna membantu kondisi perekonomian tersebut. Haryadi juga menyampaikan pemikirannya tentang tujuan kebijakan fiskal. Dia mengklaim bahwa kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mengendalikan perekonomian negara tersebut. Tujuannya adalah untuk menempuh jalur yang lebih menguntungkan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Rahasiannya adalah mengubah kuitansi dan pengeluaran.

Ada beberapa indikator yang sering digunakan dalam kebijakan fiskal, antara lain rasio penerimaan pajak, keseimbangan utama, pengurangan anggaran, dan utang pemerintah. Enam (enam) indikator keuangan negara—rasio penerimaan pajak, rasio belanja modal, rasio subsidi energi, rasio keseimbangan primer, rasio defisit anggaran, dan rasio utang pemerintah—dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RKP dan RPJMN) dan menjelaskan arah kebijakan fiskal. (Masukkan metadata indikator keuangan negara di sini).

Menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya *Fiscal and Monetary Policy: Theory and Empirics* mengatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan pasar. Pajak merupakan salah satu jenis alat penerimaan negara. DPR akan menggelar rapat untuk menyusun kebijakan fiskal guna mengontrol besaran penetapan pajak bagi wajib pajak. Setelah itu, semua wajib pajak harus mematuhi rekomendasi strategi sementara pegawai pemerintah menangani pengumpulan dan pengawasan. Pemerintah biasanya mengadopsi strategi fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu khawatir, apalagi bagi Anda yang ingin membeli rumah.

Implementasi suatu strategi atau rencana pemerintah untuk mempertahankan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara dikenal dengan kebijakan fiskal. Lebih khusus lagi, kebijakan fiskal adalah inisiatif pemerintah yang mengubah pengeluaran dan pendapatan pemerintah agar berdampak pada perekonomian. Pajak adalah sarana utama untuk mengendalikan pendapatan, dan anggaran dibuat setiap tahun untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan inisiatif pemerintah. Kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu melalui perpajakan, pendapatan, hutang, dan pengeluaran pemerintah terkait erat dengan kebijakan fiskal. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan fiskal Indonesia.

Peran Kebijakan Fiskal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara

Kebijakan fiskal suatu negara memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi atau diselesaikan ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

1. Dapat menurunkan tingkat inflasi; sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal; kebijakan berperan dalam menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Proyek-proyek pemerintah ditunda atau ditinggalkan untuk menurunkan tingkat inflasi.
2. Dengan mempromosikan produksi barang dan jasa publik, peran kedua ini dapat meningkatkan produk domestik bruto.
3. Dapat menurunkan angka pengangguran nasional; tugas ini dilakukan dengan melaksanakan proyek pembangunan negara.
4. Dengan membuka lapangan kerja baru, peran ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang perlu dipenuhi atau dicapai ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dalam konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Pemerintah telah mengalokasikan sebagian anggaran untuk jaminan sosial dan subsidi guna mendorong konsumsi dengan tetap menjaga daya beli dan stabilitas harga. Sementara itu, pemerintah memastikan tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur karena masyarakat tidak akan berinvestasi jika infrastruktur di bawah standar. Pajak mendanai salah satu anggaran pemerintah. Namun selain memungut pajak, pemerintah juga memberikan keringanan pajak. Pembebasan pajak dan tunjangan pajak adalah dua contoh insentif pajak yang tersedia untuk semua industri. Keuntungan pajak lainnya hanya tersedia untuk industri tertentu, sementara yang lain bersifat regional.

Dasar Hukum Kebijakan Fiskal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memuat peraturan yang mengatur tentang kebijakan fiskal. Peraturan tersebut menetapkan bahwa otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi adalah peran kebijakan fiskal yang terkait dengan anggaran (APBN). Anggaran negara berfungsi sebagai dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan fungsi kewenangannya.

Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 1 Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”. APBN menjadi pedoman bagi pimpinan dalam merencanakan tugas-tugas tahun yang bersangkutan dalam rangka fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan acuan untuk menentukan sesuai atau tidaknya tindakan penyelenggaraan negara dengan ketentuan yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi pengawasan kebijakan fiskal.

B. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Penetapan arah, sasaran, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional dan perluasan ekonomi merupakan tujuan utama kebijakan fiskal. Selain itu, di bawah ini adalah beberapa tujuan kebijakan fiskal:

1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Jelas dari pembahasan sebelumnya bahwa tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan fiskal sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal diantisipasi akan banyak melahirkan penemuan-penemuan baru di bidang ekonomi yang nantinya akan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian di berbagai bidang seperti bank, korporasi, dan usaha mikro karena salah satu fungsinya adalah mengatur pendapatan negara.

2. Menjaga Stabilitas Harga

Ada banyak alasan mengapa harga barang tiba-tiba naik. Dari yang menguntungkan, seperti permintaan akan produk tertentu, hingga yang tidak jujur, seperti monopoli dan penimbunan komoditas. Kebijakan fiskal diperlukan untuk memastikan bahwa harga komoditas kembali stabil sehingga masyarakat umum dapat membelinya untuk mencegah dan memberantasnya.

3. Mendorong Laju Investasi

Investor membutuhkan lingkungan investasi yang menguntungkan untuk menempatkan uang di suatu negara. Kebijakan fiskal diperlukan untuk menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara sehingga dapat membangkitkan kepercayaan investor untuk mengucurkan uang tunai. Ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Penambahan pendapatan dari pajak perusahaan tentunya akan menguntungkan negara jika dapat mendorong laju investasi.

4. Meningkatkan Potensi SDM

Sesuai dengan gagasan sebelumnya, jika laju investasi kuat, lapangan kerja baru dapat diciptakan dan akhirnya tenaga kerja dapat terserap. Secara alami, hal ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu masalah utama di setiap negara. Selain itu, kebijakan fiskal seperti inisiatif Kartu Indonesia Pintar dapat membantu memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Program ini bertujuan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja pada kelompok usia produktif sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam dunia kerja serta meningkatkan perekonomian bangsa.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Terwujudnya keadilan sosial bagi semua orang merupakan tujuan akhir dari kebijakan fiskal. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan adalah salah satu contoh penerapannya. Inisiatif tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga, melestarikan, dan

meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha sektor keuangan dan riil untuk menjalankan usaha di masa pandemi COVID-19. Diharapkan melalui pelaksanaan program ini, ekonomi kerakyatan tetap terjaga dan keadaan bangsa tetap stabil.

C. JENIS-JENIS KEBIJAKAN FISKAL

Jelas dari pembahasan sebelumnya bahwa tujuan kebijakan fiskal sangat penting untuk stabilitas negara. Kebijakan fiskal sendiri terbagi menjadi 2 kategori dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Jenis pertama dari kebijakan fiskal memerlukan peningkatan pengeluaran pemerintah sambil menurunkan pajak. Diharapkan dengan penerapan kebijakan fiskal ini, daya beli masyarakat yang tadinya rendah akan kembali meningkat sehingga membuat roda perekonomian bergerak lebih cepat. Tujuan lainnya adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pandemi pada tahun 2020–2021 adalah salah satu contohnya. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan APBN menjadi kewenangan BKF Kementerian Keuangan.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Berlawanan dengan tipe pertama, kebijakan fiskal kontraktif melibatkan pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan memerangi inflasi. Kebijakan fiskal semacam ini biasanya diterapkan jika pemerintah melihat ekonomi sedang booming dan mulai memanas untuk mengurangi tekanan permintaan. kebijakan fiskal yang lebih ketat, atau yang mengurangi pengeluaran negara sekaligus menaikkan tarif pajak. Untuk memerangi inflasi, strategi ini berupaya menurunkan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah menaikkan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 35% bagi mereka yang berpenghasilan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ada beberapa jenis kebijakan fiskal menurut Tim Adiwiyata.

1. Manajemen anggaran: Ini adalah metode pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan kebijakan pinjaman yang dirancang untuk menghasilkan kondisi ekonomi yang stabil dan stabil.
2. Anggaran pembiayaan fungsional: Ini adalah seperangkat peraturan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengendalikan pengeluaran dengan memeriksa pengaruh pendapatan langsung dan inisiatif untuk meningkatkan prospek pekerjaan.
3. Stabilisasi anggaran otomatis: Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengontrol pengeluaran dengan menimbang keuntungan dan kerugian dari berbagai program untuk melakukan penghematan.
4. Defisit anggaran adalah ketika pengeluaran melebihi pendapatan karena kebijakan pemerintah yang mengontrol sistem anggaran.
5. Anggaran berimbang: Jumlah realisasi belanja negara atau realisasi pendapatan sama dengan jumlah ini.
6. Surplus anggaran: Karena pemerintah tidak membelanjakan uangnya, tabungan pemerintah akan meningkat.

D. BENTUK KEBIJAKAN FISKAL

Secara teoritis, bentuk-bentuk kebijakan fiskal dapat berupa.

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Jenis kebijakan fiskal ini dikembangkan setelah mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh, terutama dalam kaitannya dengan tujuan penggunaan dan fungsinya. Strategi fiskal ini dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor, terutama implikasi langsung dan tidak langsung, karena mengutamakan fitur nilai guna dan fungsi.

2. Kebijakan Fiskal Sengaja

Itu adalah langkah keuangan terencana yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap keadaan yang terjadi secara tidak terduga. Tujuannya adalah untuk menanggapi kondisi guncangan ekonomi yang cepat dengan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan dan tidak memperhitungkan terlalu banyak detail menit. Banyak jenis kebijakan fiskal yang disengaja ini dapat berupa penyesuaian terhadap pengeluaran negara, penyesuaian terhadap sejumlah peraturan yang mempengaruhi pendapatan, atau penyesuaian terhadap bidang pendapatan dan pengeluaran tertentu.

3. Kebijakan fiskal tidak disengaja

Karena pemerintah akan membuat keputusan fiskal tersebut tanpa memeriksa banyak faktor secara hati-hati dari sudut pandang jangka panjang, ini dapat dikategorikan sebagai impulsif. Jenis kebijakan fiskal ini biasanya diterapkan sebagai reaksi terhadap kondisi bisnis yang lemah.

E. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Mengetahui tujuan kebijakan fiskal memang penting, tetapi juga penting untuk memahami alat yang digunakan pemerintah untuk menerapkan peraturan ini. Sektor ekonomi yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro adalah instrumen itu sendiri. Kebijakan fiskal setidaknya menggunakan 3 alat yang berbeda, yaitu:

1. Pajak

Pajak merupakan alat yang paling signifikan dalam kebijakan fiskal karena memiliki kemampuan untuk mengendalikan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat mengubah daya beli masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan pajak untuk mencapai tujuan ekonomi. Daya beli akan turun saat pajak dinaikkan, begitu pula sebaliknya saat pajak dipotong. Selain daya beli, terdapat hubungan antara pajak dan output, dimana output akan turun ketika pajak naik dan sebaliknya.

2. Obligasi Publik

Alat kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik investasi adalah obligasi publik. Orang yang memiliki uang akan diberikan kesempatan untuk membeli surat-surat tersebut melalui Surat Utang Negara (SUN) Ritel, dengan negara membayar utang dan bunganya. SBN ritel atau surat berharga negara yang diperdagangkan adalah salah satu produknya. Surat ini ditawarkan untuk dijual sebagai instrumen keuangan. Selain mendapatkan imbal hasil melalui bunga, pembelian SBN Ritel juga akan berkontribusi langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara.

3. Pengeluaran Belanja

Pengeluaran negara adalah alat terakhir dalam gudang kebijakan fiskal. Pemerintah harus mengubah pengeluaran negara sesuai dengan situasi yang dihadapi untuk memastikan stabilitas ekonomi. Ketika neraca pembayaran negara berada di posisi merah, misalnya, pemerintah harus memangkas pengeluaran di bidang lain hingga keadaan stabil, seperti menunda pembayaran THR untuk karyawan. dan hemat.

Contoh Kebijakan Fiskal

Tujuan, skala, dan jenis pelaporan keuangan hari ini telah dijelaskan, beberapa contoh kegiatan keuangan yang dilakukan selama COVID-19 antara lain:

1. Peningkatan Anggaran Penanganan COVID-19

Seperti yang telah ditetapkan, dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian yang rusak akibat wabah, pemerintah membuat inisiatif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah menggenjot anggaran untuk situasi darurat lebih dari Rp 700 triliun selama pelaksanaannya. Uang ini awalnya diambil dari program lalu lintas. Program PEN telah mengurangi kas negara secara signifikan, sehingga pemerintah juga semakin agresif dalam kebijakan penarikan utangnya untuk menutup kekurangan anggaran.

2. Subsidi Bahan Bakar

Salah satu contoh pelaksanaan kebijakan fiskal yang paling sering dirasakan adalah pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Penurunan biaya bahan bakar diantisipasi untuk mendukung usaha kecil dan masyarakat lainnya, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain BBM, subsidi dapat diberikan kepada lembaga negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Setiap subsidi bertujuan untuk selalu sampai langsung ke individu yang membutuhkannya, memastikan bahwa itu efektif.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kata yang sering digunakan dalam bidang ekonomi adalah kebijakan moneter, selain kebijakan fiskal. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan tidak sama. Kebijakan moneter adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar untuk mengelola inflasi, berbeda dengan kebijakan fiskal, yang mengatur pendapatan dan pendapatan negara.

Perbedaan lainnya adalah, berbeda dengan kebijakan fiskal, yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan moneter dibuat oleh bank sentral, dan perubahan suku bunga akan berdampak pada biaya pinjaman dan pengeluaran konsumen dan perusahaan. Instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi, dan organisasi independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada umumnya melaksanakan kebijakan fiskal. Organisasi-organisasi ini memiliki kekuatan untuk mengontrol serangkaian undang-undang yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor, dan impor.

Selain itu, kebijakan moneter berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan output dan investasi untuk kemudian mendorong perekonomian. Bergantung pada kebutuhan dan keadaan saat itu, kebijakan moneter atau fiskal dapat diterapkan. Regulasi ekonomi oleh

pemerintah melalui langkah-langkah untuk mengelola jumlah uang beredar dan suku bunga dikenal sebagai kebijakan moneter. Baik kebijakan fiskal maupun moneter dapat memengaruhi perekonomian, tetapi kebijakan moneter lebih cenderung berdampak pada sektor riil seperti harga, keuangan, dan belanja konsumen. Bank sentral, khususnya Bank Indonesia (BI), merupakan entitas yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Pengendalian suku bunga adalah sejenis kebijakan moneter, oleh karena itu ketika BI menaikkan atau menurunkan suku bunga, hal itu biasanya berdampak pada sejumlah industri, seperti real estat, penjualan mobil, dan perbankan.

F. KOMPONEN DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal umumnya terdiri dari empat bagian. Kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan kebijakan pengelolaan utang membentuk empat elemen.

1. Kebijakan Perpajakan

Perpajakan kebijakan adalah kebijakan yang digunakan untuk menentukan kebijakan fiskal. Sumber pendapatan utama bagi negara asing adalah apakah pajak dipakai panjang atau pendek. Untuk dapat memajukan pengetahuan perpajakan melalui berbagai keputusan terkait perpajakan, dibuat kebijakan perpajakan. Pemerintah dapat mengurangi daya beli warga dengan menghapus pajak, yang dapat mengakibatkan penurunan output dan investasi. Demikian pula, jika pemerintah menurunkan harga piyama, lebih banyak orang yang mampu membelinya, yang akan meningkatkan inflasi.

2. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran adalah elemen kedua dari kebijakan fiskal. Di negara yang praktik pengeluarannya diatur, komponen ini berkaitan dengan pendapatan dan belanja modal. Negara dapat mengeluarkan belanja modal untuk berbagai keperluan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pengeluaran juga dapat digunakan untuk membayar kepentingan

internal dan eksternal serta tugas negara. Pengeluaran negara atau disebut juga dengan APBN merupakan kompilasi dari berbagai pengeluaran negara. Pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan biaya operasional pemerintah merupakan instrumen APBN.

3. Kebijakan Investasi serta Kebijakan Disinvestasi

Kebijakan investasi dan disinvestasi merupakan elemen ketiga dari kebijakan fiskal. Investasi harus dioptimalkan karena tujuan dari komponen kebijakan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat seimbang.

4. Kebijakan Pengelolaan Hutang

Pemerintah suatu negara menerapkan bagian dari kebijakan pengelolaan utang atau surplus ini jika negara tersebut mengalami surplus akibat pendapatan pemerintah melebihi pengeluaran anggaran. Defisit atau kerugian akan dialami oleh bangsa itu jika keadaan sebaliknya muncul di sana. Defisit dapat dibayar dengan menciptakan uang atau meminjam uang dari negara lain. Berikut adalah contoh kebijakan fiskal yang dapat diketahui oleh Grameds agar lebih memahami kebijakan fiskal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. 2014. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- Kebijakan Fiskal Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tautan: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-kaitannya-dengan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/> (Diakses 5 Juni 2023)
- Tujuan, Fungsi, dan Instrumen Kebijakan Fiskal Yang Perlu Dipahami Tautan: <https://klikpajak.id/blog/tujuan-fungsi-dan-instrumen-kebijakan-fiskal-yang-perlu-dipahami/> (Diakses 5 Juni 2023)

- Priyono dan Teddy Chandra (2016). Esensi Teori Ekonomi Makro (PDF). Sidoarjo: Zifatama Publishing. hlm. 17. ISBN 978-602-14020-0-9.*
- Digdowiseiso, Kumba. Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 125. ISBN 978-623-7376-41-5.*
- Digdowiseiso, Kumba (2014). Kebijakan Fiskal (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 1. ISBN 978-979-028-241-4.*
- Muljawan, dkk. (2020). Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X (PDF). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. hlm. 54.*
- Muchtolifah. Ekonomi Makro (PDF). Unesa University Press. hlm. 75. ISBN 978-979-028-241-4.*

Profil Penulis

Arniati



Arniati, lahir di Bontobangun Bulukumba pada tanggal 07 Maret 1971 dari pasangan Puang Muddin dan Puang Hj. Cicang. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 85 Bingkarongo lulus pada tahun 1985, kemudian SMP Negeri Palampang lulus pada tahun 1988, dan SMA Negeri Tanete lulus pada tahun 1991 di Kabupaten Bulukumba. Penulis kemudian melanjutkan studi jenjang S1 pada jurusan Manajemen STIE Bajiminasa Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1997. Selanjutnya penulis menamatkan S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Kekhususan Pendidikan Ekonomi) program pascasarjana UNM yang lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012, penulis menempuh kembali Pendidikan lanjutan yaitu program S3 Program Pascasarjana UNM Program Studi Pendidikan Ekonomi dan menamatkannya pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai dengan berprofesi sebagai Dosen Tetap Yayasan STISIPOL 17 Agustus 1945 Ujung Pandang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 penulis merupakan dosen di STKIP Mega Rezky Makassar. Tahun 2017 sampai sekarang, penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain menjadi tenaga pengajar, penulis aktif meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.



BAB XIII
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

Nancy Nopelme SE., M.Si

A. DEFINISI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan luar negeri adalah aktivitas ekonomi dan perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Di sini, "penduduk" dapat berarti hubungan antara individu dan pemerintah suatu negara, atau antara individu dan pemerintah negara lain.

Manfaat melakukan perdagangan luar negeri adalah :

1. Memperoleh produk yang tidak dapat dibuat di dalam negeri

Hasil produksi setiap negara berbeda karena banyak faktor. Kondisi geografis, iklim, tingkat penggunaan IPTEK, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini. Perdagangan internasional memungkinkan setiap negara memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

2. Keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh : Amerika Serikat dan Jepang, misalnya, memiliki kemampuan untuk membuat kan. Namun, Amerika Serikat tidak dapat memproduksi dengan tingkat efisiensi yang sama seperti Jepang. Dalam situasi seperti ini, Amerika Serikat harus mengurangi produksi kainnya dan mengimpor produk tersebut dari Jepang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan faktor produksi.

Dengan mengadakan spesialisasi dalam perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut

- a. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efektif.
- b. Setiap negara memiliki hak untuk mendapatkan lebih banyak produk dalam negeri daripada produk luar negeri.

3. Mengembangkan pasar dan meningkatkan keuntungan

Pengusaha kadang-kadang menahan diri untuk tidak memanfaatkan sepenuhnya alat produksi mereka karena khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang akan mengurangi harga produk mereka. Dengan perdagangan internasional, pengusaha dapat memaksimalkan kinerja mesin mereka dan menjual manfaat produk mereka di luar negeri.

4. Transfer teknologi kontemporer

Suatu negara dapat memperoleh pengetahuan tentang teknik produksi yang lebih efisien dan metode manajemen yang lebih canggih melalui perdagangan dengan negara lain.

Akibat Perdagangan Internasional:

- a. Transaksi barang dan jasa antara negara
- b. Perdagangan sumber daya lintas negara
- c. Penggunaan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

B. PERTUMBUHAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kehidupan dunia pasti melibatkan interaksi dengan negara-negara lain. Perdagangan antarnegara, atau perdagangan internasional, adalah bentuk biasa dari kerja sama atau interaksi. Beberapa penyebab perdagangan internasional antara lain:

1. Revolusi Komunikasi dan Informasi

Ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan sistem berbasis komputer dan kemajuan dalam informasi, penggunaan satelit dan digitalisasi pemrosesan data, dan berkembangnya peralatan komunikasi.

2. Interdependensi Kebutuhan

Masing-masing negara memiliki keunggulan di bidang tertentu, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ini semua akan berdampak pada ketergantungan antara negara.

3. Liberalisasi Ekonomi

Dengan kebebasan untuk bertransaksi dan bekerja sama, setiap negara akan mencari peluang untuk berinteraksi melalui perdagangan antar negara.

4. Fundamental dari Keunggulan Komparatif

Apa yang dimiliki oleh suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara lain menentukan keunikannya. Ini akan memberi negara keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

5. Kebutuhan Devisa

Kebutuhan devisa suatu negara adalah faktor lain yang memengaruhi perdagangan internasional. Setiap negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dan memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu sumber devisa ini adalah pendapatan dari perdagangan internasional.

6. Adanya Perbedaan Selera

Suatu negara akan dapat berdagang jika ada perbedaan selera. Misalnya, negara X dan Y menghasilkan jumlah daging sapi dan daging ayam yang hampir sama. Jika orang di negara X tidak menyukai daging sapi dan orang di negara Y tidak menyukai daging ayam, dapat terjadi ekspor yang saling menguntungkan antara kedua negara tersebut: negara X mengimpor dan mengekspor daging sapi dan negara Y mengimpor dan mengekspor daging ayam.

7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi

Karena keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara, perdagangan diperlukan. Misalnya, negara X dengan iklim tropis menghasilkan pisang dan kopi untuk ditukar dengan barang dan jasa dari negara lain.

8. Diferensiasi dalam Kebudayaan dan Gaya Hidup Perdagangan antarnegara juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan gaya hidup di masing-masing negara; misalnya, produk seni atau kerajinan yang dibuat oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh budaya dan gaya hidup orang di negara yang bersangkutan.

C. TEORI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional, antara lain:

1. Membantu menjelaskan rute, komposisi, dan dampak perdagangan internasional terhadap struktur ekonomi suatu negara,
2. dapat menunjukkan adanya keuntungan dari perdagangan internasional,
3. dapat mengatasi defisit neraca pembayaran.

Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain

1. Teori-teori Klasik

Teori ekonomi selalu didasarkan pada asumsi. Selain itu, teori-teori tradisional tentang perdagangan internasional didasarkan pada beberapa keyakinan berikut:

a. Dua barang dan dua Negara

Menurut asumsi ini, masalah perdagangan internasional terlalu sederhana sehingga tidak realistis. Ini terutama benar di era saat ini, ketika banyak negara tertutup atau tidak melakukan perdagangan sama sekali dengan negara lain, termasuk Korea Utara. Dengan asumsi ini, pemahaman dasar teori klasik akan menjadi lebih mudah. Dalam kasus lebih dari dua negara dan dua barang, masalah perdagangan internasional saat ini dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis dari teori-teori klasik tersebut (Tulus T.H. Tambunan, 2004)

b. Nilai berdasarkan keseragaman biaya tenaga kerja

Nilai suatu produk hanya didasarkan pada biaya tenaga kerja, yaitu jumlah jam kerja atau hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya dikalikan dengan upah per pekerja. Dalam teori klasik, faktor produksi tenaga kerja dianggap sama. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kualitas tenaga kerja antar negara (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

c. Biaya produksi yang tetap tidak berubah

Biaya produksi per unit output tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah, menurut teori klasik. Oleh karena itu, harga atau biaya per satu unit barang tetap tidak berubah berapa pun negara yang memproduksinya. Selain itu, asumsi ini tidak masuk akal karena tidak

mengevaluasi bagaimana inflasi berdampak pada produksi dan sisi suplai (Tulus T.H. Tambunan, 2004)

d. Tidak ada biaya transportasi

Ini juga menyederhanakan masalah karena dalam kenyataannya biaya transportasi sangat mempengaruhi harga jual barang ekspor, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing barang tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa biaya transportasi telah menurun dan jauh lebih rendah daripada tiga puluh tahun yang lalu karena kemajuan dalam teknologi transportasi (Tulus T.H. Tambunan, 2004)

e. Faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak antar Negara.

Teori klasik baru akan segera muncul, tetapi asumsi ini di masanya. sebenarnya pada saat itu karena kendala dalam perjalanan antara negara. Namun, sekarang ada banyak orang Afrika yang sangat baik dalam mengimpor barang, meskipun negara mereka kekurangan bahan baku dan harus membeli barang dari negara-negara berkembang. Dengan kata lain, saat menganalisis kinerja perdagangan internasional dan daya saing suatu negara, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah tingginya mobilitas faktor produksi dan faktor input lainnya antar negara.

f. Distribusi pendapatan tidak berubah

Teori klasik berpendapat bahwa perdagangan dunia bebas akan memberikan keuntungan yang sama bagi semua negara yang terlibat, sehingga tidak akan mengubah bagaimana pendapatan dibagi antara negara. Itu pasti tidak benar. Ini karena kondisi yang berbeda di antara negara-negara berbeda menyebabkan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan dalam perdagangan global (Tulus T.H. Tambunan, 2004)

g. Tidak ada perubahan teknologi

Ini termasuk asumsi bahwa perdagangan global sangat ditentukan oleh teknologi.

h. Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter

Mungkin karena uang tidak ada, perdagangan antarnegara dilakukan dengan tukar menukar barang, barter, atau imbal beli. Walaupun ada transaksi perdagangan antarnegara yang dilakukan melalui sistem barter dengan alasan tertentu, pembayaran dengan uang masih merupakan dasar perdagangan internasional saat ini. Pemerintah Indonesia juga sering melakukannya. Misalnya, mereka menjual pesawat buatan IPTN ke pemerintah thailand dengan menerima pembayaran dalam bentuk komoditi pertanian dari thailand selama masa Habibie; mereka juga membeli pesawat perang Sukhoi dan helikopter dari Rusia dengan minyak kelapa sawit (CPO) (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

2. Keunggulan absolut

Merkantilisme, sebuah filsafat ekonomi, berpendapat bahwa cara paling penting bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan berkuasa adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Sebagian besar emas dan logam mulia akan mengimbangi perbedaan (Salvatore 1997:23). Buku terkenal Adam Smith, *The Wealth Of Nations*, diterbitkan pada tahun 1776 dan menentang pandangan merkantilis dan mendukung perdagangan bebas sebagai kebijakan terbaik untuk negara—negara di seluruh dunia. Adam Smith menunjukkan bahwa perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk berspesialisasi dalam produksi komoditi dengan keunggulan absolut (memproduksi dengan lebih efisien) dan mengimpor komoditi dengan kerugian absolut (memproduksi dengan kurang efisien). Perdagangan antarnegara akan menghasilkan spesialisasi internasional dari komponen produksi yang akan meningkatkan produksi global. Oleh karena itu, kebutuhan suatu negara tidak diperoleh melalui pengorbanan negara lain; sebaliknya, setiap negara dapat mendapatkan kebutuhannya secara bersamaan.

3. Keunggulan Komparatif

Ricardo mengatakan bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi kedua komoditi, jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Negara-negara yang tidak efisien akan spesialisasi dalam mengekspor produk yang mengalami kerugian benar-benar lebih kecil. Negara ini memiliki keunggulan pada komoditi ini. komparatif (keunggulan yang sebanding). Di sisi lain, negara tersebut mengimport barang dengan kerugian yang jauh lebih besar. Dari Negara mengalami kerugian yang signifikan pada komoditi ini. ini sudah diketahui dengan undang-undang keunggulan komparatif. Teori perdagangan internasional menyelidiki dasar-dasar dari apa yang terjadi. perdagangan internasional dan keuntungan. Kebijakan Perdagangan internasional membahas penyebabnya, serta efeknya. perdagangan dan topik proteksionisme (Salvatore, 1997). Fokus utama perdagangan internasional adalah penurunan distorsi yang disebabkan oleh kebijakan kebijakan tarif dan non-tarif pemerintah — harga. Biaya perdagangan disebabkan oleh pengenaan tarif sebagai pajak. meningkat. Karena biaya perdagangan meningkat, harga barang impor negara—negara pengekspor akan menghasilkan peningkatan harga, untuk barang—barang ekspor dan volume perdagangan yang menurun.

4. Teori-teori Modern

a. Teori Heckscher-Ohlin

Dalam teorinya tentang timbulnya perdagangan, Heckscher-Ohlin (1995) berpendapat bahwa meskipun faktor bawaan setiap negara berbeda, fungsi produksi setiap negara sama. Dengan menggunakan asumsi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa karena faktor bawan dan fungsi produksi yang berbeda, suatu negara akan cenderung mengekspor komoditi yang secara intensif dengan menggunakan faktor produksi yang relatif banyak dimiliki. Selain itu, suatu negara akan mengimport barang-barang dengan biaya tinggi dan faktor produksi

yang sangat langka. Ketersediaan faktor produksi dan intensitas pemakaian faktor produksi, atau proporsi faktor produksi, adalah dua kondisi penting yang mendasari munculnya perdagangan internasional menurut teori Heckscher Ohlin (H-O). Akibatnya, teori H-O sering disebut sebagai teori proporsi atau faktor ketersediaan produksi. Faktor produksi berbeda dalam jumlah dan proporsi. Teknologi menentukan bagaimana berbagai faktor produksi digabungkan untuk membuat produk (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

Dalam teori H-O, perbedaan kondisi penawaran dalam negeri antar negara menjelaskan keunggulan komparatif. Berikut adalah dasar dari teori ini. Negara-negara tidak sama dalam hal minat dan preferensi, menggunakan teknologi yang sama, memiliki kualitas faktor produksi yang sama, dan mencapai tingkat hasil yang sama. Namun, mereka sangat berbeda dalam hal kekayaan alam atau ketersediaan faktor produksi. Harga faktor produksi akan berbeda karena perbedaan ini. Faktor produksi harga relatif akan berbeda karena perbedaan ini. Perdagangan antarnegara muncul sebagai akibat dari perbedaan ini dalam biaya produk alternatif. Menurut teori H-O, setiap negara akan berkonsentrasi pada jenis barang tertentu. Mereka juga akan mengekspor barang yang berlimpah atau harganya murah dan mengimpor barang yang bahan baku atau faktor produksi utamanya langka atau mahal (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

b. Teori Siklus Produk

Dinamika keunggulan komparatif suatu produk atau industri dapat dijelaskan dengan menggunakan teori siklus produk (Vernon, 1966) yang dikembangkan oleh (Williamson et al., 1983). Vernon berpendapat bahwa banyak produk diproduksi melalui siklus produk, yang bisa pendek atau panjang, yang terdiri dari empat tahap: pengembangan (inovasi) atau penciptaan (inovasi), introduksi, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus ini akan terjadi selama kondisi, yaitu kondisi yang mempengaruhi proses produksi dan persyaratan, berubah secara sistematis di lokasi. Oleh karena itu, menurut Vernon, keunggulan komparatif dari barang tersebut berubah seiring

berjalannya waktu dan secara global. Hipotesis siklus produk ini didasarkan pada asumsi bahwa ancaman dari pesaing atau peluang pasar biasanya menyebabkan inovasi. Dengan kata lain, kebutuhan dan kesempatan yang ada di pasar domestik sering menggerakkan perusahaan. Pasar domestik berfungsi sebagai tempat pelaksanaan produksi (atau tempat *trial and error*), serta sebagai sumber inovasi. Dengan dekat dengan pasar, manajemen dapat merespon pendapat pembeli dengan cepat (Tulus T.H. Tambunan, 2004). Inovasi, atau fase awal penciptaan produk baru, adalah tahap pertama. Salah satu karakteristik tahap ini adalah modal investasi yang sangat besar yang diperlukan untuk membiayai laboratorium dan tenaga ahli, dan desain dan metode produksinya terus berubah. Karena tidak hanya memerlukan modal yang besar tetapi juga tenaga kerja dengan keahlian dalam teknologi, desain, dan bidang lain, sebagian besar hanya industri negara maju yang dapat mencapainya karena mereka memiliki modal yang besar dan tenaga kerja berkualitas tinggi yang menguasai teknologi. Selain itu, selera masyarakat dan tingkat pendapatan rata-rata di negara pencipta lebih tinggi dibandingkan dengan NSB. Hal ini mendorong perusahaan di dalam negeri untuk melakukan inovasi karena mereka percaya ada pasar, setidaknya pada awalnya di dalam negeri (Tulus T.H. Tambunan, 2004). Perluasan, atau pertumbuhan, produksi adalah tahap kedua. Pada titik ini, permintaan untuk produk baru meningkat baik di pasar domestik maupun internasional, yang mengakibatkan ekspor produk baru. Produk baru tersebut pada awalnya diekspor ke negara-negara maju yang memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk membeli produk tersebut karena mereka tidak terlalu berbeda dengan negara penciptanya dalam hal pendapatan dan selera. Produksi domestik tidak sebanding dengan volume ekspor yang meningkat. Ini juga merupakan awal proses pembuatan produk dan standarisasinya. Pola proses produksinya juga berubah saat sistem perakitan dimulai, yang menunjukkan bahwa ekonomi eksternal menjadi sangat penting. Perusahaan inovator multinasional akan memiliki cabang di luar negeri untuk produksi. Perusahaan di negara lain akan memperoleh lisensi untuk memproduksinya jika tidak memiliki cabang di luar

negeri. Pada titik ini, pemasok mulai muncul, yaitu pemasok baru yang dapat memproduksi dalam skala ekonomis. Akibatnya, biaya produksi dan harga jual menjadi lebih murah daripada di negara yang inovatif, dan ada persaingan dalam hal inovasi produk dan kualitas. Ini adalah tempat NSB dapat berpartisipasi dalam proses produksi produk tersebut, terutama karena biaya tenaga kerja yang rendah (Tulus T.H. Tambunan, 2004).

c. Teori Skala Ekonomis

Teori skala ekonomis berbeda dari teori Heckscher-Ohlin (H-O). Dalam teori H-O, skala penambahan hasil tidak tetap, tetapi meningkat terus; misalnya, menambah 10% input pertama menghasilkan penambahan output 20%, menambah 10% input kedua menghasilkan penambahan output 30%, dan seterusnya. Oleh karena itu, skala ekonomis adalah suatu skala produksi di mana produksi dapat menghasilkan biaya per unit output terendah. Skala ekonomis dapat membantu menjelaskan beberapa pola perdagangan yang tidak dijelaskan dalam model h-o. Dengan skala ekonomi, suatu perusahaan di suatu negara dapat berspesialisasi dalam membuat produk dengan jangkauan produksi yang terbatas dan mengekspornya dengan harga yang lebih murah dari produk yang sama dari perusahaan di negara lain yang tidak memiliki skala ekonomi. Ini terjadi karena faktor-faktor seperti modal yang terbatas sehingga tidak dapat membangun kapasitas produksi yang besar atau keterbatasan teknologi sehingga proses produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi. Oleh karena itu, dalam era perdagangan bebas, skala ekonomis menjadi salah satu faktor yang menentukan keunggulan atau daya saing global suatu bisnis atau sektor (Tulus T.H. Tambunan, 2004). Kehadiran faktor produksi dari teori H-O sebagai sumber keunggulan komparatif (dalam harga) tidak lagi relevan karena skala ekonomis berkorelasi positif dengan luas kapasitas produksi dan tingkat intensitas pemakaian faktor produksi, khususnya modal. Dengan kata lain, Jepang, misalnya, memiliki SDA yang rendah tetapi masih dapat menghasilkan produk yang menggunakan bahan baku impor dengan harga yang jauh lebih murah

daripada produk yang dibuat oleh negara yang mengekspor bahan baku tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa produksi di Jepang dapat dilakukan dalam skala ekonomis yang besar, yang menghasilkan biaya produksi per unit output yang lebih rendah daripada di negara-negara SDA yang kaya (Tulus T.H. Tambunan, 2004). Adanya perbedaan harga relatif antara negara menyebabkan perdagangan internasional, menurut Donald A. Ball, (2000)

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan biaya produksi, yang disebabkan oleh:

1. Karunia Tuhan berbeda dengan faktor produksi
2. Perbedaan dalam teknologi yang digunakan dapat menentukan seberapa kuat faktor produksi yang dibutuhkan.
3. Diferensiasi dalam efisiensi faktor permintaan dan produksi
4. Nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain

D. KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Dalam hal perdagangan, kita akan menyoroiti tentang perdagangan bebas. Kebijakan ekonomi adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu. (Gilarso, 2004)

Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang / jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan.

Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah:

1. Perdagangan bebas biasanya menyebabkan persaingan, yang menyempurnakan skala ekonomi dan alokasi sumber daya.
2. Perdagangan bebas meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan kemajuan teknologi, yang meningkatkan produktivitas faktor produksi.
3. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas meningkatkan investasi, tabungan, dan keuntungan.
4. Menarik modal asing, tenaga ahli/laba, tabungan, dan investasi akan lebih mudah dengan perdagangan bebas

Kebijakan pada kegiatan perdagangan luar negeri misalnya ekspor diantaranya adalah:

1. Diskriminasi Harga, tindakan dalam penentuan harga dari barang yang tidak sama untuk suatu Negara dengan Negara lainnya. Misalnya: Untuk jenis yang sama maka akan dikenakan harga yang lebih mahal untuk dijual ke Negara yang satu atau lebih murah daripada Negara lainnya. Hal ini bisa jadi karena adanya perang aktif atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
2. Subsidi. Pemberian premi atau subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang melakukan ekspor. Pemberian subsidi ini untuk bantuan production cost serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.
3. Dumping. Kebijakan yang dibuat pemerintah yang menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk pengendalian pasar dalam negeri oleh pemerintah.
4. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan dimana masing-masing pemerintah memberi kebebasan ekspor dan impor.
5. Larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu Negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan misalnya alasan ekonomi, politik, social dan budaya.

Kebijakan impor dalam perdagangan luar negeri diantaranya:

1. Bea masuk/tariff, merupakan pembebanan pajak atas barang-barang impor atau barang yang masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam bentuk devisa.
2. Kuota impor, pembatasan barang impor dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri, hal ini guna memberikan bantuan kepada para produsen dalam negeri dalam menghasilkan barang yang nantinya diharapkan mampu bersaing dengan barang impor yang dijual di pasar dalam negeri.

3. Pengendalian devisa, jumlah devisa Negara yang akan digunakan untuk membayar utang impor dijatah dan akan dibatasi sehingga importir akan membatasi jumlah barang yang diimpor
4. Substitusi impor, membatasi penggunaan barang impor, dengan mendorong produsen dalam negeri untuk dapat membuat sendiri barang-barang yang di impor di dalam negeri.
5. Devaluasi, kebijakan dalam menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing sehingga dapat membuat barang impor menjadi lebih mahal, sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald A. Ball, W. H. M. (2000). *Bisnis internasional buku I*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Edisi Revisi)*. Kanisius.
- Salvatore, D. (1997). *International Economics - Dominick Salvatore - Google Buku*.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1ImbCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=salvatore+dominick&ots=YbGMZP6EmI&sig=28kjgeBHYZcwVpzXY8rM3vyLMOw&redir_esc=y#v=onepage&q=salvatore dominick&f=false
- Tulus T.H. Tambunan. (2004). Globalisasi dan perdagangan internasional. In *Bogor: Ghalia Indonesia* (1st ed.). <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17753>
- Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle. *Quarterly Journal of Economics*, 80(2), 190–207. <https://doi.org/10.2307/1880689>
- Williamson, O. E., Williamson, & Oliver. (1983). Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange. *American Economic Review*, 73(4), 519–540.

Profil Penulis

Nancy Nopeline



Penulis lahir di Medan, Tanggal 06 Nopember 1984. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung, melanjutkan Studi S2 di Universitas Sumatera Utara pada Jurusan Magister Ekonomi Pembangunan. Saat ini Penulis sedang menyelesaikan Program Doktorat pada Universitas Sumatera Utara pada jurusan Ilmu Ekonomi. Saat ini beliau menekuni bidang

Ekonomi moneter, dan perdagangan internasional. Sejak tahun 2021 Penulis menjadi Tenaga Ahli di instansi pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, contohnya Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah karya pertama penulis setelah sekian lama tertunda, semoga bermanfaat.

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Buku Pengantar Ekonomi Makro merupakan khazanah akademis untuk membedah aspek-aspek perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter dan fiskal. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terkait inflasi dipelajari penyebab, jenis-jenis, dan pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Pengangguran juga menjadi titik fokus, khususnya memahami penyebab dan dampaknya. Sementara kebijakan moneter membedah regulasi atas jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dan kebijakan fiskal mempelajari pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan memahami perubahan perekonomian global.

Editor:

DR. Sunarno Sastro Atmodjo
Ignatius Ario Sumbogo

Penulis:

DR. D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., IKom., M.M., M.Si., Slamet Suprihanto, S.E., M.Ak., M.M., C.A.P., C.A.A.T., C.T.T., C.P.F.R.A., Muhammad Rafi'i Sanjani, S.E.I., M.E., Dr. Asriati, SE., Msi., Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M., Dr. Muhammad Rusydi, M.Si., Dr. Muhammad Fahreza W, S.Pd, M.Pd, Naidah, M.Si., Rini Ardista, S.Pd.I., MM., Warda, S.E., M.E., Sriwanti Belani, S.E., M.M., DR. Muhammad Ikram Idrus, SE, MS., Dr. Arniati, SE.,MPd., Nancy Nopeline SE.,M.Si.

PT Kreasi Skrip Dijital

@2023



ISBN 978-623-97062-7-2 (PDF)

